



Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Cut Meutia 10, JAKARTA 10340
Telp. 021 - 3193 6422
Email: setjen@kawali.org

Nota Pastoral Konferensi Waligereja Indonesia 2026

JALAN HARAPAN DI TENGAH DINAMIKA BANGSA: Gereja Berjalan Bersama Merawat Keadaban Publik dan Meneguhkan Solidaritas Kemanusiaan di Indonesia

I. PENGANTAR

1. Gereja Katolik Indonesia, pada 3–7 November 2025, mengadakan Sidang Agung Gereja ke-5 di Jakarta. Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) mengambil tema **“Berjalan Bersama Sebagai Peziarah Pengharapan: Menjadi Gereja Sinodal yang Misioner untuk Perdamaian.”** Sidang Agung merupakan perayaan kasih, iman, dan harapan. Perayaan ini dilaksanakan dengan tekad untuk menjadikan nilai-nilai Injil relevan dan nyata dalam menanggapi situasi yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia.
2. Setelah perayaan kasih, iman, dan pengharapan selesai, Gereja perlu menerapkan hasil pertemuan di setiap regio, keuskupan, dan paroki seluruh Indonesia. Untuk membantu perwujudan hasil pertemuan, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) memutuskan untuk menerbitkan Nota Pastoral Konferensi Waligereja Indonesia 2026.
3. Nota Pastoral dibagi menjadi tiga bagian besar. Bagian pertama menyampaikan ucapan syukur atas karya agung Allah di tengah bangsa dan Gereja Indonesia. Bagian kedua memaparkan krisis multidimensi yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia saat ini. Bagian ketiga menyajikan tanggapan Gereja Indonesia terhadap krisis multidimensi. Gereja dipanggil, melalui upaya berjalan bersama sebagai elemen bangsa Indonesia, untuk membangkitkan harapan, keadaban publik, dan solidaritas kemanusiaan.
4. Kami berharap Nota Pastoral akan dijadikan panduan bagi seluruh Gereja Indonesia dalam menanggapi situasi yang sedang dialami oleh bangsa dan negara Indonesia, agar kita dapat membangun masa depan yang penuh harapan sehingga menjadi bangsa yang warganya hidup penuh martabat, mengalami keadilan sosial dan gender, hidup demokratis, menjaga kebinekaan, merawat bumi dan keutuhan ciptaan, serta semakin beriman.

II. UCAPAN SYUKUR ATAS KARYA AGUNG ALLAH

Syukur atas Karya Allah di dalam Bangsa dan Negara Indonesia

5. Pada 2026, bangsa Indonesia bersyukur atas perjalanan sejarah sebagai bangsa yang telah merdeka selama delapan puluh satu tahun. Kebangkitan Nasional pada 1908 menandai lahirnya identitas bersama sebagai satu bangsa. Pendirian Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908 melahirkan semangat persatuan, pendidikan dan perjuangan bersama sebagai satu bangsa. Sejak momen tersebut, kesadaran sebagai satu bangsa menghasilkan kesatuan berbagai gerakan perjuangan. Dua puluh tahun sejak Kebangkitan Nasional, melalui Sumpah Pemuda 1928, rakyat Indonesia secara eksplisit merumuskan diri sebagai Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa. Pada waktu yang hampir bersamaan, pada Februari 1923 berdiri organisasi politik Pakempalan Politik Katolik Djawi (PPKD). Perempuan Katolik Indonesia mendirikan Poesara Wanita Katolik pada 26 Juni 1924 di Yogyakarta serta memprakarsai dan mengikuti Kongres Perempuan Indonesia I pada 22-25 Desember 1928, juga di Yogyakarta. Poesara Wanita Katolik menjadi cikal bakal terbentuknya Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI). WKRI didirikan dalam Kongres Umat Katolik Seluruh Indonesia ke-2 (KUKSI II) di Yogyakarta pada 12 Desember 1949. Gerakan ini menjadi inspirasi bagi berbagai macam gerakan perempuan dalam memperjuangkan emansipasi dan keadilan *gender*.
6. Selanjutnya, para pemimpin rakyat merumuskan dasar berbangsa dan bernegara yang melahirkan Pancasila pada 1 Juni 1945. Tonggak-tonggak sejarah tersebut kemudian mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pancasila adalah jiwa, intisari, dan pilar dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi yang disahkan satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan.
7. Pada saat Nota Pastoral diterbitkan, bangsa Indonesia sedang menapaki persimpangan sejarah yang penting. Cita-cita kemerdekaan dan nilai-nilai luhur Pancasila tidak selalu dihidupi oleh para pemimpin bangsa. Dinamika sistem pemerintahan dan demokrasi dari Orde Lama sampai Orde Baru belum cukup untuk mewujudkan amanat konstitusional. Reformasi pun muncul pada Mei 1998 sebagai *koreksi total* atas pengelolaan negara dan bangsa Indonesia pada periode sebelumnya. Kini, kita mengenang lebih dari seperempat abad Reformasi 1998 yang membuka jalan bagi demokrasi, partisipasi warga, kebebasan sipil, dan penegakan hak-hak asasi manusia. Reformasi merupakan buah dari keberanian bangsa untuk melakukan koreksi terhadap berbagai bentuk ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan.

8. Bangsa Indonesia adalah rahmat sejarah yang dipercayakan oleh Allah kepada seluruh warganya. Kita bersyukur atas adanya masyarakat yang masih merawat budaya luhur bangsa: gotong royong, kesediaan saling menolong, kesabaran dalam berdialog di tengah perbedaan, serta ketahanan keluarga dan komunitas lokal beserta kearifan budayanya. Dalam banyak peristiwa, masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada sekat identitas. Kita bersyukur pula atas kelompok-kelompok yang memiliki kejernihan hati nurani dan sikap kritis terhadap situasi bangsa dan negara saat ini. Kaum muda adalah elemen bangsa yang tanggap dalam menyuarakan kondisi masyarakat.

Syukur atas Karya Allah dalam Gereja Katolik Indonesia

9. Kita bersyukur atas perjalanan sejarah Gereja Katolik Indonesia. Gereja Indonesia muncul dan berdinamika bersama seluruh bangsa dalam menghadapi suka dan duka, kegembiraan dan harapan dalam mengarungi peziarahan di dunia. Sebagai umat beriman, Gereja Katolik Indonesia menjadi pelaku sejarah: menampilkan karya keselamatan di tengah-tengah bangsa dan negara. Gereja Indonesia adalah bahtera pengharapan yang berlayar di samudera sejarah menuju Kerajaan Allah.¹ Pada tahun 2034, Gereja Indonesia akan merayakan 500 tahun kelahirannya di Bumi Nusantara.²
10. Sejarah misi Indonesia bergerak dari Gereja yang menerima pewartaan menjadi Gereja yang diutus untukewartakan. Dari tanah yang menjadi ladang misi, kini Indonesia dipanggil menjadi Gereja misioner yang turut ambil bagian dalam keputusan universal Gereja melalui misionaris dan pimpinan Gereja yang berkarya di berbagai belahan dunia: berbagi karunia iman dan menjadi tanda harapan.
11. Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), Gereja Katolik di Indonesia mengalami masa kegelapan yang berat. Banyak uskup, imam, dan religius (frater, suster, bruder) ditangkap serta ditahan di kamp-kamp interniran Jepang sehingga Gereja kehilangan sebagian besar gembalanya. Namun, dalam situasi tanpa pendampingan langsung para pelayan Gereja, iman umat tidak padam. Dengan kekuatan Roh Kudus yang mereka terima dalam baptisan, mereka tetap berkumpul, merawat

¹ SAGKI 2025, 9.

² Kehadiran Gereja Katolik di Indonesia berakar dari karya misi Portugis dan Spanyol di Maluku pada abad ke-16. Pada tahun 1534, baptisan pertama tercatat terjadi di Ternate, Maluku Utara, ketika beberapa masyarakat Desa Mamuia, Halmahera, dibimbing masuk ke dalam iman Katolik melalui pembaptisan oleh Gonzalo Veloso, seorang pedagang Portugis. Peristiwa ini dikenang sebagai awal lahirnya Gereja Katolik Indonesia. Perkembangan misi semakin kuat dengan kedatangan St. Fransiskus Xaverius di Maluku pada tahun 1546. Melalui pewartaannya, iman Katolik berkembang pesat, khususnya di Ambon, Kepulauan Lease, dan Maluku Utara, hingga sekitar tahun 1558, menandai pertumbuhan awal komunitas Gereja Katolik yang hidup di Nusantara.

kehidupan iman, mempertahankan doa, serta mengambil tanggung jawab untuk menjaga dan meneruskan karya Gereja. Masa ini menjadi kesaksian bahwa Gereja bukan hanya berdiri karena struktur atau kehadiran para pemimpin, tetapi terutama karena karya Roh Kudus yang bekerja dalam hati umat beriman.

12. Pengalaman sejarah ini menjadi sumber inspirasi bagi Gereja Indonesia. Dari masa kehilangan gembala, lahir keteguhan iman umat; dari luka sejarah, lahir daya tahan misioner Gereja. Ketika menghadapi kegelapan dan ketidakpastian zaman, umat beriman yang dibaptis memiliki daya misioner untuk menjaga, meneruskan, dan menghadirkan Gereja. Perjalanan iman tersebut mengajarkan bahwa harapan tidak boleh hanya digantungkan pada kekuatan institusi, tetapi pada iman umat yang berjalan bersama dalam Roh Kudus. Gereja yang hidup adalah Gereja yang membawa terang bagi setiap anggotanya untuk mengambil bagian dalam perutusan Kristus.
13. Kita bersyukur karena di banyak keuskupan telah dikembangkan Komunitas Basis Gerejani (KBG) sebagai wujud dan cara menjadi Gereja untuk menanggapi situasi masyarakat yang kontekstual. Struktur-struktur di paroki juga melibatkan kaum awam dan perempuan.
14. Gereja Indonesia memiliki tiga medan karya misi yang amat penting: pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Ketiganya dapat disebut *trisula* karya misi karena menyentuh martabat manusia sejak dini, saat sakit, saat miskin, dan saat tersingkir. Gereja hadir ketika umat (masyarakat) membutuhkan pendampingan.
15. Sejarah Gereja Indonesia memperlihatkan bahwa Injil bertumbuh bukan hanya melalui lembaga besar, tetapi juga melalui kesetiaan kecil yang terus-menerus. Injil mewujud dalam keluarga yang mendoakan anak-anaknya, guru yang mengajar di daerah terpencil, tenaga kesehatan yang melayani tanpa pamrih, imam dan religius yang tinggal bersama umat, katekis yang berdedikasi tinggi, serta awam yang tampil sebagai garam dan terang di tengah masyarakat.
16. Di banyak wilayah, Gereja hadir sebagai sahabat masyarakat melalui sekolah, asrama, klinik, rumah sakit, panti, koperasi, *Credit Union*, kelompok tani, pendampingan buruh migran dan pengungsi, pendampingan perempuan dan anak, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan sosial bagi masyarakat luas tanpa membedakan agama dan golongan. Gereja juga terlibat dalam advokasi kebijakan publik terkait kelestarian ekologi, perlindungan masyarakat adat, penanganan perdagangan manusia, serta resolusi konflik dan promosi perdamaian. Karya-karya ini patut disyukuri karena menjadi tanda konkret bahwa

iman Katolik tidak berhenti di ruang ibadat, melainkan mengalir ke tengah kehidupan.

17. Kita bersyukur atas perkembangan Gereja Katolik Indonesia baik dari sisi tenaga pastoral maupun tata kelola gerejani. Dari sisi tenaga pastoral, banyak imam, biarawan-biarawati, dan awam Indonesia kini melayani tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara. Sementara itu, tata kelola gerejani perlu diarahkan demi kesejahteraan anggota Gereja maupun masyarakat setempat. Semangat tata kelola gerejani harus dijaga agar tidak melupakan orang miskin dan para korban atau berubah menjadi mental bisnis, agar Gereja tetap memiliki keberanian profetis.
18. Gereja Indonesia aktif dalam dialog karya dengan komunitas lintas iman, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pemerintah untuk merespons isu-isu sosial kemasyarakatan, seperti isu ekologi, advokasi kebijakan publik, migran-perantau, isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), isu perempuan, isu masyarakat adat, serta isu kebebasan beragama dan berkeyakinan.
19. Kita bersyukur atas perkembangan teologi kontekstual di banyak tempat di Indonesia. Teologi yang lahir dari pergulatan masyarakat majemuk, kemiskinan, adat, ekologi, kebudayaan, serta dialog antariman dan dialog karya memperkaya Gereja universal. Dalam konteks Asia, Gereja Indonesia dipanggil untuk menjadi Gereja yang berdialog melampaui dialog tiga dimensi.³
20. Namun, rasa syukur tidak boleh menutup mata kita. Secara internal, Gereja menghadapi tantangan berupa lemahnya katekese, keterbatasan sumber daya manusia pastoral, ketimpangan kapasitas antarwilayah, serta ketergantungan ekonomi. Karena itu, Gereja perlu terus memperbarui tata kelola pengembalaan, ekonomi, dan administrasi agar pastoral semakin partisipatif, kontekstual, dan selaras dengan zaman. Secara eksternal, bangsa Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Kita masih menghadapi kemiskinan, ketimpangan sosial dan gender, korupsi, bencana ekologi, konflik sosial, pelanggaran hak asasi manusia, serta penurunan kualitas demokrasi. Kita juga

³ Federation of Asian Bishops' Conference (FABC) mengatakan: "Kita dipanggil untuk memperluas pemahaman kita tentang dialog yang melampaui dialog tiga dimensi dalam konteks agama-agama, budaya-budaya, dan kaum miskin. Dialog ini mencakup dialog dengan kaum muda, kaum perempuan, pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat sipil, ciptaan, para teknokrat, para pengusaha dan ilmuwan, mereka yang kelaparan, para tunawisma, kelompok buta aksara, para migran dan pengungsi, masyarakat adat, para korban perdagangan manusia, para penyandang difabel, orang-orang yang tidak memiliki dokumentasi hukum dan para pemberontak, serta mereka yang bergulat dengan berbagai macam kecanduan dan mengalami berbagai macam persoalan kesehatan mental" (FABC 50 Bangkok Document, 112).

masih menyaksikan pengabaian dan perampasan hak terhadap kelompok rentan. Karena itu, ungkapan syukur yang sejati menuntut kejujuran. Kita harus berani melihat kenyataan. Kita juga harus berani memperbaikinya.

III. MEREFLEKSIKAN KRISIS MULTIDIMENSI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA

A. Gambaran Umum

21. Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang kaya akan keberagaman dan potensi sumber daya. Namun, kita melihat bahwa Indonesia kini dihadapkan pada ancaman gelombang krisis multidimensi. Situasi yang mengancam fondasi kehidupan bersama. Indonesia seolah menderita luka multidimensional yang parah. Krisis ini merambah sendi kehidupan mulai dari masalah sosial, teknologi, ekonomi, ekologi, politik, hingga krisis nilai-nilai luhur. Krisis juga terungkap dalam rapuhnya etika publik, disrupsi digital bagi generasi muda, hingga krisis nurani. Krisis juga terungkap dalam rapuhnya fondasi kepemimpinan, termasuk ketidakadilan *gender* dan dominasi kepemimpinan maskulin dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Krisis juga nampak dalam program-program yang meminggirkan kelompok lemah dan marjinal, seperti perempuan, kelompok difabel, anak, dan masyarakat adat. Fenomena yang ada ditakutkan bukan sekadar riak permukaan saja, melainkan arus bawah yang bergerak, menggerus kohesi sosial, memperlebar jurang ketimpangan, serta mereduksi martabat kemanusiaan dan menghancurkan keutuhan alam ciptaan.
22. Dalam membaca tanda-tanda zaman hari ini, kita memerlukan kejernihan nurani yang kian langka. Bangsa Indonesia tengah mengalami defisit moral publik yang serius. Etika sering kali dikorbankan demi nafsu kekuasaan sesaat. Kumpulan gejala tersebut berhulu pada krisis kepemimpinan yang berimbas langsung pada kualitas demokrasi yang kian surut serta kebijakan publik yang salah arah. Kebijakan publik tidak berpihak kepada rakyat (*bonum commune*), tapi hanya mengabdikan kepentingan elite. Inilah kondisinya: ketika politik hanya dimaknai sebagai prosedur dan angka-angka tanpa landasan moral, kebijakan publik yang lahir cenderung berjarak dari kebutuhan dan keseharian rakyat.
23. Bangsa Indonesia juga tengah menghadapi retaknya solidaritas di tengah krisis multidimensi, ditambah kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah sering kali memperlebar jurang ketimpangan, yang pada akhirnya mengancam kohesi sosial. Kita menghadapi krisis kesatuan bangsa yang bukan sekadar isu primordial, melainkan manifestasi

ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, terutama oleh rakyat miskin dan yang terpinggirkan.

24. Kondisi diperparah oleh krisis ekologi dan agraria yang semakin memprihatinkan. Eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan kelestarian dan meminggirkan hak-hak masyarakat adat bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga telah merampas martabat manusia yang hidup selaras dengan tanah. Di sini, krisis ekologi sejatinya merupakan krisis kemanusiaan yang nyata.
25. Sementara itu, generasi muda menghadapi tantangan digital dan krisis identitas bangsa. Kita menghadapi risiko menjadi bangsa yang asing di tanah sendiri jika gagal merawat akar tradisi di tengah pusaran konektivitas digital. Jika kondisi krisis mental pada generasi muda terus memburuk, bonus demografi berpotensi berubah menjadi beban demografi yang berat. Kebudayaan, religiositas, dan identitas bangsa seolah kehilangan jangkar. Kondisi ini memberikan beban paling berat bagi generasi muda. Sebagai warga ekosistem digital, orang muda dituntut untuk menjadi “manusia baru” yang tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga tetap memiliki empati serta kedalaman hati dan budi. Generasi muda perlu mendapatkan pendampingan yang tepat agar mereka tidak menjadi generasi yang teralienasi dari realitas sosial, Gereja dan Bangsa, serta kemanusiaannya sendiri.
26. Oleh karena itu, kita bersama perlu mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan tantangan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dan dunia yang tampak sedang rapuh. Kerapuhan yang tidak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung dalam krisis sosial, moral, ekonomi, politik, teknologi, dan ekologis yang memengaruhi kehidupan manusia serta masa depan ciptaan.

B. Dimensi Sosial: Marginalisasi Nurani dan Retaknya Kohesi

27. Krisis sosial yang dihadapi bangsa Indonesia mewujud dalam berbagai bentuk, mulai dari kerentanan kelompok marginal—mereka yang terpinggirkan dan ditinggalkan akibat ketimpangan dan ketidakadilan—hingga tantangan degradasi kohesi sosial yang merenggangkan ikatan sosial dan melunturkan persaudaraan sejati. Kita dapat mengidentifikasi krisis sosial melalui berbagai masalah sosial yang krusial. Kita dapat menyebut beberapa hal, antara lain krisis generasi muda, ketidakadilan gender, marginalisasi kelompok rentan yang mencakup lansia, penyandang difabel, anak-anak, dan masyarakat adat, hingga gugatan atas terjadinya krisis kemanusiaan yang berkepanjangan, khususnya di Tanah Papua.

28. Generasi muda saat ini mengalami keterasingan digital dan terancam kehilangan arah. Mereka seharusnya menjadi tulang punggung masa depan bangsa. Namun, banyak dari mereka kini terjebak dalam krisis yang kompleks. Mereka menghadapi krisis iman, kesepian, penyalahgunaan narkoba, kekerasan, serta tekanan dan keterasingan di dunia digital.⁴ Gejala-gejala tersebut bukan sekadar masalah individual. Ia mencerminkan rapuhnya fondasi sosial yang belum mampu melindungi mereka dari disrupsi teknologi. Dalam kehidupan demokrasi, ruang ekspresi orang muda juga semakin menyempit. Data Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi (GMLK, 2026) mencatat 703 orang tahanan politik yang masih menjalani proses hukum; 506 orang diputus bersalah, dan status pemidanaan 31 orang belum dapat dikonfirmasi.
29. Data riset kesehatan mental remaja di Indonesia menunjukkan situasi yang serius. Masalah kesehatan mental remaja telah mendekati tingkat epidemi. Survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) pada 2022 mencatat angka yang mengkhawatirkan. Sebanyak 34,8 persen remaja mengalami masalah kesehatan mental. Artinya, sekitar satu dari tiga remaja sedang menghadapi persoalan ini.⁵ Angka yang sangat mencolok. Indonesia akan segera memasuki bonus demografi pada 2030. Pada masa itu, jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Data RSPG 2025 menunjukkan adanya tanda bahaya lainnya. Sebanyak 9,8 persen remaja di Indonesia pernah berpikir untuk bunuh diri.⁶ Angka yang menjadi alarm keras. Ia menunjukkan tekanan, kesepian, dan keputusasaan yang dialami oleh generasi muda.⁷ Survei Kesehatan Indonesia (2023) juga memperlihatkan situasi yang serius. Kelompok usia 15–24 tahun memiliki prevalensi depresi tertinggi, yaitu 2 persen. Angkanya lebih tinggi pada perempuan (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Rendahnya pencarian pengobatan juga menjadi

⁴ SAGKI 2025, 18.

⁵ UNAIR. (2025, Oktober 15). *Riset Kesehatan Mental Remaja Indonesia Terus Meningkat*. Diakses dari <https://unair.ac.id/riset-kesehatan-mental-remaja-indonesia-terus-meningkat/>; UGM. (2022, Oktober 24). *Hasil Survei I-NAMHS: Satu dari Tiga Remaja di Indonesia Memiliki Masalah Kesehatan Mental*. Diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/23086-hasil-survei-i-namhs-satu-dari-tiga-remaja-indonesia-memiliki-masalah-kesehatan-mental/>

⁶ RSPG. (2025, Juni 18). *Kesehatan Mental di Indonesia: Tantangan, Dampak, dan Solusi Mendesak*. Diakses dari <https://rspp.co.id/artikel-detail-817-Kesehatan-Mental-di-Indonesia-Tantangan,-Dampak,-dan-Solusi-Mendesak.html>

⁷ Negara mengantarkan internet, tapi tidak mengantarkan pertolongan. Data menunjukkan kesenjangan kuantitatif antara dua jenis infrastruktur yang dibangun negara, dengan interpretasi kualitatif tentang implikasinya terhadap prioritas kebijakan. Di mana 1 dari 3 remaja (34,9% = 15,5 juta) memiliki masalah kesehatan mental (I-NAMHS 2022). Tapi hanya 2,6% yang mengakses layanan; artinya, dari 13 remaja yang bermasalah, hanya 1 yang mendapat pertolongan. Di saat yang sama, penetrasi internet Gen Z: 87%; screen time: 7 jam 38 menit per hari. Negara berhasil membangun konektivitas digital yang menjangkau hampir setiap saku remaja. Tapi infrastruktur kepeduliannya hampir tidak ada. Ini cerminan prioritas yang terbalik.

persoalan. Hanya 10,4 persen yang mencari bantuan, menunjukkan masih adanya hambatan akses, stigma, dan rendahnya kesadaran akan layanan kesehatan mental.

30. Generasi muda juga mengalami tekanan akademik, masalah keluarga, dan kurangnya dukungan sosial yang menjadi faktor pemicunya. Struktur sosial yang ada cenderung lambat beradaptasi terhadap perubahan digital dan minimnya dukungan yang terintegrasi. Sekolah, keluarga, dan komunitas sering kali gagap dan gagal menyediakan ruang aman serta pendampingan, sehingga gagal menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan mental dan spiritual generasi penerus, dan tercipta celah yang memungkinkan krisis tumbuh subur.
31. Kita juga menghadapi ketidakadilan gender dan marginalisasi terhadap kelompok rentan. Pembungkaman suara perempuan menandai situasi ini. Di tengah hiruk-pikuk kemajuan digital, masyarakat Indonesia masih bergulat dengan bayang-bayang pola pikir dan struktur patriarki yang kuat. Pola ini secara sistematis membatasi peran perempuan di berbagai lini kehidupan, terutama dalam pengambilan keputusan strategis.⁸ Realitas di lapangan menunjukkan bahwa perjuangan untuk mencapai kesetaraan substantif masih panjang dan berliku. Perempuan sering kali dihadapkan pada diskriminasi struktural, mulai dari ranah domestik hingga publik, yang sepenuhnya menghambat potensi dan kontribusi mereka.
32. Selain ketidakadilan gender, marginalisasi juga menimpa kelompok rentan lainnya. Mereka adalah lansia (lanjut usia), penyandang disabilitas, dan anak-anak. Para lansia kerap mengalami pengabaian. Dalam gejala yang disebut “budaya membuang”, nilai dan peran lansia semakin dipinggirkan seiring bertambahnya usia.⁹ Di sisi lain, penyandang difabel masih menghadapi penerimaan yang belum sepenuhnya memadai. Aksesibilitas belum tersedia secara merata. Inklusivitas juga belum terwujud sepenuhnya. Yang lebih memilukan adalah nasib anak-anak. Mereka adalah tunas bangsa, namun banyak yang menjadi korban eksploitasi, prostitusi, perkawinan anak, dan kekerasan daring yang semakin canggih serta semakin sulit untuk terdeteksi.¹⁰
33. Data yang diberikan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) menunjukkan adanya peningkatan

⁸ SAGKI 2025, 21, 22.

⁹ SAGKI 2025, 24.

¹⁰ SAGKI 2025, 32.

kasus kekerasan tersebut.¹¹ Data tahun 2025 mencatat angka yang mengejutkan: sebanyak 35.025 perempuan dan anak menjadi korban kekerasan, yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.¹² Angka tentu bukan sekadar statistik, namun mencerminkan penderitaan ribuan jiwa perempuan dan anak-anak. Hak-hak dasar mereka yang terenggut, menunjukkan bahwa struktur patriarki masih kuat. “Budaya membuang” juga masih kuat mengakar dalam masyarakat kita. Secara sadar atau tidak, budaya tersebut mengabaikan hak-hak kelompok rentan. Di tengah kegelapan marginalisasi ini, kita perlu mendukung gerakan-gerakan sosial yang lahir dari perempuan dan kelompok rentan lainnya, yang diharapkan membuka jalan bagi perubahan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

34. Dalam Gereja Katolik, upaya membangun “jaring pengaman” bagi perempuan, anak, dan penyandang difabel tidak mudah. Kasus kekerasan seksual salah satunya. Banyak korban perempuan masih terabaikan. Mereka belum memperoleh akses yang memadai terhadap keadilan dan pemulihan. Dalam sejumlah kasus, perhatian Gereja lebih banyak tertuju pada penanganan pelaku daripada pemulihan korban. Dari 38 keuskupan, belum semuanya memiliki protokol perlindungan anak dan orang dewasa rentan terhadap kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa isu kekerasan seksual belum selalu dipandang sebagai persoalan yang mendesak. Bahkan, pengungkapannya sering dianggap dapat merusak nama baik Gereja. Padahal, pada 2024, Dikasteri untuk Ajaran Iman menerbitkan dokumen *Dignitas Infinita*¹³ (**Martabat manusia yang tak terbatas**), yang menegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran berat terhadap martabat manusia. Dengan demikian, Gereja memiliki dasar moral dan pastoral untuk membuka akses terhadap keadilan, perlindungan, dan pemulihan bagi para korban.

¹¹ Kekerasan yang hampir seluruhnya tak dilaporkan. Data menunjukkan kesenjangan kuantitatif antara data laporan (SIMFONI) dan data prevalensi survei (SPHPN/SNPHAR), yang secara kualitatif mengindikasikan fenomena *under-reporting* sistemik, bukan hanya perbedaan metodologi. SIMFONI 2024: 19.628 kasus kekerasan anak, naik 21,9% dari 16.106 kasus pada 2022. Kenaikan ini kemungkinan besar bukan karena kekerasan makin banyak, melainkan karena meningkatnya keberanian untuk melapor. Yang lebih mengkhawatirkan: SNPHAR 2024 menemukan 1 dari 2 anak pernah mengalami kekerasan; SPHPN 2024 menemukan 1 dari 4 perempuan pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual. Yang dilaporkan hanya sebagian kecil dari apa yang terjadi. Sisanya diam karena malu, takut, atau tidak tahu harus melapor ke mana.

¹² KemenPPPA. (2026, Januari 19). *Kemen PPPA Luncurkan SIMFONI PPA Versi 3.0 Manajemen Kasus untuk Perkuat Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak*. Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemen-pppa-luncurkan-simfoni-ppa-versi-30-manajemen-kasus-untuk-perkuat-layanan-perlindungan-perempuan-dan-anak>; Infopublik. (2026, Januari 19). *Simfoni PPA Versi 3 Perkuat Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak*. Diakses dari <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/955382/simfoni-ppa-versi-3-perkuat-penanganan-kekerasan-perempuan-dan-anak>

¹³ Dikasteri untuk Ajaran Iman, *Dignitas Infinita* (selanjutnya: DI) 43.

35. Dalam Gereja Katolik sendiri, terjadi krisis layanan publik dari institusi Katolik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini disebabkan oleh kuatnya elitisme dan tekanan persaingan usaha. Salah satu contohnya berkaitan dengan gejala komersialisasi yang menguat dalam pendidikan Katolik. Padahal, pendidikan Katolik diharapkan menjadi garda terdepan dalam mencetak generasi muda yang memiliki karakter dan integritas.
36. Data Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia (PERDHAKI, 2026) menunjukkan besarnya karya pelayanan kesehatan Gereja melalui kehadiran 94 rumah sakit dan 218 klinik kesehatan Katolik. Namun, Dokumen SAGKI 2025 menegaskan bahwa karya kesehatan sedang menghadapi tantangan serius. Layanan kesehatan Katolik kini berhadapan dengan perubahan kebijakan pemerintah dan sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terus berubah. Situasi ini menyulitkan pengelolaan rumah sakit dan klinik. Tantangan lain juga tidak ringan. Ketersediaan tenaga kesehatan, terutama dokter di daerah, masih sangat terbatas. Rumah sakit Katolik juga menghadapi tekanan dari rumah sakit pemerintah dan swasta yang berorientasi pada bisnis. Akibatnya, daya saing layanan kesehatan Katolik semakin melemah. Dalam sepuluh tahun terakhir, lebih dari seratus klinik Katolik terpaksa tutup. Beberapa rumah sakit juga dijual atau dialihkan pengelolaannya. Dalam proses itu, sebagian kehilangan identitas Katolik mereka. Banyak klinik dan rumah sakit masih berjuang untuk bertahan. Mereka menghadapi keterbatasan dana, tenaga, dan dukungan institusional. Semua menunjukkan kebutuhan yang mendesak. Misi pelayanan kesehatan Katolik di Indonesia perlu diperbarui, diperkuat, dan diteguhkan kembali.¹⁴
37. Sedangkan data pendidikan Katolik menurut Komisi Pendidikan KWI (2026) menegaskan pelayanan pendidikan melalui kehadiran 278 yayasan pendidikan Katolik, 5.432 sekolah Katolik, 900.901 peserta didik, 65.408 guru dan tenaga kependidikan, 33 perguruan tinggi anggota Perkumpulan Pimpinan Akademika Vokasi Indonesia (PPAVI), serta 25 yayasan pendidikan tinggi Katolik (anggota APTIK). Dari seluruh data yang tersedia (Dokpen KWI, 2025), ¹⁵beberapa temuan utama yang penting untuk menjadi perhatian di tingkat keuskupan, termasuk komisi pendidikan keuskupan: (a) Keberagaman siswa adalah realitas, bukan pengecualian. Dengan hanya 39 persen siswa beragama Katolik, sekolah-sekolah Katolik sejatinya adalah lembaga pendidikan multi-

¹⁴ SAGKI 2025, 37.

¹⁵ Data diperoleh dari 14 Keuskupan yang tersebar di 6 Regio Gerejawi di Indonesia, dan diolah oleh Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat (PKPM) Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.

religius; (b) Lebih dari 95 persen guru berstatus awam, identitas dan semangat Katolik sekolah kini bergantung pada pembinaan guru awam, bukan pada kehadiran para religius; (c) Sekitar 54,6 persen guru belum bersertifikat, yang berdampak langsung pada kesejahteraan guru dan kualitas pengajaran; (d) Kualitas akreditasi tidak merata, sekitar 61 persen sekolah berakreditasi A dan 8 persen sekolah yang masih berakreditasi C atau belum terakreditasi, terutama di wilayah timur Indonesia; (e) Regenerasi guru menjadi kebutuhan, karena kurang lebih 10 persen guru akan pensiun dalam waktu dekat, sementara kelompok guru muda (di bawah 26 tahun) belum cukup besar untuk mengisi kekosongan.

38. Kita juga mengalami gejala penutupan banyak sekolah Katolik, terutama terjadi di daerah pedesaan. Penyebabnya antara lain menurunnya jumlah anak dari keluarga-keluarga muda, berkurangnya jumlah keluarga non-Katolik yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Katolik, karena membutuhkan pendidikan agama yang sesuai dengan iman yang mereka anut, dan keberpihakan sosial. Banyak sekolah Katolik melayani masyarakat miskin. Namun, mereka belum sepenuhnya mendapatkan dukungan solidaritas struktural yang memadai dari Gereja.¹⁶
39. Pada kenyataannya, sejumlah klinik, rumah sakit, serta sekolah Katolik telah ditutup. Penutupan terjadi karena tekanan regulasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat juga dalam kebijakan kesehatan dan pendidikan nasional. Lembaga swasta, termasuk yang berafiliasi keagamaan, harus beradaptasi dengan aturan yang semakin ketat dan pasar yang semakin kompetitif. Hal ini menjadi tantangan serius bagi Gereja. Gereja dipanggil untuk tetap relevan. Gereja juga perlu terus menjadi “rumah bersama” yang menyediakan layanan publik secara inklusif. Di tengah arus komersialisasi, misi Gereja tidak boleh melemah. Pelayanan pendidikan dan kesehatan harus tetap berpihak pada kaum miskin. Dengan cara itu, Gereja ikut mewujudkan kebaikan bersama dan kesejahteraan umum.
40. Pelayanan sosial Gereja dilakukan dalam bentuk pelayanan karitatif dan pemberdayaan. Pelayanan karitatif seperti respons dan tanggap bencana, serta pelayanan kebutuhan dasar. Sementara itu, pelayanan pemberdayaan diwujudkan melalui kegiatan Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) dan Caritas di setiap keuskupan serta Aksi Puasa

¹⁶“Dukungan solidaritas struktural” sebenarnya sudah ada di banyak keuskupan, yang disampaikan melalui beberapa saluran, antara lain “Surat Gembala” Uskup setempat, pengumpulan kolekte khusus mingguan, serta seruan-seruan pengumpulan dana solidaritas lainnya. Upaya yang masih perlu ditingkatkan ini tentu menjadi bagian penting dari perhatian Gereja terhadap keberlanjutan pelayanan pendidikan yang berkualitas.

Pembangunan (APP) sebagai wujud pertobatan pada setiap masa Pra-Paskah. APP merupakan gerakan berkelanjutan Gereja Indonesia dalam mendukung aksi pastoral nyata bagi umat. Pelayanan sosial lainnya juga banyak dilakukan oleh tarekat religius dan kaum awam.

41. Gereja Katolik juga tidak bisa menutup mata terhadap krisis kemanusiaan di berbagai daerah, terutama di Tanah Papua, yang berdampak pada luka batin lintas generasi yang berkepanjangan. Kita merasakan kondisi mereka semakin menyedihkan. Krisis di Tanah Papua adalah salah satu noda hitam paling pekat dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Luka krisis terus menganga lebar dan menimbulkan trauma mendalam lintas generasi. Masyarakat di Tanah Papua mengalami pengabaian kronis. Mereka sekian lama hidup di bawah bayang-bayang kekerasan aparat. Hak-hak dasar mereka juga diabaikan. Mereka menghadapi perampasan sistematis terhadap martabat kemanusiaan dan keadilan.¹⁷ Krisis Tanah Papua merupakan tragedi kemanusiaan yang kompleks dan melampaui batas, bukan hanya insiden sporadis, melainkan krisis yang berakar pada sejarah panjang ketidakadilan. Eksploitasi sumber daya dan marginalisasi identitas menjadi dua titik perusakan Tanah Papua. Untuk memahami kedalaman krisis Tanah Papua, kita memerlukan refleksi serta investigasi yang mendalam dan komprehensif. Ruang dialog yang konstruktif menjadi salah satu opsi strategis.
42. Krisis kemanusiaan di Tanah Papua harus segera diakhiri dengan solusi yang paripurna demi mewujudkan Tanah Papua yang damai dan sejahtera. Tidak dapat disangkal bahwa masyarakat Tanah Papua mengalami tekanan sistematis, pengaburan sejarah orang Papua, pengabaian hak-hak dasar masyarakat, serta tindakan kekerasan yang telah menciptakan struktur sosial yang timpang, dominasi yang represif, dan dampak lain seperti pengungsian, kemiskinan, serta rendahnya kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Kebijakan-kebijakan pemerintah diambil dengan pola yang cenderung sentralistik dan eksploitatif, sehingga mengabaikan kearifan lokal serta kebutuhan masyarakat adat. Orang asli Papua berusaha gigih untuk terus berjuang agar ikut dilibatkan dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka, seperti keadilan agraria, hutan adat, sumber daya alam, dan ruang hidup. Ironisnya, negara sering kali menggunakan pendekatan keamanan dan kekuasaan yang eksploitatif dan represif.
43. Krisis di Tanah Papua tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural dan horizontal. Kita juga perlu menepoh ketimpangan gender yang besar di ruang keluarga di Papua. Banyak laporan dari masyarakat

¹⁷ SAGKI 2025, 48.

sipil dan lembaga negara, seperti Komnas Perempuan, menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan Papua merupakan persoalan serius, yang mencakup kekerasan fisik, seksual, dan struktural. Konflik berkepanjangan dan pendekatan keamanan (*security approach*) menyebabkan perempuan berada dalam posisi yang sangat rentan dan menghadapi berbagai bentuk intimidasi, eksploitasi, kekerasan domestik, dan kriminalisasi. Gereja hadir di Tanah Papua tidak hanya untuk berbicara tentang perdamaian, tetapi berjalan bersama mereka yang terluka, memulihkan martabat yang direndahkan, dan menyalakan harapan bahwa luka sejarah dapat disembuhkan melalui kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi dalam Kristus.

44. Krisis kemanusiaan di Tanah Papua memerlukan penyelesaian yang serius dan permanen, didasarkan pada penghormatan terhadap akar sejarah Papua, nilai-nilai dan tradisi lokal, dan posisi orang Papua dengan segala kekayaannya dalam lanskap besar Indonesia. Kita perlu membangun pendekatan holistik yang mencakup penguatan posisi orang asli Papua, pembangunan berbasis hak, penghormatan terhadap daya dukung lingkungan, serta dialog kemanusiaan yang tulus dan setara. Institusi Gereja, dengan peran moralnya, harus memastikan diri tetap relevan dan menjadi rumah bagi semua. Alienasi terhadap kelompok rentan di Tanah Papua harus dicegah. Sementara itu, urgensi advokasi kebijakan publik yang berpihak pada keadilan ekologis dan sosial serta pengakuan penuh atas hak-hak masyarakat adat Papua merupakan kebutuhan mendesak lainnya. Kita membutuhkan investigasi sinodal, yang membingkai pencarian data dan informasi lengkap, transparan dan akuntabel, sehingga prosesnya menghasilkan solusi bersama. Kesungguhan untuk menyentuh akar masalah yang di Tanah Papua. Selanjutnya, Gereja, dalam peta jalan transformasi struktural untuk Tanah Papua, memiliki peran penting untuk mengawal kebijakan negara. Terutama aspek inklusivitas kebijakan yang mengakui kekhususan Papua. Gereja dapat mereformasi kurikulum katekese agar relevan dengan konteks lokal. Gereja juga dapat menggagas perubahan kebijakan internal yang bersifat patriarkal. Agar tidak menjadi bara dalam sekam kebangsaan, kita mengharapkan transformasi kebijakan yang solutif untuk menyembuhkan luka batin di Tanah Papua.

Dimensi Teknologi: Pedang Bermata Dua di Era Digital

45. Teknologi berkembang dengan pesat. Disrupsi digital dan kemunculan kecerdasan buatan/akal imitasi (*Artificial Intelligence/AI*) telah mengubah lanskap kehidupan manusia secara fundamental. Namun, teknologi hadir sebagai kekuatan yang bermata dua. Dalam konteks krisis multidimensi bangsa yang menjadi keprihatinan kita bersama, teknologi hadir dengan janji sekaligus ancaman. Di satu sisi, teknologi

adalah mesin yang mendorong kemajuan peradaban. Ia menawarkan peluang tak terbatas untuk kemajuan dan konektivitas. Namin, pada sisi lain, ia menciptakan batasan-batasan baru yang tidak kasatmata. Teknologi juga mengancam relevansi institusi tradisional termasuk negara dan Gereja. Teknologi dapat menjadi wadah bagi masalah serius seperti kejahatan siber.¹⁸

46. Teknologi menciptakan peluang tak terbatas untuk kemajuan dan konektivitas. Teknologi telah memudahkan akses terhadap informasi. Ia juga memangkas jarak geografis secara drastis. Internet membawa demokratisasi pengetahuan. Para siswa di pelosok desa kini memiliki akses ke materi pembelajaran yang sama dengan mereka yang ada di kota besar. Dalam dunia industri, teknologi meningkatkan efisiensi dan otomatisasi. Teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI, *akal imitasi*) dan robotika telah memicu produktivitas ekonomi secara masif serta meminimalkan keterlibatan manusia. Internet di ruang digital telah menciptakan konektivitas tanpa batas.¹⁹ Platform komunikasi memungkinkan kolaborasi global terjalin secara *real-time*. Tim kerja perusahaan yang tersebar di lima benua berbeda dapat bekerja dalam satu proyek seolah-olah mereka berada di ruangan yang sama. Namun, apa pun itu, teknologi hanyalah alat. Kemajuan yang ditawarkannya hanya akan bermakna jika kita mampu menavigasi batasan-batasannya dengan kebijakan dan kesadaran akan nilai-nilai serta martabat kemanusiaan.
47. Disrupsi digital dan implikasi Akal Imitasi (AI) menimbulkan tegangan baru antara esensi (martabat) kemanusiaan dan kemampuan untuk beradaptasi. Disrupsi digital telah menciptakan realitas baru. Informasi bergerak tanpa batas. Interaksi sosial beralih ke ranah virtual. Dalam konteks ini, institusi sosial kemasyarakatan, termasuk Gereja, dihadapkan pada tantangan besar. Mereka harus hadir secara bermakna di ruang digital tanpa kehilangan esensi kemanusiaan yang menjadi inti ajaran.²⁰ Gereja Umat Allah menghadapi tantangan. Gereja niscaya menjaga otentisitas iman dan komunitas di tengah deras arus informasi yang serba cepat namun sering kali dangkal. Gereja

¹⁸ SAGKI 2025, 34.

¹⁹ Makin terhubung, tetapi tidak makin bersatu. Data menunjukkan korelasi temporal negatif antara penetrasi internet dan kualitas demokrasi. Mekanisme hubungannya adalah hipotesis kualitatif, bukan kausalitas yang terbukti, tetapi polanya konsisten selama satu dekade. Data: 221 juta pengguna internet (79,5% penduduk), screen time 7 jam 38 menit per hari, 3 jam 11 menit di medsos, jauh di atas rata-rata global (2 jam 23 menit). Di saat yang sama, Indeks Demokrasi terus turun selama satu dekade, terutama pada komponen budaya politik dan kebebasan sipil. Hipotesis yang layak direnungkan: platform digital lebih efektif dalam mengamplifikasi polarisasi daripada membangun kepercayaan sipil. Apakah kita sedang membangun konektivitas atau hanya menimbulkan kebisingan?

²⁰ SAGKI 2025, 12.

memerlukan adaptasi strategis. Sementara itu, kehadiran Akal Imitasi (AI) menuntut adaptasi yang lebih mendalam, terutama di dunia pendidikan. Penggunaan AI yang semakin meluas harus diarahkan agar tetap hanya untuk memuliakan martabat manusia.²¹ AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi. Namun, kecanggihannya juga membawa risiko dehumanisasi. Pengelolaannya membutuhkan etika yang kuat. Sebagai manusia yang berhati dan berbudi, kita perlu menggumuli bersama dalam terang iman tentang pertanyaan bagaimana AI akan membentuk masa depan pekerjaan, pendidikan, dan bahkan interaksi sosial.

48. Krisis teknologi menantang inti panggilan iman kita. Disrupsi digital dan dunia AI telah menciptakan struktur makna baru, yang sering kali mengabaikan esensi kemanusiaan. Algoritma yang mengontrol informasi, platform yang membentuk opini, dan sistem otomatisasi yang menggantikan peran manusia membentuk struktur baru yang memengaruhi cara kita memahami diri dan dunia. Masyarakat pengguna platform digital dan pengembang AI, dalam praktik teknologi, secara kolektif membentuk semacam “kemanusiaan baru”. Sebuah identitas artifisial yang semakin terhubung dengan dunia digital. Namun, sekaligus ia menyimpan potensi untuk mengasingkan kita dari nilai-nilai martabat kemanusiaan yang fundamental. Kita perlu merefleksikan kondisi paradoks ini. Manusia memang dengan mudah terhubung secara digital. Namun, mereka juga akan mengalami keterasingan secara eksistensial akibat teknologi.
49. Teknologi digital, yang menjadi kekuatan eksploitasi di ruang tanpa batas, juga memiliki sisi gelap yang mengancam manusia. Kejahatan siber (*cybercrime*) merupakan sisi lain dari dunia teknologi yang merisaukan kita. Eksploitasi anak, perempuan, dan kelompok rentan melalui platform digital telah meningkat secara eksponensial. *Modus operandi* para pelaku semakin canggih dan sulit dideteksi. Mereka memanfaatkan anonimitas dan jangkauan global internet untuk melancarkan aksinya.²² Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan di dunia maya. Mereka adalah pengguna gadget dan media sosial yang signifikan. Pengamatan terhadap data tren pengguna gadget dan media sosial menunjukkan situasi ini dalam beberapa tahun terakhir.²³ Peningkatan akses teknologi tanpa diimbangi dengan literasi digital kritis yang memadai dan pengawasan yang ketat berkorelasi langsung dengan

²¹ SAGKI 2025, 35.

²² SAGKI 2025, 32.

²³Data pengguna media sosial di Indonesia yang tersedia antara lain: *We Are Social/Hootsuite Digital 2025* mencatat 139 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia (49,9% populasi), dengan pengguna termuda (13-17 tahun) yang meningkat secara signifikan. KPAI juga merilis data terkait screen time anak.

potensi ancaman serius terhadap kejahatan siber. Anak-anak dan remaja kita menjadi target empuk bagi “predator daring” yang memanfaatkan celah keamanan digital serta keluguan para korban.

50. Dampak lain dari teknologi digital adalah membuat orang muda terperjara dalam realitas virtual sehingga mereka tidak lagi mampu memahami realitas sesungguhnya.²⁴ Kita menyaksikan lahirnya sebuah generasi yang hidup di dua dunia sekaligus—dunia nyata dan dunia digital—namun makin hari makin kehilangan pijakan di kedua dunia itu. Di dunia nyata mereka hadir secara fisik tetapi absen secara batin; di dunia digital mereka aktif secara konstan tetapi tidak bebas, karena di sana algoritma media sosial bekerja tanpa henti: merekam preferensi, mengeksploitasi kelemahan, memompa konten yang memicu kecemasan, kemarahan, dan hasrat konsumtif tanpa henti—semua itu bukan kebetulan, melainkan karena memang demikian rancangannya demi mengeruk keuntungan.²⁵ Ensiklik *Magnifica Humanitas* menegaskan bahwa ketika kekuasaan teknologi dijalankan tanpa transparansi dan akuntabilitas, ia menjadi instrumen dominasi yang merendahkan martabat manusia.²⁶ Buah pahit dari dominasi itu nyata di depan mata kita: orang muda tidak berkembang dalam empati, mengalami kemunduran tajam dalam kemampuan berpikir mendalam dan menganalisis, serta semakin kering dalam dimensi afektif dan kontemplatif.²⁷ Pada saat yang sama, ruang digital yang mereka huni telah menjadi medan kejahatan serius: *nonconsensual intimate image* (NCII)²⁸ menghancurkan kehormatan dan masa depan korban—mayoritas perempuan muda—sementara judi online (*judol*) yang dipromosikan secara masif oleh algoritma telah menjerat jutaan orang muda Indonesia dalam lingkaran kecanduan, utang, dan keputusasaan.²⁹ Semua ini adalah wajah konkret dari apa yang oleh Paus Leo XIV disebut sebagai “bentuk-bentuk perbudakan baru”: bukan perbudakan dengan rantai besi, melainkan perbudakan dengan rantai data, desain, dan keserakahan. Paus Leo XIV menyebutnya sebagai

²⁴ Paus Fransiskus, Ensiklik *Fratelli Tutti* (selanjutnya: FT), 33. Paus Leo XIV, Ensiklik *Magnifica Humanitas* (untuk selanjutnya: MH), 170 – 172.

²⁵ MH, 67, 71, 80.

²⁶ MH, 173–179.

²⁷ FABC 50 Bangkok Document, 51.

²⁸ *Non Non-consensual intimate image* (NCII) dapat digunakan untuk menggantikan *revenge porn* sekaligus mendorong keberpihakan pada korban karena NCII secara tegas menekankan pada soal ketidakpersetujuan. Istilah “revenge porn” menjadi polemik sebab diksi “revenge” seakan menandakan bahwa pelaku menyebarkan konten tersebut karena korban telah berbuat kesalahan sehingga pantas dipermalukan. Selain itu, korban potensial dapat dikriminalisasi karena posisinya akan berubah menjadi pelaku pornografi berdasarkan UU Pornografi.

²⁹ MH, 141.

“Sindrom Babel”.³⁰ Dalam situasi seperti ini, kita dipanggil untuk tetap bersikap manusiawi.³¹

51. Teknologi dan akses informasi juga berdampak bagi kelompok marjinal, seperti perempuan dan masyarakat adat, di banyak kepulauan maupun wilayah terpencil. Minimnya pengetahuan dan pemahaman terhadap teknologi, misalnya dalam bidang ekonomi, menyebabkan perempuan tidak dapat mengakses program-program penguatan ekonomi pada skala mikro. Mereka juga tidak dapat berkompetisi dalam proyek-proyek skala besar pemerintah karena kurangnya akses terhadap teknologi dan informasi. Selain itu, dalam konteks perbankan, data Global Findex terkini menunjukkan bahwa sebanyak 52,3 persen perempuan memiliki rekening bank, jumlah yang sedikit lebih besar dibandingkan laki-laki (51,2%). Namun, sepanjang 2017-2021, jumlah pemegang akun laki-laki tumbuh lebih cepat daripada jumlah pemegang akun perempuan. Jika data tersebut diterjemahkan ke populasi, ada sekitar 49 juta (47,7%) perempuan yang tidak memiliki rekening bank, sementara 9 juta (8,9%) perempuan memiliki rekening bank yang tidak aktif. Akses layanan digital bagi perempuan belum berkembang secara signifikan.³²
52. Teknologi memang memungkinkan komunikasi yang lebih luas dan memperkaya kehidupan manusia. Namun, hal itu dapat membatasi martabat manusia jika tidak didukung oleh regulasi dan kebijakan yang memadai. Kelemahan, bahkan ketiadaan legitimasi dalam bentuk hukum dan kebijakan, tidak dapat melindungi warga di ruang siber dari operasi tanpa hambatan para pelaku destruktif. Semua elemen perlu secara kritis melihat bahwa ini merupakan cerminan kegagalan kolektif bangsa dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan etis bagi semua pengguna, terutama anak-anak sebagai kelompok rentan. Karena itu, mitigasi krisis kejahatan siber memerlukan pendekatan lintas sektor. Semua pihak perlu menggalakkan gerakan literasi digital kritis sejak dini. Kita perlu membekali masyarakat dengan kemampuan untuk “memilih dan memilah” informasi serta mengenali ancaman. Gereja sebagai komunitas iman perlu terlibat dalam pengembangan etika AI sebagai upaya mencegah penyalahgunaan teknologi. Yang tidak kalah

³⁰Yang dimaksud dengan “Sindrom Babel” adalah penyembahan terhadap berhala keuntungan yang mengorbankan orang-orang lemah, [dan] sebuah penyeragaman yang mengaburkan perbedaan, serta pretensi yang menganggap sebuah bahasa—termasuk bahasa digital—dapat menerjemahkan segala sesuatu, termasuk misteri pribadi, ke dalam data dan penampilan (MH, 10).

³¹ “Tetap menjadi manusiawi”, maksudnya merawat dengan penuh kasih keagungan kemanusiaan yang dianugerahkan kepada kita dan diwahyukan dalam kepenuhan Yesus Kristus; sebuah keagungan yang tidak dapat digantikan oleh mesin. Kemajuan yang sejati selalu mengalir dari hati yang terbuka terhadap sesama, kecerdasan yang bersedia mendengarkan dan kehendak yang dapat menyatukan daripada yang memisahkan (MH, 15).

³² <https://www.konde.co/2022/07/problem-perempuan-umkm-masih-timpang-akses-layanan-digital-dan-ketrampilan/>

mendesak, para pemangku kepentingan perlu secara kuat mendorong negara untuk melakukan transformasi dalam bentuk regulasi perlindungan data dan martabat manusia di ruang siber yang efektif. Usaha ini harus melampaui sekat lintas batas negara karena kejahatan siber bersifat global. Negara perlu mendorong kerja sama internasional agar ruang digital tidak menjadi medan pertempuran yang merusak martabat manusia.

C. Dimensi Ekonomi: Ketimpangan di Balik Angka Pertumbuhan

53. Dalam dimensi ekonomi, Indonesia sedang menghadapi krisis yang kompleks. Ketimpangan struktural, rendahnya praktik etika bisnis, dan korupsi sistematis menandai krisis ini. Fenomena krisis ekonomi menciptakan paradoks yang mencolok.³³ Di satu sisi, kita menyaksikan variabel pertumbuhan ekonomi makro yang sering kali dibanggakan. Namun, di sisi lain, pertumbuhan justru disertai kerentanan akibat kemiskinan, melebarnya jurang sosial, dan korupsi sistemik yang menggerogoti fondasi negara.³⁴ Wajah ganda ekonomi ini, yang memisahkan narasi pertumbuhan dari realitas kemiskinan dan ketimpangan, perlu ditelisik lebih dalam untuk membongkar akar masalahnya.
54. Wajah ganda ekonomi Indonesia dihadapkan pada ketegangan antara pertumbuhan *dan* ketimpangan. Dalam beberapa dekade, Indonesia kerap membanggakan angka pertumbuhan ekonomi makro yang impresif. Angka-angka Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus meningkat sering kali ditampilkan sebagai narasi utama tentang keberhasilan pembangunan. Namun, di balik gambaran statistik yang menawan ini, realitas yang jauh lebih kompleks masih tersembunyi rapat-rapat.³⁵ Wajah ganda ekonomi sungguh menjadi realitas yang mengkhawatirkan. Kemiskinan, ketimpangan sosial, dan korupsi

³³ Paradoks satu dekade, angka makro membaik, tetapi kerapuhan struktural makin dalam. Terdapat 148 juta orang yang tinggal satu guncangan dari jatuh miskin; 85 juta bekerja tanpa perlindungan; jutaan remaja menanggung beban mental tanpa pertolongan. Hutan hilang lebih cepat daripada sebelumnya. Kemajuan tanpa keadilan adalah kemajuan yang rapuh. Kepedulian sejati dimulai dari mereka yang tidak terlihat dalam statistik resmi.

³⁴ SAGKI 2025, 41.

³⁵ Perekonomian Indonesia menghadapi beban struktural dan ancaman eksternal yang tidak mudah dihadapi. Salah satunya, angka statistik ekonomi yang tampak “menawan” dalam laporan ternyata diragukan oleh beberapa pihak, terutama karena penilaian lembaga-lembaga pemeringkat global yang menjadi acuan pelaku ekonomi, seperti Fitch, Moody’s, S&P, dan MSCI, yang menurunkan *outlook* atas perekonomian Indonesia pada Triwulan I 2026. Pasar merespons dinamika perekonomian Indonesia dengan sinyal kewaspadaan. Revisi *Outlook* Indonesia menjadi negatif mencerminkan penurunan kredibilitas fiskal. Di tengah kondisi seperti ini, tantangan utama pemerintah bukan sekadar menjaga angka defisit, melainkan meyakinkan pasar bahwa kerangka pengambilan keputusan ekonomi tetap rasional, disiplin, dan transparan di tengah tren sentralisasi kekuasaan.

sistemik menggambarkan kenyataan ini.³⁶ Realitas ini juga menciptakan kondisi paradoks. Kemakmuran hanya dinikmati oleh segelintir elit. Sementara itu, mayoritas rakyat masih berjuang dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Kemiskinan masih menghimpit mereka.

55. Fakta ketimpangan dikuatkan oleh rasio Gini, sebagai salah satu indikator paling umum untuk mengukur ketimpangan, menunjukkan fluktuasi yang mengindikasikan bahwa hal tersebut masih menjadi perhatian serius. Pada Maret 2025, Gini Ratio mencatat angka 0,375, meskipun sedikit membaik menjadi 0,363 pada September 2025.³⁷ Meskipun angka 0,363 pada September 2025 sebagai titik terendah yang menggambarkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, namun tetap mengindikasikan bahwa distribusi kekayaan dan pendapatan di Indonesia masih sangat tidak merata.³⁸ Artinya, penurunan Gini ratio tidak otomatis berarti berkurangnya ketimpangan struktural.³⁹ Secara faktual, segelintir elit menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi, sedangkan kelompok menengah ke bawah harus puas dengan remah-remah pembangunan. Hal ini mencerminkan struktur ekonomi yang secara inheren timpang. Di sini, mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah cenderung menguntungkan pihak-pihak yang sudah kuat.
56. Dalam hal kemiskinan, setidaknya menurut data resmi pemerintah, dilaporkan bahwa tingkat kemiskinan menunjukkan tren yang positif.⁴⁰ Data Biro Pusat Statistik (BPS) dengan standar pengeluaran Rp 641.443 per bulan pada September 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan nasional (total) turun menjadi 8,25 persen (23,36 juta orang) dari 8,47 persen pada Maret 2025.⁴¹ Namun, kita perlu mencermati “narasi positif”

³⁶ SAGKI 2025, 41.

³⁷ BPS. (2025, Juli 25). *Gini ratio Maret 2025 tercatat sebesar 0,375*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2519/gini-ratio-maret-2025-tercatat-sebesar-0-375.html>; Investor.id. (2026, Februari 5). *Gini Ratio Turun ke Level 0,363 pada September 2025*. Diakses dari <https://investor.id/macroeconomy/427382/gini-ratio-turun-ke-level-0363-pada-september-2025>

³⁸ Data BPS memang menunjukkan penurunan signifikan — Gini Ratio pada September 2025 (0,363) merupakan titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Namun, penting untuk menambahkan pemahaman faktual ini: penurunan ini didominasi oleh dampak bantuan sosial temporer dan belum menyentuh akar struktural ketimpangan (Bdk. Analisis Datanesia, Februari 2026).

³⁹ Keluar dari kemiskinan belum tentu berarti aman. Data menunjukkan perbandingan kuantitatif antara dua indikator yang bergerak dengan kecepatan berbeda, bukan kontradiksi. Kemiskinan turun 24,5 persen dalam 10 tahun. Tapi Gini Ratio hanya turun 9,7 persen. Kemiskinan turun 2,5 kali lebih cepat daripada ketimpangan. Orang keluar dari kemiskinan, tapi naik ke tangga pertama kelompok rentan, bukan ke kelas menengah yang stabil. Distribusi tetap timpang; jarak antara bagian bawah dan bagian atas hampir tidak berubah.

⁴⁰ BPS. (2025, Juli 25). *Tingkat Kemiskinan Kembali Menurun*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/news/2025/07/25/731/tingkat-kemiskinan-kembali-menurun.html>

⁴¹ Data BPS (September 2025) menunjukkan tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 8,25 persen (23,36 juta jiwa). Meskipun positif, perlu dicatat bahwa garis kemiskinan juga naik

secara saksama dan kritis. Sebagai pembanding, World Bank (Bank Dunia) per April 2025 melansir bahwa 171,8 juta orang (60,3% dari jumlah penduduk) hidup di bawah ambang rentan miskin dengan standar Paritas Daya Beli (PPP) USD 6,85 per hari. Kemudian, *The Prakarsa* menyebutkan bahwa setidaknya 14 juta warga miskin multidimensi tidak tercantum dalam data BPS. Hal ini menunjukkan adanya potensi *under-reporting* atau perbedaan metodologi yang signifikan.⁴² Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa fakta seputar kemiskinan di Indonesia mungkin jauh lebih suram daripada yang digambarkan secara resmi.⁴³ Kelompok rentan miskin masih sangat banyak dan mudah jatuh ke dalam kelompok miskin. Apalagi, potret kemiskinan di Papua dan daerah **3T (tertinggal, terdepan, terluar)** masih menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian khusus. Di kawasan seperti ini, akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi masih sangat terbatas.⁴⁴ Wilayah-wilayah tersebut sering kali terpinggirkan dalam narasi pembangunan nasional. Mereka menjadi episentrum krisis ekonomi yang mendalam.

57. Problem kemiskinan juga dialami perempuan (feminisasi kemiskinan). BPS (2025) mencatat bahwa persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan lebih tinggi pada perempuan (8,56%) dibandingkan dengan laki-laki (8,38%). Kemiskinan juga diperdalam oleh ketimpangan relasi gender yang membuat perempuan lebih rentan miskin akibat perceraian, keterbatasan akses ekonomi, dan beban peran ganda. Beban ekonomi perempuan juga bertambah akibat kenaikan harga pangan dan krisis ekonomi.
58. Krisis ekonomi di Indonesia berkulat pada beberapa isu: ketimpangan pendapatan, praktik eksploitasi tenaga kerja yang merajalela, dominasi elit dalam ekonomi, dan kebijakan yang tidak memihak kaum miskin.⁴⁵ Krisis ekonomi menyebabkan banyak orang menjadi migran, baik secara

7,76 persen secara tahunan menjadi Rp641.443/kapita/bulan — artinya ‘keluar dari kemiskinan’ kini membutuhkan daya beli yang lebih tinggi.

⁴² The Prakarsa (2025, Agustus 11). *Lembaga Ini Sebut 14 Juta Warga Miskin Multidimensi Tak Masuk Data BPS*. Diakses dari <https://theprakarsa.org/lembaga-ini-sebut-14-juta-warga-miskin-multidimensi-tak-masuk-data-bps/>

⁴³ Terdapat 148 juta jiwa yang tidak terlihat. Data menunjukkan perbedaan kuantitatif antara dua sistem pengukuran kemiskinan yang keduanya valid, bukan kontradiksi. BPS: 23,85 juta orang miskin (8,47%). World Bank: 171,8 juta orang (60,3%) hidup di bawah ambang kemiskinan. Selisihnya 148 juta jiwa, 53 persen populasi, yang tidak miskin menurut BPS, tapi bisa jatuh miskin dalam satu guncangan. Pandemi membuktikan ini: hanya dalam setahun, kemiskinan versi BPS sudah naik dari 9,41 persen (Maret 2019) menjadi 9,78 persen (Maret 2020), lalu terus naik menjadi 10,14 persen pada Maret 2021. Kelompok 148 juta ini bukan kelas menengah yang aman; mereka adalah kelas yang sedang dalam perjalanan, dan perjalanan itu bisa berbalik arah kapan saja.

⁴⁴ SAGKI 2025, 10, 42.

⁴⁵ Sistem ekonomi yang dianut oleh pemerintah sekarang sama sekali tidak berpihak pada kaum miskin, melainkan menyingkirkan dan mematikan mereka. Lih. FABC 50 Bangkok Document, 101.

legal maupun ilegal. Mereka kemudian berpotensi menjadi korban perdagangan manusia (*human trafficking*) dan eksploitasi buruh migran. Hal ini menjadi fenomena gunung es yang sekaligus mencerminkan lemahnya perlindungan hukum dan pengawasan negara.⁴⁶ Selain itu, migrasi sebagai pilihan hidup juga menjadi salah satu penyebab masalah serius dalam mempertahankan keutuhan keluarga dan pendidikan anak. Warga negara Indonesia, yang mencari penghidupan layak di negeri orang, justru terjatuh dalam lingkaran setan eksploitasi, kehilangan hak-hak dasar, dan seringkali menjadi korban kekerasan. Kasus-kasus seperti ini, yang kerap luput dari perhatian publik, adalah bukti nyata kegagalan sistem dalam melindungi warga yang paling rentan. Data korban TPPO sepanjang tahun 2025, Direktorat TPPA-TPPO Polri mengungkapkan 353 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan 1.114 korban yang terdiri dari perempuan, anak, dan laki-laki. Data Pusiknas per 19 September 2025 menunjukkan 69,7 persen korban adalah perempuan, sementara 135 korban lainnya adalah laki-laki.

59. Persoalan nasib buruh dan karyawan kontrak di Indonesia sekarang berada di persimpangan jalan. Mereka terjebak di antara target pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak-hak dasar pekerja. Berdasarkan data pemerintah, GDP Indonesia memang stabil di atas 5 persen per tahun. Namun, pekerja informal justru naik dari 56,64 persen (2020) menjadi 59,40 persen (2025). Lebih dari separuh angkatan kerja, sekitar 85 juta orang, bekerja tanpa kontrak, tanpa jaminan sosial, tanpa kepastian. Isu nasib buruh dan karyawan kontrak semakin mengemuka pasca-implementasi Undang-Undang Cipta Kerja serta berbagai regulasi turunannya yang mengubah paradigma hubungan kerja. Isu-isu paling signifikan adalah pola hubungan kerja dari permanen menjadi kontrak dan *outsourcing* serta penetapan Upah Minimum (UM) setiap tahun. Sekarang terjadi fenomena "*gig economy*" dan *prekariat* di dunia ketenagakerjaan.⁴⁷
60. Sorotan yang lebih tajam dalam krisis ekonomi adalah dominasi elit dalam perumusan dan pengambilan kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan yang seharusnya berpihak pada kesejahteraan umum (rakyat) justru cenderung menguntungkan kelompok tertentu. Kebijakan-kebijakan ini cenderung memperkaya segelintir orang, sementara rakyat kecil harus menanggung beban ekonomi yang semakin berat. Pola yang terus berulang tersebut diperparah oleh melanggengnya korupsi sistemik. Korupsi telah menjadi penyakit kronis, menggerogoti anggaran

⁴⁶ SAGKI 2025, 30.

⁴⁷"*Gig economy*" adalah sistem pasar tenaga kerja di mana perusahaan lebih memilih mempekerjakan pekerja lepas (*freelancer*), pekerja kontrak jangka pendek, atau pekerja berbasis *platform digital* daripada karyawan tetap. "Prekariat" adalah kelas sosial baru yang hidup dalam ketidakpastian dan kerentanan ekonomi serta sosial yang bersifat permanen.

negara, serta menghambat pemerataan dan kualitas pembangunan. Struktur tersebut telah mengakar kuat, mendefinisikan siapa yang memiliki akses dan kontrol atas kekayaan serta peluang ekonomi. Kebijakan publik yang “menguntungkan kelompok elit” secara efektif menciptakan struktur dominasi yang secara sistematis meminggirkan rakyat kecil serta mengabadikan kemiskinan dan ketidakadilan.⁴⁸

61. Elite ekonomi yang sering kali memiliki koneksi erat dengan lingkaran kekuasaan secara aktif mengarahkan kebijakan publik demi keuntungan pribadi dan kelompoknya. Para pelaku perdagangan manusia yang beroperasi dalam jaringan terorganisir, dalam praktiknya, akan melanggengkan struktur eksploitatif tersebut. Sektor dunia usaha (bisnis) yang mengejar keuntungan tanpa etika, serta negara yang gagal menjalankan fungsinya dalam melindungi hak-hak pekerja migran, secara tidak langsung, turut menciptakan dan mempertahankan struktur eksploitatif ini. Struktur ekonomi yang timpang tersebut secara fundamental membatasi peran rakyat kecil, menjebak mereka dalam kemiskinan, dan mengekang pilihan mereka. Sementara itu, kelompok elit, melalui praktik korupsi sistemik dan pengaruh politik, justru memperkuat dan mereproduksi struktur ketimpangan yang sudah ada.⁴⁹
62. Potensi ancaman krisis yang mengintai sangat besar. Konflik sosial akibat ketimpangan ekstrem yang tak teratasi dapat meledak kapan saja. Kita belajar dari sejarah yang terus berulang. Ketidakadilan ekonomi yang akut merupakan pemicu utama gejolak sosial. Oleh karena itu, mitigasi krisis memerlukan langkah-langkah yang nyata dan berani. Penguatan ekonomi mikro melalui komunitas, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi, merupakan kunci untuk membangun kemandirian ekonomi rakyat. Namun, lebih jauh dibutuhkan transformasi secara fundamental yang mencakup redistribusi sumber daya secara adil, penegakan hukum antikorupsi yang tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih, serta reformasi kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial dan perlindungan hak-hak pekerja, sehingga janji kesejahteraan umum tidak hanya menjadi ilusi.

D. Dimensi Ekologi: Jeritan Bumi dan Krisis Kemanusiaan

63. Krisis ekologi di Indonesia bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan jeritan bumi yang telah berevolusi menjadi krisis moral dan spiritual yang serius, mengancam martabat kemanusiaan, keutuhan alam ciptaan, serta keberlanjutan hidup di planet Bumi.⁵⁰ Luka ekologis

⁴⁸ SAGKI 2025, 41.

⁴⁹ SAGKI 2025, 41.

⁵⁰ SAGKI 2025, 52.

di Indonesia menyatukan tiga masalah utama: degradasi lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, dan perubahan iklim.

64. Salah satu manifestasi paling nyata dan jelas dari degradasi lingkungan adalah masalah pengolahan sampah yang buruk, deforestasi masif, polusi plastik di laut, serta limbah industri yang mencemari sumber daya vital seperti air dan tanah, termasuk sistem pertanian petani yang mengandalkan pupuk kimia untuk meningkatkan produktivitas hasil panen.⁵¹ Pengelolaan sampah bukan hanya persoalan estetika, melainkan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan ekosistem.⁵² Produksi sampah mencapai sekitar 191.500 ton per hari (KLHK/SIPSN 2023)⁵³, dengan tingkat penanganan yang baru mencapai sekitar 66,5 persen. Keadaan ini sudah melampaui ambang batas daya dukung lingkungan. Jutaan ton sampah, terutama plastik, berakhir di lautan setiap tahun, merusak keanekaragaman hayati laut. Kesehatan juga terancam karena sampah yang masuk ke dalam rantai makanan manusia. Limbah industri merupakan salah satu ancaman paling serius bagi keberlanjutan ekosistem karena sifatnya yang sering kali bersifat akumulatif dan sulit terurai secara alami. Kerusakan ekologi yang ditimbulkan tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga dapat memicu efek domino pada rantai makanan global. Limbah industri dapat mengakibatkan kerusakan ekologi yang serius akibat pencemaran kimia dan toksisitas akut. Industri sering melepaskan senyawa kimia berbahaya, seperti logam berat yang tidak dapat dihancurkan oleh organisme, serta polutan organik persisten yang merusak ekosistem air dan tanah.
65. Hal lain yang paling mengkhawatirkan adalah laju deforestasi yang terus meningkat. Hutan-hutan tropis Indonesia, yang merupakan paru-paru dunia dan rumah bagi keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya, terus saja ditebang dan digerus untuk kepentingan industri. Deforestasi di Tanah Papua menjadi sorotan tajam dalam beberapa tahun terakhir.⁵⁴ Namun, bukan hanya di Papua, episentrum deforestasi

⁵¹ SAGKI 2025, 51.

⁵² Krisis sampah adalah krisis yang terjadi dalam kebiasaan sehari-hari. Data menunjukkan tren kuantitatif timbulan dan komposisi sampah, dengan interpretasi kualitatif bahwa akar masalahnya bersifat perilaku dan budaya, bukan semata-mata struktural atau industri. Timbulan sampah nasional diperkirakan mencapai 56,63 juta ton pada 2023 (proyeksi KLH). Porsi plastik naik dari 15,88 persen (2019) menjadi 19,65 persen (2024). Sumber terbesar: rumah tangga, 60,45 persen pada 2023 dan 50,8 persen pada 2024. Bukan industri besar, melainkan keputusan sehari-hari 280 juta orang yang terdistribusi sehingga tidak ada yang merasa bertanggung jawab. Krisis ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan regulasi; ia membutuhkan perubahan pada tingkat kebiasaan yang paling personal.

⁵³ Data resmi KLHK (2023) mencatat produksi sampah nasional di Indonesia sekitar 69,9 juta ton per tahun atau sekitar 191.500 ton per hari, dengan tingkat penanganan hanya sekitar 66,5 persen (KLHK/SIK-SIPSN 2023-2024).

⁵⁴ Kompas.id. (18 Desember 2025). *Deforestasi Kian Masif, Papua Tak Butuh Tebu ataupun Sawit*. Diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/deforestasi-kian-masif-papua-tak->

justeru terjadi di hutan Kalimantan dan Sumatera (terutama di Riau).⁵⁵ Data (Auriga Nusantara) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sebanyak 257.384 hektar hutan alam hilang, dan meningkat menjadi sekitar 261.575 hektar pada tahun 2024. Data resmi Kementerian Kehutanan juga mencatat deforestasi netto 2024 sebesar 175.400 hektar (setelah reforestasi).⁵⁶ Dampak seriusnya adalah habitat hutan alami hilang, spesies flora dan fauna punah, serta keseimbangan ekosistem terganggu.

66. Proyek Strategis Nasional (PSN) dari pemerintah, yang seharusnya memastikan keberlanjutan daya dukung lingkungan, justru kerap menjadi pendorong utama deforestasi. PSN seperti di Merauke, misalnya, telah mengakibatkan hilangnya ribuan hektar hutan primer. Kondisi ini memicu konflik agraria yang berkepanjangan dengan masyarakat adat di Merauke.⁵⁷ Data FAO (2024) menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan hutan tropis utama terluas di dunia. Meskipun demikian, laju deforestasi yang masif telah mengancam posisi ini. Reputasi Indonesia di mata dunia internasional juga dipertanyakan.⁵⁸ Ironi realitas yang menyakitkan: pembangunan mengorbankan lingkungan dan ruang hidup warga termasuk hak-hak masyarakat adat.⁵⁹

butuh-tebu-maupun-sawit Liputan Kompas.id menunjukkan hamparan batas tebangan hutan di Distrik Animha, Kabupaten Merauke, Papua, 11 November 2022. Hutan di kawasan tersebut terus menyusut, terutama sejak adanya proyek raksasa lumbung pangan dan energi atau MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*) pada 2010 yang menargetkan mengonversi 1,2 juta hektare lahan dan hutan di Merauke menjadi agroindustri dan perkebunan kayu.

⁵⁵ Sebagai pembanding, berdasarkan data Simontini/Auriga (2025), Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Riau merupakan provinsi dengan tingkat deforestasi tertinggi pada 2024. Papua Selatan memang masuk 10 besar deforestasi tertinggi pada 2023, tetapi pada 2024 turun peringkat.

⁵⁶ Berdasarkan sumber independen terpercaya, Auriga Nusantara, deforestasi pada 2023 = 257.384 ha dan pada 2024 = 261.575 ha. Pemerintah sendiri (Kementerian Kehutanan) mencatat deforestasi netto 2024 sebesar 175.400 ha (setelah reforestasi 40.800 ha).

⁵⁷ Pusaka.or.id. (2025, Agustus 1). *Tren dan Pendorong Pembukaan Lahan di Papua 2024-2025*. Diakses dari <https://pusaka.or.id/news/tren-dan-pendorong-pembukaan-lahan-di-papua-2024-2025/>; Mongabay.co.id. (2025, Oktober 17). *Menyoal Ambisi Proyek Pangan dan Energi di Papua*. Diakses dari <https://mongabay.co.id/2025/10/17/menyoal-ambisi-proyek-pangan-dan-energi-di-papua/>

⁵⁸ Jubi.id. (2026, Februari 21). *Pemerintah Mengulang Kegagalan Proyek Pangan Masa Lalu Lewat PSN*. Diakses dari <https://jubi.id/animha/2026/pemerintah-mengulang-kegagalan-proyek-pangan-masa-lalu-lewat-psn/>

⁵⁹ Deforestasi legal: hutan dikorbankan atas nama “energi hijau”. Data menunjukkan tren kuantitatif deforestasi yang terus meningkat. Kaitan dengan agenda transisi energi global adalah interpretasi analitis dan hipotesis, bukan kausalitas yang terbukti dari data yang ada. Deforestasi 2025 melonjak 65,8% dalam setahun: dari 261.575 ha (2024) menjadi 433.751 ha (2025), yang merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Kalimantan 158.283 ha, Sumatera 144.150 ha. Lebih dari separuh (58,7%) terjadi di dalam konsesi berizin resmi. Sebagian pendorongnya adalah proyek berlabel “hijau”: tambang nikel untuk baterai EV, kebun biomassa (41.332 ha pada 2024), dan food estate. Pertanyaan yang layak diajukan: apakah transisi energi global sedang melegitimasi penghancuran hutan lokal?

67. Industri pertambangan dan perkebunan skala besar sering kali beroperasi dengan mengabaikan prinsip keadilan ekologis serta hak-hak masyarakat adat.⁶⁰ Industri pertambangan cenderung mengabaikan prinsip *free, prior informed consent*, yaitu persetujuan masyarakat setempat sebagai penerima manfaat dan terdampak langsung dari kegiatan tersebut. Praktik-praktik eksploitatif tidak hanya merusak lingkungan secara permanen, tetapi juga merampas tanah ulayat, ruang hidup, serta sumber penghidupan masyarakat lokal yang berpotensi memicu konflik sosial. Demikian juga, kasus-kasus seperti pengabaian konsultasi publik yang transparan dan akuntabel, seperti proyek panas bumi di Flores dan proyek pangan (*food estate*) di Papua, justru bisa menjadi bumerang jika dijalankan melalui pendekatan pembangunan *top-down* dan eksploitatif.
68. Perubahan iklim bukan cerita omong kosong (mitos), melainkan sesuatu yang nyata. Kajian akademis yang saintifik membuktikan bahwa perubahan iklim mengalami anomali di atas ambang batas toleransi 1,5°C (derajat Celsius). Pada tahun 2024, anomali suhu global telah mencapai 1,60°C di atas level pra-industri (Copernicus/ECMWF 2024)⁶¹—yang menjadikan 2024 sebagai tahun kalender pertama yang sepenuhnya melampaui ambang batas 1,5°C yang menyebabkan pemanasan global dan berdampak pada bencana hidrometeorologi. Dampak perubahan iklim sangat dirasakan oleh kelompok sektoral seperti petani dan nelayan, komunitas orang miskin, masyarakat pedesaan, kaum perempuan, dan kelompok difabel. Bencana kekeringan berkepanjangan, perubahan iklim yang berakibat pada perubahan musim dan cuaca, banjir bandang, dan kenaikan permukaan air laut adalah fenomena yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.⁶² Krisis ekologi memiliki dimensi keadilan sosial yang sangat kuat, di mana kelompok rentan menjadi korban utama dari kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan dan sering kali bersifat eksploitatif.
69. Pemahaman kita terhadap krisis ekologi secara lebih mendalam membawa kita pada refleksi antropologis-etis. Alam, dalam pandangan antroposentris yang dominan, sering kali dipandang sebagai objek eksploitasi semata. Alam diperlakukan sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi tanpa batas demi keuntungan ekonomi (profitisasi) yang maksimal. Pandangan ini mencerminkan struktur pemaknaan yang antroposentris (manusia sebagai pusat) dan dominasi penguasaan yang

⁶⁰ SAGKI 2025, 39.

⁶¹ Data terbaru (Copernicus/ECMWF 2024) menunjukkan anomali suhu global 2024 sebesar 1,60°C di atas level praindustri 1850-1900, menjadikan 2024 sebagai tahun kalender pertama yang melampaui ambang batas 1,5°C.

⁶² SAGKI 2025, 51.

secara inheren merusak lingkungan alam. Pola tersebut mendapat legitimasi dari sistem ekonomi dan politik yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi di atas keberlanjutan ekologis. Dalam konteks ini, industri ekstraktif, pertambangan, dan perkebunan skala besar bertindak sebagai aktor utama. Kelompok masyarakat adat, yang memiliki kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam, menjadi pihak yang kian terpinggirkan dalam pemenuhan hak-hak agrariannya. Para perempuan kehilangan hutan tempat mereka bergantung, yang menjadi rumah, lumbung pangan, bahkan sumber obat-obatan bagi keluarga. Krisis ekologi merupakan akibat dari perilaku ekonomi yang mengabaikan keadilan lingkungan. Perilaku tersebut, yang dibentuk dan diperkuat oleh struktur ekonomi dan politik yang ada, pada akhirnya berdampak pada pembatasan kelangsungan hidup manusia di masa depan.

70. Potensi ancaman krisis lanjutan akan ditimbulkan oleh krisis ekologi itu sangat besar. Krisis ekologis bermetamorfosis menjadi krisis moral, spiritual, dan kemanusiaan. Ketika manusia kehilangan koneksi dengan alam dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai “penjaga bumi”, nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental pun akan tergerus. Untuk itu, upaya mitigasi memerlukan gerakan “Habitus Ekologis” yang kuat. Paus Fransiskus, dalam ensiklik *Laudato Si'*, menyerukan secara tegas pertobatan ekologis dan perubahan gaya hidup yang lebih berkelanjutan untuk mendorong “Habitus Ekologis” ini.⁶³
71. Gereja perlu menegaskan kembali sikapnya terkait pertobatan ekologis ini. Sebagai langkah krusial untuk mencegah konflik agraria dan bencana lingkungan, kita perlu melakukan edukasi kritis bagi warga, termasuk masyarakat adat, tentang hak-hak atas tanah mereka, serta partisipasi aktif umat dalam gerakan ekologis.⁶⁴ Gereja juga perlu mengawal transformasi kebijakan yang berwawasan ekologi. Proses tersebut dapat terwujud dalam perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang benar-benar berpihak pada lingkungan dan masyarakat. Pengakuan penuh atas hak-hak masyarakat adat, advokasi kebijakan publik yang berpihak pada keadilan ekologis, serta perubahan fundamental dalam praktik ekonomi yang eksploitatif harus menjadi bagian dari transformasi ini. Tanpa langkah konkret dan peran nyata Gereja serta tanpa perubahan paradigma ini, masa depan bumi dan kemanusiaan akan menghadapi eskalasi ancaman yang semakin besar.

⁶³ SAGKI 2025, 52.

⁶⁴ SAGKI 2025, 30.

E. Dimensi Politik: Kemunduran Demokrasi dan Bangkitnya Otoritarianisme

72. Krisis politik bersumber dari kemerosotan kualitas demokrasi, munculnya populisme, serta ancaman otoritarianisme. Krisis politik di Indonesia ditandai oleh kemerosotan substansi demokrasi. Fenomena tersebut ditemukan dalam tiga pilar utama problem demokrasi hari ini, yaitu sentralisasi kekuasaan yang semakin menguat, lemahnya partisipasi dan kontrol sosial dari masyarakat sipil, serta penggunaan represi hukum sebagai alat kontrol.⁶⁵ Kondisi internal (domestik) diperparah oleh dinamika eksternal (luar negeri) berupa ancaman krisis geopolitik yang semakin kompleks. Kombinasi semua dimensi ini seakan menciptakan badai sempurna yang mengancam stabilitas dan masa depan demokrasi di Indonesia.
73. Kecenderungan sentralisasi kekuasaan dan melemahnya kontrol sosial dalam politik di Indonesia menjadikan demokrasi berjalan tanpa partisipasi yang bermakna. Demokrasi kehilangan landasan pada kebebasan sipil warga. Proses politik sering kali hanya berjalan secara formalistik (prosedural). Pemilu dan mekanisme demokrasi lainnya tampak berfungsi, namun esensi partisipasi publik yang aktif dan kritis kerap terabaikan. Pemerintahan cenderung dijalankan dengan tata kelola yang eksklusif. Elite membajak (*elite capture*) penentuan keputusan-keputusan strategis, sekaligus mengabaikan kedaulatan dan kebutuhan rakyat banyak. Secara *inheren*, hal tersebut mengarah pada sentralisasi kekuasaan di mana konsentrasi kekuatan politik terpusat pada lembaga atau individu tertentu. Kondisi ini mengurangi distribusi kekuasaan yang sehat dan tentu saja mengancam prinsip *checks and balances*.⁶⁶
74. Bersamaan dengan menguatnya sentralisasi (resentralisasi) kekuasaan, terjadi pula pelemahan oposisi politik dan penyempitan ruang bagi masyarakat sipil. Oposisi politik, yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan, kerap dihadapkan pada berbagai tekanan dan hambatan, mulai dari polarisasi yang sengaja diciptakan hingga upaya kooptasi. Sementara itu, masyarakat sipil, yang memiliki peran krusial dalam melakukan pengawasan, advokasi, dan artikulasi kepentingan publik, semakin dibatasi ruang geraknya. Regulasi multitafsir, pembatasan kebebasan sipil, kriminalisasi aktivis, dan stigmatisasi terhadap kritik merupakan rangkaian modus yang sering digunakan untuk membungkam suara-suara kritis serta menciptakan iklim ketakutan dan apatisme di kalangan masyarakat.

⁶⁵ SAGKI 2025, 43.

⁶⁶ SAGKI 2025, 43.

75. Menguatnya sentralisasi politik berjalan beriringan dengan kecenderungan remiliterisasi dalam kekuasaan. Mereka menggunakan kembali instrumen militer dalam birokrasi sipil, seperti pada rezim Orde Baru. Salah satu indikator utamanya adalah semakin lumrahnya—terjadi “normalisasi”—penempatan perwira militer aktif maupun purnawirawan dalam jabatan-jabatan strategis pemerintahan yang merupakan posisi birokrasi sipil. Indikator lain adalah keterlibatan TNI yang sangat intens dalam urusan domestik melalui skema Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang fleksibel dan luas. Selain itu, pelibatan prajurit TNI dalam program ketahanan pangan, seperti cetak sawah dan distribusi pupuk, melalui ekstensifikasi komando teritorial yang terwujud dalam pembentukan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP), memperkuat fenomena ini. Pendekatan militeristik juga menjalar ke dalam budaya politik melalui proses sekuritisasi pembangunan. Pola berulang selalu digunakan dalam isu-isu sosial atau politik sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Kritik atau gerakan masyarakat sipil direspons dengan pendekatan keamanan *atas nama* stabilitas negara. Tantangan utama kita adalah menjaga “proporsionalitas” hubungan sipil dan militer, termasuk profesionalisme prajurit TNI tanpa mengikis supremasi sipil yang menjadi mandat utama Reformasi 1998.
76. Dalam praktik politik kontemporer di Indonesia, muncul barisan gejala dalam konteks sosiopolitik: budaya politik baru yang disebut “normalisasi”: istilah yang merujuk pada suatu proses penerimaan, di mana praktik-praktik politik yang dulunya dianggap tabu atau melanggar etika perlahan-lahan diterima sebagai sesuatu yang sudah biasa, hal yang dianggap lumrah. Contoh praktik tersebut yaitu politik dinasti, benturan kepentingan dalam kebijakan, dan penggunaan narasi polarisasi dalam kampanye, yang dulu merupakan sesuatu yang tabu dan tak wajar, namun sekarang sudah dilumrahkan dan dianggap sebagai hal yang biasa. Mekanisme politik menciptakan pengulangan pembiaran hukum secara terus-menerus, sehingga publik perlahan menjadi “terbiasa”. Sesuatu yang awalnya dianggap skandal atau anomali demokrasi akhirnya menjadi semacam “normal” baru dalam persepsi masyarakat. Fokus utama pelebagaan tata kelola kedaruratan adalah menciptakan stabilitas dan keteraturan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Gejala ini terjadi sebagai efek samping pascapandemi Covid-19. Muncul fenomena yang dikenal sebagai “normalisasi kedaruratan” yang merayap secara persisten ke dalam sistem hukum, praktik politik, dan pola legislasi kilat yang berdalih atas urgensi publik. Sekarang, mekanisme yang ada menjadi pola utama dalam menjalankan kekuasaan. Kondisi “kedaruratan” (tirani urgensi)

dan *framing* “normalisasi” sengaja dipelihara sebagai “stabilitas semu” yang mengakibatkan ruang deliberasi publik menyempit. Implikasinya adalah menurunnya kualitas demokrasi atau defisit demokrasi.⁶⁷

77. Kemerosotan demokrasi terlihat dari Indeks Demokrasi Indonesia yang menunjukkan tren penurunan yang mengkhawatirkan. Laporan terbaru Democracy Report 2026 dari V-Dem Institute menempatkan Indonesia dalam klasifikasi rezim autokrasi elektoral (*electoral autocracy*). Posisi Indonesia belum beranjak yang diakibatkan oleh melemahnya kebebasan sipil, pengawasan legislatif dan yudikatif, integritas pemilu, serta menguatnya peran militer dalam urusan sipil. *Economist Intelligence Unit* (EIU, 2024), sebuah lembaga riset terkemuka, mengkategorikan demokrasi Indonesia sebagai “demokrasi cacat” (*flawed democracy*) dengan skor 6,44 pada 2024.⁶⁸ Skor di atas menempatkan Indonesia di bawah rata-rata global dan regional. Data tersebut mengonfirmasi kemerosotan substansi demokrasi yang perlu diawasi dengan saksama. Data tentu saja bukan sekadar angka, tetapi cermin dari erosi kebebasan sipil, menurunnya partisipasi politik, dan fungsi pemerintahan yang kurang akuntabel. Fenomena yang mengindikasikan bahwa fondasi demokrasi yang telah dibangun pasca-Reformasi kini bukan saja sedang diuji, melainkan mengalami pengikisan akut.⁶⁹
78. Gejala sentralisasi kekuasaan dan tata kelola pemerintahan yang elitis menunjukkan adanya struktur otoritas (kekuasaan) yang tertutup. Struktur ini, yang diperkuat oleh berlakunya norma-norma politik yang membatasi dan budaya politik yang cenderung paternalistik, menciptakan lingkungan politik di mana negara bertindak sebagai penguasa yang represif. Sebaliknya, warga masyarakat sipil sengaja dikondisikan menjadi pihak yang tidak berdaya. Kelompok masyarakat sipil, yang seharusnya menjadi kekuatan pendorong perubahan dan

⁶⁷COVID-19 meninggalkan luka struktural yang belum sembuh. Data menunjukkan perbedaan kuantitatif dalam kecepatan pemulihan antarindikator pascapandemi, yang mengindikasikan adanya dampak struktural, bukan sekadar dampak siklus. GDP pulih dalam 2 tahun (dari -2,07% pada 2020 menjadi 5,31% pada 2022). Tapi informalitas melonjak dari 56,64 persen (2020) ke 59,62 persen (2021) dan hingga 2025 masih 59,40 persen, tidak pernah kembali ke level pra-pandemi (57,27 persen pada 2019). Demokrasi pun belum pulih: 6,48 (2019) vs 6,44 (2024). COVID-19 mempercepat dua pergeseran struktural yang kini menjadi lebih permanen.

⁶⁸ Democracy Index, Indonesia (2006–2024) – Data, Charts & Analysis <https://statbase.org/data/idn-democracy-index/?hl=en-US>

⁶⁹ Pertumbuhan ekonomi tidak memperbaiki demokrasi. Data menunjukkan korelasi temporal negatif antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas demokrasi selama satu dekade, bukan kausalitas yang terbukti. GDP naik tipis 2015–2025. Indeks Demokrasi EIU turun dari 7,03 ke 6,44, Indonesia kehilangan 10 posisi (peringkat 49 ke peringkat 59). Pemilu berjalan baik, tetapi budaya politik (5,00 vs rata-rata global 5,32) dan kebebasan sipil (5,29) justru melemah. Data sepuluh tahun menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dengan sendirinya memperkuat demokrasi.

penjaga demokrasi, justru terkooptasi, dilemahkan, dan diabaikan oleh struktur politik yang ada. Kondisi ini menciptakan siklus tak berujung: kekuasaan semakin terkonsolidasi, sementara partisipasi publik semakin terpinggirkan. Peringatan serius tentang potensi otoritarianisme mengintai bangsa kita.

79. Kebebasan yang terancam menjadi kondisi umum dalam krisis politik, ditambah dengan represi hukum dan ancaman krisis geopolitik. Penggunaan hukum represif telah menjadi alat yang ampuh untuk membungkam kritik dan membatasi ruang gerak warga negara. Hukum yang seharusnya menjadi pelindung keadilan sering kali justru dijadikan alat legitimasi kekuasaan untuk menekan kebebasan berpendapat dan berekspresi.⁷⁰ Bersamaan dengan itu, maraknya peristiwa intoleransi, terutama yang berkaitan dengan kebebasan beribadah (termasuk pendirian tempat ibadah), mengancam kebebasan beragama sekaligus menciptakan polarisasi sosial yang berbahaya. Kasus-kasus kriminalisasi aktivis, jurnalis, dan kelompok minoritas merupakan bukti nyata erosi supremasi hukum dan kebebasan sipil yang mengancam fondasi negara hukum dan hak asasi manusia.
80. Kepastian hukum merupakan syarat utama untuk mewujudkan keadilan sosial, perdamaian, dan kesejahteraan bersama. Hukum harus menjadi sarana untuk menghormati martabat manusia dan kebaikan bersama. Hukum bukan alat kekuasaan. Hukum juga bukan alat untuk kepentingan kelompok tertentu.⁷¹ Hukum represif menjadi bagian dari struktur legitimasi yang digunakan negara untuk mempertahankan kekuasaannya. Hukum represif juga membatasi partisipasi publik yang pada akhirnya mereduksi demokrasi menjadi sekadar etalase. Politisasi hukum adalah lonceng kematian bagi eksistensi negara hukum dan akan membuka jalan bagi penyalahgunaan kekuasaan serta ketidakadilan yang sistematis. Bagi perempuan, represivitas hukum juga berakar pada substansi hukum yang bias gender, ditambah dengan perilaku aparat yang diskriminatif terhadap perempuan dan budaya hukum yang masih menormalisasi kekerasan terhadap perempuan.
81. Bangsa kita juga sedang menghadapi tantangan politik dari luar negeri. Indonesia juga berada di tengah pusaran krisis geopolitik yang semakin kompleks. Ketimpangan tatanan dunia, perubahan hegemoni global, dan kesenjangan sumber daya menciptakan tekanan sistemik yang multidimensional. Kondisi tekanan tidak hanya menyentuh aspek ekonomi dan politik, tetapi juga merambah kedaulatan digital, keamanan pangan, dan bahkan mengancam martabat kemanusiaan.

⁷⁰ SAGKI 2025, 43.

⁷¹ Bdk. Paus Leo XIII, *Ensiklik Rerum Novarum* (untuk selanjutnya: RN), 32-33; Paus Yohanes XXIII, *Ensiklik Pacem in Terris* (untuk selanjutnya: PT) 51; FT, 177.

Misalnya, persaingan kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik dapat berdampak pada stabilitas regional dan kedaulatan nasional Indonesia. Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, Iran, dan para sekutunya, telah menimbulkan krisis global yang serius serta berdampak langsung pada Indonesia dan kepentingan nasionalnya. Selain itu, ketegangan berkelanjutan di Laut China Selatan, eskalasi konflik Rusia dan Ukraina, serta persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok menciptakan volatilitas global yang berdampak langsung pada rantai pasok, harga energi, dan kedaulatan digital Indonesia. Dalam lanskap geopolitik multipolar ini, Indonesia dituntut memiliki posisi yang jernih dan mandiri demi melindungi kepentingan rakyatnya.

82. Struktur politik yang represif secara melekat akan membatasi partisipasi publik, menciptakan apatisme dan ketidakpercayaan terhadap institusi negara. Ketidadaan kontrol sosial yang efektif dari aktor masyarakat sipil justru akan memperkuat pola otoritarianisme yang menggerogoti tatanan kenegaraan. Proses timbal baliknya akan berbahaya: semakin masyarakat dibungkam, semakin kuat pula kekuasaan yang menindas—menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus.
83. Potensi eskalasi krisis yang paling mengkhawatirkan dari dimensi politik adalah kematian demokrasi dan ketergantungan pada alur otoritarian. Jika tren terus berlanjut, Indonesia berisiko kehilangan identitasnya sebagai negara demokratis dan pluralis. Rezim penindas kebebasan sipil dan hak asasi manusia akan mengambil alih proses demokrasi dan politik. Mitigasi krisis memerlukan upaya kolektif untuk menghidupkan kembali komunitas basis dan kontrol sosial (gerakan) dari bawah (*bottom-up movement*). Pendidikan politik etis harus digalakkan untuk menumbuhkan kesadaran kritis dan partisipasi aktif warga negara. Advokasi berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) juga menjadi krusial. Upaya-upaya harus segera dilakukan untuk mencegah otoritarianisme, konflik sosial, dan penyebaran pelanggaran HAM. Hanya dengan upaya tersebut kita dapat memastikan bahwa hak setiap warga negara terpenuhi dan terlindungi dari penyalahgunaan kekuasaan.⁷²
84. Transformasi politik yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi politik bangsa adalah membangun “gerakan sosial untuk demokrasi” secara efektif. Gerakan ini dilakukan dengan mengembalikan desentralisasi kekuasaan yang sesungguhnya. Transformasi paradigma hukum dari pendekatan represif menuju sistem yang demokratis dan berkeadilan juga menjadi bagian dari upaya ini dan menyasar penegakan akuntabilitas publik yang transparan. Secara spesifik, juga bertujuan

⁷² SAGKI 2025, 50.

untuk membuka dialog damai yang berkelanjutan di Tanah Papua, guna menyelesaikan konflik dan kekerasan yang berkepanjangan, demi membangun keadilan yang substantif.

85. Elemen masyarakat sipil dan Gereja Katolik memiliki peran krusial dalam menantang struktur dominasi politik. Sentralisasi dan represi juga harus dilawan untuk menciptakan struktur politik yang lebih demokratis, inklusif, dan adil. Ini adalah perjuangan panjang yang membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak. Perlawanan dilakukan untuk menjaga api demokrasi tetap menyala sekaligus memastikan masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia.

F. Dimensi Nilai: Pergeseran Nilai dan Keletihan Moral

86. Bangsa kita juga tengah mengalami krisis nilai yang nampak dalam pergeseran nilai dan keletihan moral dalam masyarakat. Krisis multidimensi yang melanda Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek sosial, teknologi, ekonomi, ekologi, dan politik, melainkan juga merambah dimensi nilai, etika, dan moral. Krisis nilai adalah krisis yang paling fundamental karena menyentuh inti identitas dan karakter bangsa. Pergeseran fundamental dalam masyarakat, yang ditandai oleh sekularisme yang mengikis iman, dehumanisasi yang merajalela, keletihan moral yang kronis, dan eksklusivisme keagamaan yang memecah-belah, menjadi indikator utama krisis nilai ini.⁷³ Fenomena ini dapat mengancam kohesi sosial, memudahkan empati, mereduksi martabat kemanusiaan, dan menciptakan kekosongan spiritual yang berbahaya.
87. Krisis nilai juga mewujud dalam arus pragmatisme moral dan dehumanisasi—yang menempatkan manusia sebagai alat. Dalam konteks krisis nilai, salah satu fenomena paling mengkhawatirkan adalah kecenderungan untuk memperlakukan manusia sebagai alat ekonomi dan sebagai sarana politik. Manusia tidak diperlakukan sebagai pribadi (subjek) yang memiliki martabat intrinsik. Dehumanisasi adalah buah dari pragmatisme ekstrem yang mengikis nilai-nilai spiritual dan transenden, mereduksi esensi kemanusiaan dan keutuhan ciptaan menjadi sekadar fungsi atau komoditas. Ketika manusia ditarik hingga kehilangan nilai inherennya, normalisasi eksploitasi dan pengabaian hak-hak dasar menjadi lebih mudah. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang justru sangat religius, terjadi gejala “instrumentalisasi agama”: ekspresi keagamaan tinggi, namun agama sering diinstrumentalisasi untuk kepentingan politik dan ekonomi. Politisasi agama dan eksklusivisme berbasis identitas agama menjadi dua contoh

⁷³ SAGKI 2025, 10, 30, 43, 51.

yang populer. Di tengah kuatnya ekspresi beragama, kasus-kasus korupsi, intoleransi, dan dehumanisasi justru semakin meningkat adalah gambaran situasi paradoks yang menantang secara teologis.

88. Fenomena tersebut dapat diamati dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam ranah ekonomi, pekerja sering kali dipandang hanya sebagai faktor produksi. Nilainya diukur dari seberapa besar kontribusinya terhadap keuntungan, bukan dari martabat kemanusiaannya. Upah rendah, kondisi kerja yang tidak layak, dan minimnya jaminan sosial merupakan manifestasi dehumanisasi ekonomi. Dalam ranah politik, warga negara kerap direduksi menjadi sekadar angka dalam survei elektabilitas. Mereka sekadar menjadi massa yang dapat dimobilisasi demi kepentingan kekuasaan. Janji-janji politik yang kosong, manipulasi informasi, dan pembungkaman suara kritis adalah bukti bahwa martabat manusia telah dikorbankan demi ambisi politik.
89. Struktur legitimasi nilai-nilai yang bergeser akibat sekularisme⁷⁴ Dehumanisasi menciptakan norma-norma baru dalam masyarakat. Norma-norma baru sering kali tidak disadari dan secara perlahan mengabaikan martabat intrinsik manusia serta menggantinya dengan nilai-nilai instrumental. Ketika nilai-nilai spiritual dan etika memudar, ruang kosong tersebut diisi oleh pragmatisme dan materialisme. Tren ini pada akhirnya secara kolektif memperparah krisis moral dan spiritual bangsa. Erosi nilai-nilai fundamental mengancam fondasi kemanusiaan itu sendiri.
90. Situasi krisis multidimensi yang kita alami telah mencapai keletihan moral dan ada sikap eksklusivisme keagamaan yang ujung-ujungnya sampai pada normalisasi kekerasan dan prasangka. Masyarakat Indonesia sekarang mengalami apa yang disebut sebagai “keletihan moral”, sebuah kondisi ketika normalisasi terhadap fenomena negatif, seperti populisme, perang, dan kemunculan figur-figur antagonis di ruang publik, dianggap sudah menjadi hal yang biasa.⁷⁵ Keletihan ini secara perlahan mengikis sensitivitas moral kolektif, memudahkan batas antara yang benar dan yang salah, serta menciptakan apatisme terhadap ketidakadilan. Ketika kejahatan dan kebohongan dipertontonkan secara terus-menerus tanpa konsekuensi, masyarakat cenderung mati rasa dan kehilangan kemampuan untuk membedakan serta menolak hal-hal yang salah.
91. Bersamaan dengan keletihan moral yang dirasakan, eksklusivisme keagamaan juga menjadi ancaman serius bagi kohesi sosial.

⁷⁴ Sekularisme adalah pola pikir dan pola hidup yang menyingkirkan iman, agama, dan spiritualitas dari kehidupan publik. Lih. FABC 50 Bangkok Document, 162.

⁷⁵ SAGKI 2025, 43.

Eksklusivisme ini, yang sering kali berakar pada prasangka, luka sejarah, dan interpretasi sempit terhadap ajaran agama, akan menghambat dialog lintas iman yang tulus. Keadaan yang pada gilirannya dapat memperdalam perpecahan sosial.⁷⁶ Ketika agama, yang seharusnya menjadi sumber kedamaian dan persatuan, justru digunakan sebagai alat untuk memecah-belah dan menjustifikasi kebencian, maka fondasi toleransi dan pluralisme bangsa akan terkikis. Kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama merupakan bukti nyata bahaya eksklusivisme ini.

92. Struktur legitimasi nilai-nilai yang bergeser akibat sekularisme, dehumanisasi, keletihan moral, dan eksklusivisme keagamaan menciptakan norma-norma baru yang secara sistematis mengabaikan martabat intrinsik manusia.⁷⁷ Norma-norma baru ini, yang sering kali tidak tertulis namun tetap mengikat, membentuk cara pandang dan perilaku masyarakat. Perilaku individu yang menormalisasi kekerasan (keletihan moral) dan kelompok eksklusif yang menyebarkan kebencian adalah aktor-aktor yang secara aktif merusak tatanan nilai yang telah dibangun dengan susah payah. Mereka memanfaatkan celah dalam struktur nilai yang melemah untuk memperkuat agenda mereka sendiri.
93. Potensi eskalasi krisis akibat krisis nilai sangat besar, yaitu disintegrasi moral dan spiritualitas bangsa, hilangnya identitas kebangsaan yang pluralis, serta konflik sosial berbasis nilai yang dapat memicu kekerasan. Mitigasi krisis memerlukan upaya serius untuk merevitalisasi pendidikan karakter berbasis nilai-nilai universal, memperkuat dialog lintas iman yang tulus dan konstruktif, serta mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan universal yang melampaui sekat-sekat primordial. Beberapa aspek transformasi yang dibutuhkan dalam konteks ini. Dekonstruksi sekularisme ekstrem yang memisahkan agama dari etika. Penguatan etika publik yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Pengembangan teologi inklusif yang memuliakan martabat manusia dan menghargai keberagaman adalah perjuangan untuk merebut kembali jiwa bangsa dari cengkeraman krisis moral dan spiritual.
94. Krisis multidimensi adalah luka-luka yang sedang menggerogoti bangsa Indonesia. Krisis ini merupakan panggilan darurat bagi seluruh elemen bangsa. Dari keretakan kohesi sosial, ancaman dehumanisasi teknologi, ketimpangan ekonomi yang menganga, kerusakan ekologi yang masif, kemerosotan substansi demokrasi, hingga pergeseran nilai-nilai fundamental, setiap dimensinya saling terkait dan berkelindan, sehingga

⁷⁶ SAGKI 2025, 54.

⁷⁷ SAGKI 2025, 10, 30, 43, 51.

memperparah satu sama lain. Uraian ini diharapkan dapat membantu kita memahami bahwa krisis yang ada merupakan hasil interaksi dinamis antara struktur yang ada dan agensi para aktor. Struktur politik masyarakat yang patriarki, dominasi alokatif dalam penguasaan sumber daya, otoritas politik yang represif, dan norma-norma yang terus bergeser telah membentuk lanskap krisis. Namun, kapasitas agensi serta daya gerak aktor individu maupun kolektif memiliki potensi untuk menantang dan mengubah struktur dominan tersebut, sehingga membentuk habitus baru: cara berpikir, berperasaan, dan bertindak bersama yang lebih adil dan manusiawi.

95. Tanggapan *parsial* sama sekali tidak mencukupi untuk menghadapi krisis multidimensi. Kita memerlukan tindakan yang urgen dengan pendekatan holistik dan terpadu yang melibatkan seluruh potensi pemangku kepentingan: pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, media, institusi keagamaan, termasuk Gereja Katolik Indonesia. Hanya dengan nurani yang peka, keberanian untuk menguak kebenaran, dan aksi kolektif yang terarah, Indonesia dapat keluar dari pusaran krisis multidimensi, yang dapat menjadi titik berangkat menuju masa depan yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan.
96. Di tengah kondisi kritis ini, Gereja Katolik Indonesia perlu menyingkap peran panggilan dalam menggagas transformasi hidup bersama secara sinodal menuju masa depan yang dilandasi kebaikan bersama, keadilan, dan kemanusiaan. Gereja mengandalkan keberanian sinodal untuk memulihkan kondisi krisis multidimensi ini. Sebuah upaya terbuka untuk menatap kembali ke sumber nurani bangsa dan meletakkan martabat manusia serta keutuhan alam ciptaan sebagai kompas kebijakan.
97. Dalam terang iman, Gereja melihat kegelisahan moral sebagai tanda karya Roh Kudus yang terus bekerja di tengah sejarah bangsa. Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya. SAGKI V 2025 menegaskan kembali bahwa Allah hadir dan menyapa umat-Nya bukan dalam ruang yang *steril*, melainkan dalam realitas kehidupan yang penuh luka, pergulatan, dan harapan. Roh Kudus terus membangkitkan kesadaran moral, menggerakkan solidaritas sosial, dan menumbuhkan keberanian untuk mencari jalan yang lebih adil dan lebih manusiawi. Karena itu, di balik berbagai krisis yang kita hadapi, kami masih menemukan alasan yang kuat untuk bersyukur.

IV. MENJADI GEREJA YANG SINODAL

A. Perutusan Gereja Indonesia

98. Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa Gereja perlu berada di tengah dunia (*Gaudium et Spes* (= GS) 40)⁷⁸ Agar keberadaannya dan semua yang dilakukannya dapat menampakkan kedatangan Kerajaan Allah di tengah dunia dan kesejahteraan semua bangsa diwujudkan (GS 45).
99. Kehadiran gereja sering dipahami sebagai upaya “melakukan evangelisasi.”⁷⁹ Di tengah dunia yang luka karena dicabik-cabik oleh berbagai bentuk kekerasan, penghancuran, dan ketidakadilan, Gereja dituntut untuk melakukan evangelisasi profetis melalui keterlibatan dalam menegakkan keadilan dan mewujudkan hak-hak asasi manusia.⁸⁰ Sebuah upaya berkelanjutan untuk mentransformasikan dunia menjadi lebih baik. Tindakan ini—oleh Sinode para Uskup sedunia pada 1971—dipandang sebagai unsur konstitutif dari evangelisasi.⁸¹ Gagasan ini berangkat dari kesadaran bahwa evangelisasi yang utuh selalu memperhitungkan interaksi antara Injil dan kehidupan manusia yang konkret—baik dalam ranah pribadi maupun sosial.⁸²
100. Saat ini, Gereja Indonesia—sebagai bagian integral dari bangsa dan negara Indonesia⁸³—juga sedang menghadapi berbagai macam krisis dalam kehidupan. Dalam situasi seperti itu, Gereja tidak boleh berpangku tangan. Gereja perlu berdiri di dalam carut-marut yang ada. Dengan itu, Gereja ikut mengubahnya dari dalam.⁸⁴ Tujuannya adalah agar kondisi ini menjadi lebih baik. Inilah wujud iman yang dimilikinya.⁸⁵
101. Gereja perlu hadir untuk menghidupkan harapan.⁸⁶ Gereja mesti menjadi tempat bagi yang terluka untuk disembuhkan. Gereja juga menjadi ruang kerahiman dan pengampunan bagi yang lemah.⁸⁷ Kaum miskin dan mereka yang kesulitan memiliki hak untuk memperoleh

⁷⁸ Yang dimaksudkan dengan dunia adalah masyarakat manusia beserta segala lingkungan dan sejarahnya (GS, 2).

⁷⁹ *Ad Gentes* 2; Paus Paulus VI, Imbauan Apostolik *Evangelii Nuntiandi* (selanjutnya: EN), 14.

⁸⁰ *Journeying Together Toward the Third Millennium: Statement of the Fifth Plenary Assembly [of the Federation of Asian Bishops' Conferences]* (27 July 1990), 7.2 § 5.

⁸¹ Sinode para Uskup 1971, “Justice in the World”, 6.

⁸² EN, 29; Paus Fransiskus, Imbauan Apostolik *Evangelii Gaudium* (selanjutnya: EG), 181.

⁸³ Nota Pastoral KWI 2018, 1.

⁸⁴ Mgr. Ignatius Suharyo, *The Catholic Way: Kekatolikan dan Keindonesiaan Kita*. Cetakan ke-5 (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2013), hlm. 69.

⁸⁵ Lih. EG, 183.

⁸⁶ SAGKI 2025, 11.

⁸⁷ SAGKI 2025, 11.

perhatian khusus dari Gereja.⁸⁸ Allah menginginkan supaya mereka juga bahagia di dunia ini.⁸⁹

102. Gereja juga perlu menghadirkan kasih, keadilan, dan peradaban yang damai di tengah masyarakat.⁹⁰ Demi tercapainya tujuan ini, Gereja perlu bekerja sama dengan semua orang yang berkehendak baik.⁹¹ Meski demikian, Gereja tetap harus menjadi mitra kritis bagi Pemerintah.⁹²
103. Semua ini menuntut Gereja agar tidak hanya sibuk di altar. Gereja juga dituntut untuk terlibat dalam kehidupan nyata. Itikad berada bersama mereka yang terluka, sekaligus mereka yang sedang mencari harapan.⁹³ Keterlibatan tersebut dilaksanakan dengan berjalan bersama antar anggota Gereja dan anggota masyarakat pada umumnya untuk mendengarkan suara Roh Kudus melalui sesama, terutama mereka yang kecil dan tersisih.⁹⁴
104. Gereja Indonesia perlu menjadi Gereja Sinodal: yang membangun persaudaraan sejati (*communion*), menghidupkan partisipasi (*participation*), dan melaksanakan misi (*mission*). Persaudaraan sejati dibangun tidak hanya antar anggota Gereja Katolik, melainkan juga dengan semua orang kristiani—bahkan dengan seluruh umat manusia dan seluruh ciptaan. Relasi yang intim dengan Roh Kudus mesti menjadi landasan bagi gerakan sinodal ini, yang memungkinkan para murid Yesus menjadi komunitas-komunitas manusiawi yang bertindak sebagai rasi di tengah umat manusia. Gereja juga perlu melibatkan para anggotanya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, yang terwujud dalam kepemimpinan di dalam Gereja sehingga Gereja dapat melaksanakan semua tugas perutusannya di tengah masyarakat. Gereja melaksanakan misi melalui kehadiran di tengah masyarakat manusia demi mewujudkan Kerajaan Allah dalam bentuk kesejahteraan bagi umat manusia dan keutuhan ciptaan.⁹⁵
105. Gereja Indonesia perlu mengembangkan Komunitas Basis Gerejani (KBG) menjadi Komunitas Basis Manusiawi (KBM) agar dapat berfungsi sebagai katalisator gerakan pembaruan di masyarakat Indonesia.⁹⁶ Upaya ini juga sekaligus menjadi sarana pembelajaran untuk bertumbuh menjadi Gereja Sinodal. Lebih lanjut, upaya untuk tumbuh

⁸⁸ Paus Leo XIII, Ensiklik *Rerum Novarum* (untuk selanjutnya: RN), 36.

⁸⁹ EG, 182.

⁹⁰ SAGKI 2025, 16.

⁹¹ SAGKI 2025, 16.

⁹² SAGKI 2025, 17.

⁹³ SAGKI 2025, 16.

⁹⁴ SAGKI 2025, 13.

⁹⁵ FABC 50 Bangkok Document, 16-19. Bdk. Francis, *XVI Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops 2024: Final Document*, 30, 31, 32.

⁹⁶ SAGKI 2025, 45; Lih. FABC 50 Bangkok Document, 148 dan 158.

menjadi Gereja Sinodal juga mesti dilakukan secara aktif dalam membangun kerja sama antarkehuluanan.

106. Komisi Seminari dan Komisi Teologi Konferensi Waligereja Indonesia perlu berdialog dengan semua lembaga pendidikan yang mempersiapkan calon imam di Indonesia (STFT dan Fakultas Teologi) agar kurikulum mereka dapat menyiapkan calon imam menjadi pemimpin Gereja Katolik Indonesia yang sinodal. Dialog yang sama perlu dilakukan dengan semua rumah bina agar program serta proses pembinaan dapat mempersiapkan para calon imam menjadi pemimpin Gereja sinodal.

B. Gereja dan Kohesi Sosial

107. Indonesia kini tengah berhadapan dengan krisis multidimensi yang mengakibatkan merosotnya modal sosial. Kohesi sosial mengalami degradasi. Demokrasi menghadapi ancaman nyata di bawah bayang-bayang militerisme. Padahal, demokrasi hanya efektif dalam negara hukum yang benar dan memiliki pemahaman yang tepat tentang pribadi manusia.⁹⁷ Bayang-bayang patriarki, subordinasi kaum perempuan dalam kehidupan sosial, marginalisasi terhadap kelompok rentan, serta kekerasan, termasuk kekerasan seksual, di lingkungan gereja—dengan pelaku yang beragam, mulai dari klerus hingga awam—masih menjadi tantangan bagi Gereja. Krisis juga menghantam kaum muda.⁹⁸ Mereka juga terjatuh dalam globalisasi yang tidak peduli.⁹⁹ Banyak kaum muda menghadapi keterbatasan pendidikan, akses terhadap pekerjaan yang layak, masalah kesehatan mental, serta kerentanan terhadap godaan untuk menggunakan narkoba.
108. Dalam suasana demikian, Gereja Katolik, dari sisi internal pun, mengalami tantangan yang tak mudah, terutama yang berkaitan dengan layanan pendidikan dan kesehatan. Tekanan untuk ikut arus komersialisasi, himpitan regulasi, dan persaingan pasar mengakibatkan Gereja harus berjuang lebih keras untuk mempertahankan layanan yang menyentuh semua orang, khususnya mereka yang rentan dan papa. Krisis ini juga disertai dengan munculnya sejumlah kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Mirisnya, kasus-kasus yang terjadi di institusi pendidikan yang semestinya menjadi ruang yang aman bagi semua. Fenomena yang menyeruak ke permukaan sangat mungkin hanyalah puncak gunung es. Artinya, kasus-kasus yang tidak terungkap jauh lebih banyak.

⁹⁷ Paus Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus* (CA), 46.

⁹⁸ Bdk. Adolfo Nicolás SJ, "Depth, Universality, and Learned Ministry: Challenges to Jesuit Higher Education Today," Remarks for "Networking Jesuit Higher Education: Shaping the Future for a Humane, Just, Sustainable Globe," Mexico City – April 23, 2010.

⁹⁹ FT, 30.

109. Gereja mesti menunjukkan tanggapan yang memadai terhadap krisis sosial ini. Bila tidak, krisis multidimensi akan menjauhkan Republik dari cita-cita Indonesia Merdeka dan amanat Konstitusi. Kini, kiranya, kita perlu melihat aneka persoalan itu dalam terang ajaran iman Katolik.

Refleksi Teologis

110. Persoalan sosial bukanlah barang baru di muka bumi. Kita ingat bahwa Nabi Amos sudah berhadapan dengan masyarakat yang terus-menerus dinodai oleh perkara-perkara sosial. Nabi Amos bernubuat di tengah masyarakat yang ditandai oleh eksploitasi terhadap kaum papa dan rentan,¹⁰⁰ kemerosotan moral yang parah.¹⁰¹ Celaknya, berbagai persoalan yang berdampak sosial besar itu kemudian dibungkus dengan nama hidup keagamaan.¹⁰² Terhadap mereka yang merusak tatanan sosial, Nabi Amos berani berseru, “*Celakalah!*”¹⁰³
111. Dalam konteks yang berbeda, Yesus pun menghadapi situasi sosial yang sedang mengalami keretakan (kerusakan). Lukas mencatat bahwa Yesus merujuk pada Nabi Yesaya¹⁰⁴ dan menjadikannya program untuk apa yang hendak dilakukan-Nya, yaituewartakan kabar baik bagi yang miskin, pembebasan bagi mereka yang terbelenggu, penglihatan bagi orang buta, dan pada akhirnya menyerukan kabar gembira tahun rahmat Tuhan.¹⁰⁵ Kendatipun kemudian Dia berhadapan dengan cibiran dan kebencian, Yesus tetap berkeliling dan berbuat baik.¹⁰⁶
112. Setia pada warta Kitab Suci, Bunda Gereja yang kudus melanjutkan karya-karya yang secara khusus menunjukkan kepekaan terhadap berbagai persoalan sosial. Gereja secara konsisten menyatakan solidaritas dengan segenap umat manusia yang mengalami kegembiraan, harapan, duka, dan kecemasan.¹⁰⁷ Paus Benediktus XVI menuliskan bahwa menurut kodratnya, Gereja mesti menjalankan tiga tanggung jawab: ewartakan Sabda Tuhan, merayakan Sakramen-sakramen, dan menjalankan karya cinta kasih.¹⁰⁸ Ketiganya berpadu dengan teramat erat sehingga tidak cukup sekadar ewartakan Sabda Tuhan dari mimbar; tak cukup pula bila sekadar merayakan sakramen-sakramen melulu dalam batas penghayatan iman yang eksklusif, bahkan yang privat belaka. Keduanya, agar sungguh menjadi ungkapan dari kodrat Gereja, mesti diiringi dengan karya cinta kasih yang lebih

¹⁰⁰ Bdk. Am. 2:6.

¹⁰¹ Bdk. Am. 2:7.

¹⁰² Bdk. Am. 5:21-25.

¹⁰³ Bdk. Am. 6:1-10.

¹⁰⁴ Yes. 61:1-2.

¹⁰⁵ Bdk. Luk. 4:18-19.

¹⁰⁶ Bdk. Kis. 10:38.

¹⁰⁷ Bdk. GS, 1.

¹⁰⁸ Paus Benediktus XVI, Ensiklik *Deus Caritas Est* (selanjutnya: DCE), 25.

dari sekadar kegiatan berderma, namun mencakup berbagai hal yang menyangkut praktik cinta kasih dalam bentuk konkret dalam konteks kehidupan sosial.

113. Dalam konteks ini, Gereja memiliki tradisi panjang ajaran sosial yang secara formal-institusional terhitung sejak Paus Leo XIII menuliskan Ensiklik Rerum Novarum (RN) pada 1891, yang dilihat sebagai upaya untuk menghubungkan tradisi pemikiran Gereja—dalam hal ini kerangka filosofis-teologis Thomas Aquinas—dengan situasi aktual dunia. Upaya Gereja kemudian berlanjut, bahkan terus merentang hingga diterbitkannya nasihat apostolik Paus Leo XIV, *Dilexi te (Aku telah mengasihimu)*, pada 2025.
114. Pada tataran yang lebih regional, para uskup Asia yang tergabung dalam FABC sadar bahwa hidup menggereja tidak bisa lepas dari konteks persoalan sosial. Kurang lebih 50 tahun sejak mencanangkan dialog dengan pluralitas kultur, agama, dan kaum papa sebagai bentuk adaptasi sosial dalam konteks setempat, mereka kembali mengangkat isu-isu sosial ketika menyebutkan hal-hal yang mewarnai konteks Asia.¹⁰⁹
115. Dengan tradisi refleksi terkait bidang sosial yang demikian kokoh, Gereja Katolik Indonesia pun menegaskan keterlibatannya dalam hidup sosial—dengan mencita-citakan sebuah Gereja yang “merasa dan berbuat bersama dengan masyarakat” serta “bersemangat solid, mandiri, terbuka, dan misioner.”¹¹⁰
116. Gereja Katolik Indonesia sadar bahwa ia berada di tengah masyarakat yang mengalami berbagai krisis (luka) sosial. Kita dapat meringkas berbagai situasi ini dalam satu kata, yaitu *kemerosotan (decline)*. Berangkat dari kesadaran ini, Gereja hendak mengembangkan aneka karya yang membawa serta kemajuan (*progress*) yang menyeluruh. Gereja juga menyadari bahwa situasi sosial yang ada memerlukan proses penebusan (*redemption*).

Arah Pastoral

117. Secara khusus, berkaitan dengan aneka krisis dalam bidang sosial, Gereja, yakni segenap umat beriman, dalam kerja sama dengan semua orang yang berkehendak baik, berkomitmen untuk memberikan kontribusi bagi penguatan modal sosial. Gereja mendorong berbagai upaya untuk menjaga kohesi sosial dan perdamaian. Gereja juga

¹⁰⁹ Yang disebutkan dalam dokumen adalah (1) kaum migran, pengungsi, dan penduduk asli; (2) keluarga sebagai dasar masyarakat; (3) peran perempuan; (4) isu *gender*; (5) kaum muda; (6) teknologi digital; (7) ekonomi; (8) krisis iklim; dan (9) dialog inter-religius. Lih. FABC 50 Bangkok Document, 30.

¹¹⁰ KWI, Pedoman Gereja Katolik Indonesia 1995, hlm. 143-144.

berinisiatif menciptakan ruang-ruang perjumpaan lintas iman, lintas sosial, dan lintas budaya. Usaha merawat persaudaraan sejati. Kepada pemerintah, Gereja menyerukan agar proses demokrasi berjalan dengan tulus pada *rel* yang benar berdasarkan hati nurani. Gereja melawan segala bentuk kekerasan. KWI secara khusus mendorong semua keuskupan untuk memfasilitasi terbentuknya perkumpulan para awam yang mampu menyediakan bantuan hukum struktural bagi mereka yang membutuhkan.

118. Gereja Katolik Indonesia berkomitmen untuk mengupayakan beragam edukasi dan kebijakan terkait kesetaraan dan keadilan gender, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Secara khusus, Gereja Indonesia harus mempercepat penyusunan dan pelaksanaan Protokol Perlindungan Anak dan Orang Dewasa Rentan (*safeguarding*) beserta seluruh kelengkapannya di semua keuskupan, biara, dan dunia pendidikan. Langkah progresif ini menjadi bentuk keterlibatan nyata dalam menjaga martabat manusia, membangun keberpihakan terhadap korban, terutama anak dan perempuan, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi semua.
119. Berkaitan dengan anak muda, Gereja perlu meningkatkan revitalisasi dan optimalisasi berbagai wadah pembinaan yang telah ada selama ini. Layanan publik dalam bidang pendidikan dan kesehatan—yang memang terjepit di antara dorongan pasar kapitalis untuk bersaing sembari menanggung konsekuensi biaya layanan yang terus naik dan visi Katolik—mesti dibenahi agar visi Katolik dapat berjalan beriringan dengan kualitas yang tak kalah dari mereka yang bergerak sepenuhnya dalam kerangka kapitalis. Akhirnya, mengingat bahwa konteks sosial Indonesia diwarnai oleh beragam kultur lokal, perlu pula dilakukan upaya untuk menggali tradisi lokal secara serius dan menempatkannya dalam kerangka dialektik dengan ajaran Katolik.
120. Gereja perlu mereformasi layanan pendidikan dan kesehatan Katolik agar tetap menjadi “rumah bagi semua”. Sekolah, kampus, klinik, dan rumah sakit Katolik perlu menegaskan kembali identitasnya sebagai “karya misi”, bukan semata-mata sebagai institusi yang bersaing dalam logika pasar. Pembenahan mutu memang perlu, tetapi harus berjalan bersama dengan keberpihakan kepada yang miskin. Karena itu, Gereja perlu mengembangkan skema subsidi silang, beasiswa, dan dana solidaritas pasien miskin. Gereja juga perlu memperkuat kemitraan dengan pemerintah dan lembaga sosial lainnya. Tata kelola profesional dan terkoordinasi secara kelembagaan, transparansi keuangan, serta evaluasi berkala atas akses kaum miskin terhadap pendidikan dan kesehatan mesti menjadi bagian dari perhatian Gereja.

121. Gereja Katolik Indonesia perlu benar-benar berjalan bersama masyarakat adat di pedalaman agar mereka dapat mempertahankan hak atas tanah leluhur.¹¹¹ Dengan itu, mereka dapat merawat ruang hidup dan keluhuran budaya asli mereka.¹¹² Gereja memandang mereka sebagai tempat pewahyuan diri Allah secara penuh (bdk. GS 58) dan sekaligus sebagai subjek evangelisasi.¹¹³ Karena itu, Gereja perlu memastikan evangelisasi dilaksanakan melalui inkulturasi agar kebaikan Allah semakin dapat dialami.¹¹⁴
122. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) perlu membuka “Sekretariat Papua” sebagai pusat penanganan krisis. Sekretariat juga menjadi arena untuk bekerja sama dengan berbagai pihak guna memfasilitasi penyelesaian krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di Tanah Papua. Melalui sekretariat ini, Gereja dapat membangun kepercayaan para pihak untuk mewujudkan dialog yang damai di Tanah Papua. Pusat penanganan krisis serupa juga diharapkan terbentuk di tingkat keuskupan dan provinsi gerejani untuk menyikapi dinamika krisis di wilayah masing-masing.

C. Gereja dan Kemajuan Teknologi

123. Perkembangan teknologi informasi, terutama yang kini muncul dalam kecanggihan akal imitasi/artificial intelligence (AI), membawa perubahan besar dalam kehidupan bermasyarakat. Sayangnya, tak semua perubahan itu positif. Banyak di antaranya bersifat disruptif, bahkan merendahkan martabat manusia. Seiring dengan perkembangan AI, kejahatan siber mengalami peningkatan dalam bentuk-bentuk seperti eksploitasi perempuan, anak dan kaum muda. Ancaman lain juga muncul terkait pembentukan opini publik, seperti disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Lantaran adanya kontrol atas informasi berdasarkan perhitungan algoritma, kontrol atas opini publik pun dilakukan dengan memanfaatkan perhitungan algoritma. Ironisnya lagi, akses terhadap kemajuan teknologi komunikasi tidak merata. Masih banyak masyarakat Indonesia di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang tidak memiliki akses memadai ke dunia digital,

¹¹¹ Federation of Asian Bishops' Conferences Seventh Plenary Assembly (2000). *A Renewed Church in Asia: A Mission of Love and Service*. Part III. No. 4 dalam Franz-Josef Eilers, SVD (Ed.), *For All the Peoples of Asia: Federation of Asian Bishops' Conferences Documents from 1997 to 2001*. Volume 3. Quezon City: Claretian Publications, 2002, hlm. 11; SAGKI 2025, 39 & 40.

¹¹² *Ujud Gereja Indonesia*, Maret 2026.

¹¹³ Federation of Asian Bishops' Conferences' Office of Evangelization. “Evangelization Among the Indigenous Peoples of Asia (1995)” dalam Franz-Josef Eilers, SVD. (Ed.), *For All the Peoples of Asia: Federation of Asian Bishops' Conferences Documents from 1992-1996*. Volume 2 (Quezon City: Claretian Publications, 1997), hlm. 212.

¹¹⁴ Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Ensiklik *Redemptoris Missio* (selanjutnya: RM), 52.

sehingga semakin terpuruk dibandingkan warga yang tinggal di kawasan yang lebih maju.

Refleksi Teologis

124. Bersama dengan Bunda Gereja yang kudus, kita diajak untuk menghadapi disrupsi dengan menggali khazanah kebijaksanaan yang telah lama berkembang dalam tradisi iman maupun beragam kebijaksanaan baru.¹¹⁵ Sejak awal mula, Tuhan menganugerahkan kecerdasan akal budi agar melalui hal itu manusia dapat melakukan banyak hal yang membuat kemanusiaannya berpendar mulia.¹¹⁶ Dengan demikian, semestinya manakala akal budi telah sampai pada titik yang semakin hari semakin canggih dan mutakhir, manusia pun semakin mengalami hidup yang lebih penuh, sesuai dengan yang dikehendaki Allah.¹¹⁷
125. Persoalan justru muncul ketika dampak perkembangan AI ternyata mengancam martabat manusia.¹¹⁸ Untuk itu, kita perlu secara tegas memilah perbedaan antara kecerdasan yang terdapat dalam diri manusia dan kecerdasan artifisial (AI) yang bila tak dimanfaatkan secara bijak akan mengikis kecerdasan manusia. Kecerdasan yang dianugerahkan Allah kepada manusia senantiasa memiliki keterikatan erat dengan “kebertubuhan” sekaligus terarah pada kebenaran sejati, yaitu Allah sendiri. AI hanya mampu memiliki kecerdasan sejauh itu berdasarkan perhitungan algoritma yang membaca pola-pola tertentu. AI tak berelasi dengan tubuh fisik maupun beragam emosi manusia. AI juga tidak memiliki dambaan untuk mengetahui kebenaran sejati.
126. Dengan demikian, semestinya perkembangan teknologi dibarengi dengan etika yang memadai guna memastikan serangkaian pencapaiannya dapat mendukung martabat manusia. Untuk itu, pertama-tama, yang perlu terus-menerus dipromosikan adalah tanggung jawab moral yang didasarkan pada martabat dan panggilan pribadi manusia.¹¹⁹ Kriteria yang harus selalu digunakan dalam mengembangkan AI maupun pemanfaatannya adalah martabat manusia yang mencakup martabat ontologis, moral, sosial, dan eksistensial.¹²⁰

Arah Pastoral

¹¹⁵ Dikasteri untuk Ajaran Iman & Dikasteri untuk Kebudayaan dan Pendidikan, *Antiqua et Nova* (untuk selanjutnya: AN), 1; bdk. Mat. 13:52.

¹¹⁶ Bdk. Sir. 38:6.

¹¹⁷ Bdk. Yoh. 10:10.

¹¹⁸ Bdk. AN, 38; MH, 99; juga KWI, *Pedoman Gereja Katolik Indonesia 1995*, hlm. 16.

¹¹⁹ Bdk. AN, 39; juga Konsili Vatikan II, Dekrit tentang Upaya-upaya Komunikasi Sosial, *Inter Mirifica* (IM), 8-12.

¹²⁰ Bdk. DI, 7; MH, 51-53.

127. Mengingat mendesaknya tantangan yang dibawa oleh perkembangan teknologi—terutama oleh desakan AI—Gereja Katolik Indonesia, yakni segenap umat beriman, dalam kerja sama dengan semua orang yang berkehendak baik, berniat untuk berpartisipasi dalam menciptakan ruang digital yang aman dan memuliakan martabat manusia. Selanjutnya, niat itu akan diiringi pula dengan aneka upaya edukasi kepada banyak orang agar memanfaatkan AI dengan bijak demi hal-hal yang semakin menjunjung martabat manusia.
128. Secara khusus, Gereja mengajak agar teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian maju menjadi sarana untuk membangun relasi manusiawi yang semakin mendalam. Perkembangan teknologi hendaklah tidak sampai membuat kaum yang memiliki kemampuan kerja terbatas (kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel) menjadi tersingkir lantaran tergantikan oleh mesin dan memiliki akses geografis yang terbatas. Daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) harus menjadi bagian dari pemerataan akses terhadap informasi. Pemanfaatan AI dalam dunia pendidikan pun semestinya tidak menggeser proses belajar yang berbasis pada kecerdasan alami (natural) manusia. Kemajuan teknologi hendaknya membantu manusia agar mampu membuat keputusan yang semakin tepat dan manusiawi. Secara spesifik, pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama menyangkut peperangan dan rekrutmen karyawan, hendaknya tidak diserahkan secara buta pada algoritma komputasi.
129. Gereja perlu mengadakan pendidikan etika digital kritis bagi umat agar mereka dapat menggunakan media sosial (medsos) secara bertanggung jawab. Gerakan ini dapat dilakukan di berbagai ranah: mulai dari paroki, sekolah, kampus, komunitas basis, orang muda Katolik (OMK), keluarga, hingga lembaga Gereja. Pendidikan tersebut bertujuan untuk membantu mereka memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi, mengenali hoaks, memahami cara kerja algoritma, menjaga privasi dan keamanan data, menghindari ujaran kebencian, melawan perundungan daring, serta mengenali bahaya kekerasan berbasis online seperti pelecehan seksual dan *deepfake*. Literasi digital tidak boleh hanya sampai pada kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat, tetapi juga harus membentuk kebijaksanaan, pengendalian diri, dan tanggung jawab moral di ruang digital.
130. Di tengah budaya digital yang melahirkan kesepian dan keterasingan, Gereja dipanggil untuk menjadi “rumah sakit lapangan.” Di sini, Gereja dapat memperlihatkan dirinya sebagai: rumah perjumpaan, komunitas yang mendengarkan, tempat penyembuhan luka batin, ruang dialog lintas generasi, serta komunitas yang memulihkan relasi manusiawi.

131. Akhirnya, Gereja hendak mendorong pihak pemerintah untuk membuat regulasi dan menegakkannya: di satu sisi, menjamin keamanan warga negara dalam memanfaatkan teknologi komunikasi; di sisi lain, menciptakan ekosistem digital yang aman tanpa melanggar privasi warga negara dan tanpa tindakan pembungkaman represif ketika warga negara memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan kritik.

D. Gereja dan Tantangan Ekonomi

132. Dalam bidang ekonomi, kita menghadapi kenyataan yang sangat memprihatinkan. Di tengah pertumbuhan dan berbagai capaian makroekonomi, ketimpangan struktural yang terus berlangsung, khususnya terkait akses terhadap tanah, ancaman kelangkaan dan kenaikan harga pangan, serta persoalan modal, pekerjaan yang layak, upah yang adil, pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan ruang hidup yang aman.¹²¹ Kondisi ini mengakibatkan petani kecil, nelayan, buruh, pekerja migran, pelaku usaha mikro, perempuan dan keluarga miskin bukan hanya tertinggal dari hasil pembangunan, tetapi juga semakin rentan terhadap eksploitasi dan peminggiran. Situasi makin buruk karena kebijakan negara lebih mudah berpihak kepada kekuatan modal daripada kepada kesejahteraan bersama.

Refleksi Teologis

133. Krisis ekonomi tidak pernah semata-mata menyangkut persoalan teknis produksi, distribusi, dan konsumsi. Di dalamnya tampak luka yang lebih dalam, yakni rusaknya relasi manusia dengan Allah, sesama, dan dunia ciptaan ketika karunia bumi diperlakukan seolah-olah milik mutlak segelintir orang.¹²² Manusia—terutama yang lemah—direduksi menjadi angka, alat produksi, atau beban pembangunan.¹²³ Karena itu, krisis ekonomi yang kita hadapi perlu dibaca sebagai persoalan moral dan spiritual. Situasi ini menuntut penegasan kembali martabat manusia serta tujuan sosial dari seluruh kegiatan ekonomi.
134. Gereja memandang dunia ekonomi dari misteri Yesus Kristus, Sabda yang menjadi daging dan masuk ke dalam sejarah manusia yang

¹²¹ Bdk. Paus Paulus VI, *Populorum Progressio*, 9, 14; Paus Fransiskus, *Evangelii Gaudium*, 53–56; Paus Benediktus XVI, *Caritas in Veritate*, 21–22; Paus Pius XI, *Quadragesimo Anno*, 57–58, 105; Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*, 192–196; Konferensi Waligereja Indonesia, *Nota Pastoral 2006: Habitus Baru – Ekonomi yang Berkeadilan bagi Semua*, bagian tentang komersialisasi yang meluas dan masalah kebijakan publik; Paus Leo XIV, *Dilexi te*, 93; Paus Yohanes Paulus II, *Sollicitudo Rei Socialis*, 36–37.

¹²² Kondisi ini terjadi akibat ketidakseimbangan relasi kuasa dan peran di antara tiga pilar aktor: Negara – Dunia Usaha – Masyarakat, di mana Negara terlalu mendominasi dalam menentukan orientasi kebijakan publik.

¹²³ Bdk. Kel. 3:7–10; Im. 19:13; Ul. 24:14–15; Yes. 58:6–10; Yak. 5:1–6; Yohanes Paulus II, *Laborem Exercens*, 6–9; *Sollicitudo Rei Socialis*, 36–37; Kej. 1:28–31; Kej. 2:15.

konkret. Putra Allah hadir bukan dari pusat kemapanan, melainkan melalui jalan inkarnasi yang dekat dengan kehidupan kaum kecil. Dialah yang dilahirkan dalam kesederhanaan, bertumbuh dalam keluarga pekerja, hidup di tengah rakyat, danewartakan Kerajaan Allah sebagai kabar baik bagi orang miskin dan yang tersingkir. Oleh karena itu, Kristus bukan hanya mengajarkan belas kasih, melainkan juga menyingkapkan ukuran penghakiman Allah atas sejarah: *bahwa apa pun yang dilakukan atau diabaikan terhadap saudara yang paling kecil, itulah yang dilakukan atau diabaikan terhadap Dia*.¹²⁴ Setiap tata ekonomi yang merendahkan martabat pekerja, menyingkirkan kaum kecil, atau menutup akses terhadap sarana hidup yang layak pasti bertentangan dengan logika Kerajaan Allah.

135. Gereja adalah persekutuan umat Allah yang dipanggil menjadi tanda dan sarana kasih Allah di tengah sejarah. Karena itu, Gereja tidak dapat berdiam diri di hadapan ketidakadilan ekonomi. Allah tidak hanya dimuliakan melalui doa dan perayaan liturgi, tetapi juga melalui tindakan yang meningkatkan martabat hidup kaum miskin sebagai tempat kehadiran Allah.¹²⁵ Ekaristi yang dirayakan menuntut agar roti yang dipecah di altar berbuah dalam solidaritas, keadilan, dan pembelaan bagi mereka yang terluka dalam kehidupan sosial.¹²⁶ Pilihan preferensial bagi kaum miskin bukan unsur tambahan, melainkan konsekuensi dari jati diri Gereja itu sendiri. Ketika Gereja berjalan bersama buruh, petani, nelayan, pekerja migran, keluarga miskin, dan mereka yang tersingkir, Gereja serentak menampakkan diri sebagai Tubuh Kristus yang hidup. Di dalamnya, ada persekutuan yang menyembuhkan, suara kenabian yang menegur, dan sakramen harapan bagi yang lemah.
136. Agar dapat berjalan bersama “kaum miskin” — buruh, petani, nelayan, pekerja migran, perempuan, keluarga miskin, dan mereka yang tersingkir — Gereja Indonesia perlu melaksanakan ajakan Federasi Para Waligereja Asia (FABC) sejak berdirinya pada 1970 dalam salah satu resolusi mereka.¹²⁷ Hal ini ditekankan kembali dalam Sidang Paripurna FABC pertama pada 1974,¹²⁸ Sidang Paripurna FABC ke-10 pada

¹²⁴ Bdk. Mat. 25:31–46; Luk. 4:16–21; Paus Leo XIV, Nasihat Apostolik *Dilexi te*, 16, 71; EG, 186–201; FT, 187; Paus Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 25; GS, 67.

¹²⁵ Bdk. Paus Fransiskus, Imbauan Apostolik *Gaudete et Exsultate*, 104.

¹²⁶ *Dilexi te*, 7–9; Kis. 2:42–47; 1Kor. 11:20–29; EG, 187–188; FT, 116, 180; GS, 1.

¹²⁷ *Asian Bishops' Meeting: Message and Resolution of the Asian Bishops' Meeting (Manila, 29 November 1970)*, dalam Gaudencio Rosales, D.D. and C.G. Arévalo, S.J. (Eds.), *For All the Peoples of Asia: Federation of Asian Bishops' Conferences Documents from 1970 to 1991*. Vol. 1. Second Printing (Quezon City: Claretian Publications, 1997), 19, hlm. 5.

¹²⁸ *Statement and Recommendations of the First Plenary Assembly [of the Federation of Asian Bishops' Conferences]: Briefer Statement of the Assembly*, 18.

2012,¹²⁹ dan Sidang Paripurna FABC ke-11 pada 2016,¹³⁰ serta ditegaskan kembali oleh mendiang Paus Fransiskus,¹³¹ yakni “Gereja miskin dan Gereja bagi kaum miskin.” Artinya, Gereja di mana orang kaya dan orang miskin menghidupi semangat kemiskinan Injili, menaruh solidaritas dengan kaum miskin, melakukan *preferential option for the poor*, berusaha keras membela hak asasi dan martabat mereka, serta berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi mereka.¹³²

137. Roh Kudus adalah Roh kehidupan, Roh persekutuan, dan Roh kenabian.¹³³ Roh Kudus membebaskan manusia dari perhambaan kepada berhala kekayaan, ketakutan, dan sikap acuh tak acuh. Dia juga membangunkan kepekaan nurani, memampukan Gereja membaca tanda-tanda zaman dengan kebijaksanaan. Di bawah bimbingan Roh, ekonomi tidak lagi dilihat semata-mata sebagai arena persaingan dan akumulasi, melainkan sebagai ruang pelayanan, kerja sama, kreativitas, dan tanggung jawab bersama demi kehidupan. Maka, pembaruan ekonomi yang sejati menuntut pertobatan hati sekaligus keberanian membangun struktur yang lebih adil, partisipatif, dan berpihak pada kesejahteraan umum.

Arah Pastoral

138. Bertolak dari terang iman Katolik, arah pastoral ekonomi pertama-tama harus memulihkan hati nurani dan cara pandang umat terhadap kerja, harta, dan kesejahteraan bersama. Pewartaan, katekese, homili, pendidikan, pembinaan kategorial, serta formasio calon imam dan religius harus difokuskan pada Ajaran Sosial Gereja, agar umat menyadari bahwa mengikuti Kristus juga berarti menghormati martabat kerja, menolak korupsi, melawan perdagangan orang, membela upah adil, dan mengembangkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari.¹³⁴
139. Dari pembaruan cara pandang itu, setiap keuskupan perlu membentuk atau memperkuat tim pastoral ekonomi yang bekerja secara kolaboratif lintas komisi dan dikoordinasikan oleh Komisi PSE. Sedangkan di tingkat paroki, tim serupa dapat dibentuk untuk memetakan persoalan ekonomi umat dan masyarakat di sekitar paroki. Dengan pemetaan ini,

¹²⁹ FABC X, 11, 20, 30.

¹³⁰ FABC XI, 4.

¹³¹ EG, 198.

¹³² Lih. XI FABC Plenary Assembly, *The Catholic Family in Asia: Domestic Church or the Poor and a Mission of Mercy*, 4, 21; dalam Vimal Tirimanna, CSsR (Ed.), *For All the Peoples of Asia: Federation of Asian Bishops' Conferences Documents from 2012-2016*. Volume 6 (Quezon City: Claretian Communications Foundation, Inc., 2017), hlm. 13; 23; bdk. Francis, *XVI Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops 2024: Final Document*, 19.

¹³³ Bdk. Kej. 1:2; Mzm. 104:30; Kis. 2:1–11; 1Kor. 12:4–11.

¹³⁴ Bdk. LE 6, 18; EG, 183–185; *Dilexi te*, 8–9.

pelayanan Gereja tidak berhenti pada bantuan sesaat, melainkan menuju perjumpaan, pemberdayaan, dan advokasi.

140. Gereja dipanggil untuk hadir lebih dekat dengan buruh, petani, nelayan, pekerja migran, perempuan, keluarga miskin, dan mereka yang tersingkirkan. Gereja perlu mendengarkan pengalaman mereka. Gereja juga perlu memperkuat organisasi dan jejaring solidaritas. Dengan itu, Gereja mampu membela hak-hak mereka di ruang publik.¹³⁵ Dengan demikian, Gereja dapat menjalankan karya karitatif, pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan, pendidikan warga, dan advokasi kebijakan sebagai satu kesaksian iman yang utuh, bukan sebagai pelayanan yang terpisah-pisah. Gereja perlu mendorong pengembangan *Credit Union (CU)* sebagai wadah perekonomian umat untuk melawan bahaya “pinjol” (pinjaman online) dan praktik rentenir.
141. Mendengarkan ajakan FABC serta Paus Fransiskus, Gereja Indonesia perlu menjadi “Gereja miskin dan Gereja bagi kaum miskin”.¹³⁶ Sebagai cara untuk mewujudkan hal itu, Gereja perlu mengutamakan peningkatan kualitas hidup para anggotanya melalui pendidikan. Gereja juga perlu memperhatikan kualitas hidup warga masyarakat setempat. Upaya tersebut lebih daripada sekadar membangun gedung-gedung mewah yang menghabiskan dana besar, jauh melebihi kemampuan umat dan masyarakat setempat, dan mestinya dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Berkaitan dengan hal ini, Gereja Indonesia perlu memperhatikan peringatan keras Paus Fransiskus: “Setiap komunitas Gereja, jika berpikir bisa nyaman dengan caranya sendiri tanpa memiliki keprihatinan kreatif serta kerja sama efektif untuk membantu orang-orang miskin hidup bermartabat dan tanpa ada yang dikucilkan, akan berisiko mengalami kehancuran, betapapun banyak berbicara tentang masalah-masalah sosial atau mengecam pemerintah.”¹³⁷
142. Gereja Indonesia juga perlu mengurangi ketergantungan pada ekonomi eksternal dengan memperkuat kemandirian ekonomi keuskupan, tata kelola yang transparan, pengembangan aset produktif, serta pengelolaan dana sosial yang akuntabel. Gereja perlu membangun kemandirian ekonomi agar kekuatan politik dan ekonomi tidak dapat menekan suara kenabiannya.

¹³⁵ Bdk. *Nota Pastoral 2006: Habitus Baru – Ekonomi yang Berkeadilan bagi Semua*, 30; *Dilexite*, 10, 71, 94; GS, 74–75; *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*, 389 – 406.

¹³⁶ *Message and Resolutions of the Asian Bishops' Meeting* (29 November 1970), 19; *Final Reflections of the First Bishops' Institute for Social Action* (BISA I, 1-15 March 1974), 7; *Letter of Participants of the Second Bishops' Institute for Missionary Apostolate* (BIMA II, 30 November 1980), 12; *Final Reflections and Resolutions of the Fifth Bishops' Institute for Social Action* (BISA V, 21 May to 1 June 1979), 13; dan EG, 198; EG, 198. Lihat juga poin nomor 137 di atas.

¹³⁷ EG, 207.

143. Pada saat yang sama, Gereja perlu menumbuhkan budaya sinodal yang melibatkan keluarga, paroki, sekolah, komunitas basis, tarekat religius, orang muda, kalangan profesional, pelaku usaha, serta komunitas lintas iman dalam tanggung jawab bersama.
144. Kepada pemerintah, kami menyerukan agar pembangunan sungguh diarahkan kepada keadilan ekonomi, kesejahteraan umum, dan perlindungan terhadap mereka yang lemah. Kepada dunia usaha, kami mengajak agar keuntungan dicari dalam bingkai etika, penghormatan terhadap pekerja, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Kepada masyarakat luas, kami menegaskan pentingnya budaya kejujuran, solidaritas, dan partisipasi warga.¹³⁸ Dengan jalan demikian, Gereja ikut menumbuhkan habitus ekonomi yang lebih adil, manusiawi, dan berakar pada martabat setiap pribadi.

E. Gereja dan Keadilan Ekologi

145. Dalam bidang ekologi, kita menghadapi krisis yang semakin nyata dan berkaitan erat dengan luka sosial. Sederet krisis ini nampak dalam deforestasi, pencemaran sungai dan laut, kerusakan tanah, polusi udara, persoalan sampah, termasuk sampah makanan dan plastik, serta pertambangan dan perkebunan yang eksploitatif. Belum lagi, perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem tidak hanya menunjukkan rusaknya relasi manusia dengan ciptaan, tetapi juga secara langsung melukai kesehatan keluarga, ketahanan pangan, ketersediaan air, keamanan ruang hidup, serta masa depan generasi mendatang.¹³⁹ Kaum miskin, masyarakat adat, komunitas pesisir, petani, nelayan, perempuan, anak-anak, dan generasi muda menjadi pihak yang menanggung akibat krisis ini.

Refleksi Teologis

146. Krisis ekologis tersebut menunjukkan bahwa persoalan tidak dapat dipahami hanya sebagai urusan teknis lingkungan. Yang terluka ialah tata relasi yang paling mendasar: manusia tidak lagi hidup sebagai penerima karunia, melainkan bertindak sebagai pemilik mutlak yang merasa berhak menguasai bumi tanpa batas. Padahal, dalam terang iman, dunia bukan benda netral yang boleh diperas sesuka hati. Ciptaan berasal dari kasih Allah, ditopang oleh kebijaksanaan-Nya, dan dinyatakan sungguh amat baik. Sementara manusia ditempatkan di

¹³⁸ Bdk. Paus Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 14, 33; Paus Benediktus XVI, Ensiklik *Caritas in Veritate*, 30, 32, 36, 40-41; FT, 94 – 95, 180; GS, 30; EG, 57 – 58; *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*, 333-335.

¹³⁹ Bdk. Paus Fransiskus, Ensiklik *Laudato Si'* (untuk selanjutnya: LS), 1-3, 11-15, 17-31 48-52, 137-139; Paus Fransiskus, Nasihat Apostolik *Laudate Deum*, 1-3, 11-15, 31-36; Paus Fransiskus, Nasihat Apostolik Pasca-Sinodal *Querida Amazonia*, 8-14, 49-55.

dalamnya *hanya* untuk mengusahakan dan memeliharanya, bukan untuk merusaknya.¹⁴⁰ Karena itu, krisis ekologis harus dibaca sebagai krisis moral dan spiritual yang terjadi secara bersamaan. Krisis yang menuntut pertobatan ekologis meliputi pertobatan batin (*personal*), perubahan cara hidup bersama (*komunal*), dan perubahan orientasi kebijakan (*struktural*).

147. Krisis sampah dan plastik merupakan tanda berkembangnya budaya konsumtif dan budaya membuang (makanan) yang semakin menjauhkan manusia dari tanggung jawab terhadap ciptaan. Penumpukan sampah, pencemaran sungai dan laut, serta penggunaan plastik sekali pakai telah merusak lingkungan hidup dan mengancam kesehatan manusia. Bahkan, meningkatnya limbah makanan dari berbagai program pengadaan konsumsi massal semakin memperbesar persoalan tersebut. Dalam semangat ekologi integral, Gereja memandang bahwa krisis ekologis dan krisis kemanusiaan merupakan dua kenyataan yang saling berkaitan erat. Di sini, kerusakan lingkungan selalu berdampak pada kehidupan manusia, terutama pada kelompok kecil dan rentan. Situasi ini menunjukkan bahwa budaya membuang tidak hanya tampak dalam penggunaan plastik, tetapi juga dalam pola konsumsi makanan yang berlebihan dan kurang bertanggung jawab. Kesadaran akan keadilan ekologis menegaskan bahwa seluruh ciptaan memiliki martabat dan perlu dirawat sebagai rumah bersama.
148. Seluruh ciptaan menemukan pusat dan tujuannya dalam Kristus. Di dalam Dia, segala sesuatu diciptakan, diperdamaikan, dan diarahkan kepada kepenuhan-Nya. Maka, misteri Kristus tidak hanya menyentuh keselamatan manusia secara individual, tetapi juga mempunyai horizon kosmis: Ia merangkul ciptaan yang terluka oleh dosa dan mengarahkannya kepada pembaruan.¹⁴¹ Dalam Yesus, manusia belajar kembali untuk hidup di dunia sebagai anak, bukan sebagai pemilik mutlak; sebagai saudara, bukan sebagai penguasa sewenang-wenang. Karena itu, merusak bumi berarti melawan arah pendamaian yang dikerjakan Kristus, sedangkan merawat ciptaan merupakan bagian dari kesetiaan kepada Dia yang di dalam-Nya segala sesuatu dipersatukan.
149. Gereja dipanggil untuk menjadi sakramen rekonsiliasi: dengan Allah, sesama, dan ciptaan. Gereja adalah rumah dan sekolah persekutuan yang melatih umat untuk mengalami dunia sebagai rumah bersama, bukan sebagai ladang perebutan tanpa batas. Liturgi menumbuhkan syukur atas karunia ciptaan; katekese membentuk tanggung jawab moral; komunitas basis melatih disiplin hidup sederhana; dan pelayanan

¹⁴⁰ Bdk. Kej. 1:26–31; Kej. 2:15; Mzm. 24:1; Kej. 1:31; Mzm. 104:24–30; Kol. 1:15–20; LS, 66–69, 83, 87, 96, 115 – 121, 217 – 221.

¹⁴¹ Bdk. Rm. 5:12–21; 1Kor. 15:21–22, 45–49; GS, 22; Kol. 1:15–20; LS, 217–221.

sosial mempertemukan pembelaan terhadap kaum miskin dengan pemulihan lingkungan hidup.¹⁴² Dengan demikian, ekologi integral bukan agenda tambahan, melainkan ungkapan konkret dari hakikat Gereja sebagai umat Allah yang berjalan bersama seluruh ciptaan menuju kepenuan Allah.

150. Roh Kudus adalah Tuhan yang menghidupkan, Roh yang memenuhi bumi dan memperbarui muka bumi.¹⁴³ Di bawah bimbingan Roh, Gereja belajar mendengarkan jeritan bumi, membaca luka sosial-ekologis dengan kebijaksanaan, dan membedakan jalan-jalan pertobatan yang konkret. Roh Kudus membangunkan rasa hormat, sikap ughari, pengendalian diri, dan sukacita dalam hidup sederhana. Ia menuntun Gereja agar tidak berhenti pada seruan moral, melainkan melahirkan *praksis* yang menyembuhkan. Ia mengasah solidaritas Gereja terhadap komunitas yang terdampak, menggerakkan semangat pemulihan lingkungan, dan mempertajam keberanian untuk menegur kekuatan yang merusak rumah bersama demi keuntungan jangka pendek.

Arah Pastoral

151. Bertolak dari terang iman tersebut, arah pastoral ekologis tidak boleh dipahami sebagai tambahan belaka dalam kehidupan menggereja, melainkan sebagai ungkapan konkret dari pertobatan iman. Gereja Indonesia perlu mendorong pengembangan “eko-teologi” dalam kurikulum pendidikan teologi. Gereja perlu menginternalisasikan “ekologi integral” ke dalam homili, katekese, pendidikan iman, keluarga, sekolah, seminari, rumah formasi, karya sosial, dan praktik liturgis. Upaya-upaya di atas akan mendorong umat untuk melihat bahwa menjaga keseimbangan ekosistem air, tanah, hutan, laut, dan udara merupakan bagian dari kasih kepada Pencipta dan sesama.¹⁴⁴
152. Karena itu, Gereja memandang pengurangan sampah makanan sebagai langkah penting dalam pertobatan ekologis. Gereja mendorong umat, keluarga, paroki, sekolah, dan komunitas untuk mengendalikan budaya hidup konsumtif. Umat perlu membiasakan diri untuk memilah dan mengolah sampah rumah tangga. Gereja perlu mendukung gerakan daur ulang dan ekonomi sirkular. Habitus ekologis perlu dibangun sejak dalam keluarga hingga dalam kehidupan menggereja di lingkungan dan paroki. Pengembangan pendidikan ekologis juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Rumah pembinaan calon imam dan religius diharapkan tidak sekadar mengajarkan, tetapi juga menghidupi dan menjadi model ekologi integral, sehingga habitus ekologis dapat direplikasi secara luas.

¹⁴² Bdk. Rm. 8:19–23; LS, 13, 62, 202–227; EG, 87, 183; FT, 17, 117.

¹⁴³ Bdk. Mzm. 104:24–30; Rm. 8:19–23; LS, 202–208, 217–221; *Laudate Deum*, 66–69.

¹⁴⁴ Bdk. LS, 23 – 42, 49, 137–162, 202–215, 216–227, 231; *Laudate Deum*, 57, 68–69.

Institusi Gereja ,sebagai ruang yang ramah lingkungan dan bebas dari budaya membuang.¹⁴⁵

153. Deforestasi, alih fungsi lahan, dan pembangunan berskala besar sering kali merusak hutan, mengurangi sumber air, menimbulkan bencana ekologis, serta menyingkirkan masyarakat adat dan komunitas lokal dari ruang hidup mereka. Pembangunan yang mengabaikan keseimbangan ekologis dan partisipasi masyarakat memperdalam ketidakadilan sosial. Gereja menegaskan bahwa pembangunan sejati harus menghormati martabat manusia dan kelestarian ciptaan. Hal ini diwujudkan dengan mendukung perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati, memperjuangkan hak masyarakat adat, mendorong kebijakan yang transparan dan partisipatif, mendampingi korban konflik lahan, serta membangun dialog kritis dengan pemerintah dan pelaku usaha demi kebaikan bersama.¹⁴⁶
154. Gereja perlu memfasilitasi dialog kritis antara pemerintah dan masyarakat setempat agar Program Strategis Nasional (PSN) di semua daerah tidak merugikan masyarakat setempat, merusak lingkungan hidup, dan menghancurkan budaya lokal. Gereja menolak semua bentuk intervensi pembangunan yang mengancam keberlanjutan hidup komunitas (masyarakat) lokal.
155. Semangat ekologi integral menolak praktik pertambangan dan perkebunan eksploitatif yang sering menimbulkan pencemaran, perampasan tanah, kerusakan ekosistem, konflik sosial, serta pemiskinan masyarakat lokal. Pengejaran keuntungan tanpa batas telah menjadikan alam dan manusia sekadar objek ekonomi, padahal bumi beserta segala isinya diperuntukkan bagi kesejahteraan seluruh umat manusia. Gereja dipanggil untuk: berpihak kepada masyarakat yang terdampak oleh kerusakan ekologis dan konflik agraria; menolak praktik ekonomi yang merusak ciptaan dan martabat manusia; mendorong pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan; mendukung penguatan ekonomi lokal berbasis komunitas; serta memberikan pendampingan pastoral dan advokasi bagi korban eksploitasi lingkungan.¹⁴⁷
156. Perubahan iklim menimbulkan bencana ekologis yang semakin sering dan semakin berat, seperti banjir, kekeringan, gagal panen, cuaca ekstrem, dan kenaikan suhu Bumi. Dampaknya paling dirasakan oleh kaum miskin yang sulit melindungi diri dan mempertahankan hidup.

¹⁴⁵ Bdk. Dikasteri untuk Memajukan Pembangunan Manusia Seutuhnya dan Dikasteri untuk Awam, Keluarga, dan Kehidupan, *Ekologi Integral dalam Kehidupan Keluarga* (Jakarta: Departemen Dokpen KWI, 2025), hlm. 15, 22-27.

¹⁴⁶ *Ekologi Integral dalam Kehidupan Keluarga*, hlm. 21 – 23.

¹⁴⁷ Bdk. *Ekologi Integral dalam Kehidupan Keluarga*, hlm. 22 – 24.

Krisis iklim menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan terkait dengan krisis sosial, ekonomi, moral, dan spiritual serta tanggung jawab manusia terhadap kehidupan. Gereja mengajak umat mengembangkan kesadaran ekologis, hidup hemat energi dan rendah emisi, mendukung energi terbarukan, menjaga sumber air, menanam pohon, memulihkan lingkungan, membangun solidaritas terhadap korban bencana ekologis, serta mendidik generasi muda agar peduli terhadap keberlanjutan bumi.¹⁴⁸

157. Penggunaan pupuk dan bahan kimia secara berlebihan telah merusak kesuburan tanah, mencemari air, mengganggu kesehatan masyarakat, dan melemahkan keberlanjutan pertanian. Banyak petani juga terjebak dalam ketergantungan ekonomi pada sistem pertanian industri yang tidak adil dan mengancam ketahanan pangan sekaligus martabat petani kecil. Gereja mendorong: pengembangan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; penggunaan pupuk organik dan praktik agroekologi; perlindungan tanah pertanian, sumber air dan cadangan air tanah; penguatan komunitas petani lokal dan ekonomi solidaritas; penghargaan terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal dalam merawat alam.¹⁴⁹
158. Di tengah krisis ekologis dan sosial, kelompok rentan menjadi pihak yang paling menderita: masyarakat adat, petani kecil, nelayan tradisional, perempuan, anak-anak, lansia, penyandang difabel, migran, serta kaum miskin di kota. Mereka sering kehilangan akses terhadap tanah, air, pekerjaan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Jeritan orang miskin tidak dapat dipisahkan dari jeritan bumi. Gereja dipanggil untuk: menghadirkan pastoral yang berpihak kepada kaum kecil dan tersingkir; mendampingi korban ketidakadilan ekologis dan sosial; memperjuangkan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan kelompok rentan; memperkuat solidaritas sosial dan budaya perjumpaan; melibatkan kelompok rentan sebagai subjek kehidupan Gereja dan masyarakat; menghadirkan pelayanan pastoral yang memulihkan martabat, harapan, dan kehidupan bersama.¹⁵⁰
159. Gereja percaya bahwa merawat ciptaan adalah bagian dari panggilan iman dan perwujudan kasih kepada sesama. Karena itu, seluruh umat Allah dipanggil untuk membangun pertobatan ekologis yang nyata melalui perubahan gaya hidup, keberpihakan kepada kaum rentan, serta keterlibatan aktif dalam menjaga keutuhan ciptaan. Dengan

¹⁴⁸ *Ekologi Integral dalam Kehidupan Keluarga*, hlm. 17 – 18.

¹⁴⁹ Bdk. *Ekologi Integral dalam Kehidupan Keluarga*, hlm. 24.

¹⁵⁰ Bdk. *Ekologi Integral dalam Kehidupan Keluarga*, hlm. 7, 15 – 16, 29-31.

semangat ekologi integral, Gereja ingin terus menjadi tanda harapan, pembela kehidupan, dan sahabat bagi bumi sebagai rumah bersama.¹⁵¹

160. Mendengarkan seruan FABC dan dalam rangka berjalan bersama sebagai bangsa Asia, Gereja Indonesia, baik Konferensi Waligereja Indonesia maupun masing-masing keuskupan serta tarekat religius, tidak menanamkan investasi dalam perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan dan ruang hidup.¹⁵²
161. Gereja mendorong pemerintah untuk melakukan eksplorasi bisnis di sektor pertambangan atau sumber daya alam lainnya dengan menggunakan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai dasar operasional. Penghormatan terhadap masyarakat adat juga penting untuk dibangun dalam seluruh proses bisnis karena masyarakat adat adalah pemilik hutan yang kerap paling terdampak.

F. Gereja dan Dinamika Politik

162. Krisis multidimensi yang dialami bangsa Indonesia juga merambah ke bidang politik. Demokrasi dan amanat Reformasi yang diperjuangkan dengan tumpahan banyak darah pada 1998 pelan-pelan menguap hanya dalam waktu 25 tahun. Demokrasi yang semestinya menjadi ruang bagi kedaulatan rakyat dan partisipasi publik kini tinggal sebagai demokrasi formalistik (prosedural); pemilu memang dijalankan, namun partisipasi publik yang aktif dan kritis diabaikan, khususnya pascapemilu. Keputusan-keputusan strategis sering kali hanya ditentukan oleh segelintir elit dengan mengabaikan aspirasi serta kebutuhan rakyat banyak. Kondisi seperti ini mengarah pada [re]sentralisasi kekuasaan dan mengancam prinsip *checks and balances*.
163. Bersamaan dengan [re]sentralisasi kekuasaan, terjadi pula pelemahan oposisi politik dan penyempitan ruang bagi masyarakat sipil. Oposisi politik—yang semestinya menjadi penyeimbang kekuasaan—kerap kali dihadapkan pada pelbagai tekanan dan hambatan, mulai dari polarisasi yang sengaja diciptakan hingga upaya kooptasi. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil—yang memiliki peran krusial dalam melakukan pengawasan, advokasi, dan artikulasi kepentingan publik—semakin dibatasi ruang geraknya melalui regulasi yang ambigu. Penggunaan hukum yang represif, kriminalisasi aktivis, dan stigmatisasi terhadap kritik mewarnai krisis politik ini. Perwujudan kuota 30 persen perempuan dalam posisi pengambilan keputusan politik (publik) juga terus mengalami hambatan. Suara perempuan digunakan hanya untuk kepentingan politik semata.

¹⁵¹ Bdk. *Ekologi Integral dalam Kehidupan keluarga*, hal 7 – 9; 17 – 18.

¹⁵² Lih. FABC 50 Bangkok Document, 109.

164. Situasi di atas dapat menjadikan kehidupan politik semakin otoriter dan diperburuk oleh proses politik dan kekuasaan yang semakin mendominasi wilayah sipil dan menggantikan peran mereka dalam pengambilan keputusan politik secara demokratis. Bila kecenderungan ini terus berlanjut, Indonesia berisiko kehilangan identitasnya sebagai negara demokratis dan pluralis, serta digantikan oleh rezim otoriter yang merampas kebebasan dan menindas hak asasi manusia warga negaranya.

Refleksi Teologis

165. Situasi politik bangsa memanggil Gereja Indonesia—sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia¹⁵³—untuk memberikan tanggapan dari perspektif iman Kristiani. Gereja tidak dapat menutup mata terhadap gejala pelemahan demokrasi, penyempitan ruang partisipasi publik, serta berbagai bentuk ketidakadilan yang melukai martabat manusia dan kesejahteraan bersama.
166. Seluruh hidup dan keputusan Yesus Kristus terarah pada pewartaan dan perwujudan Kerajaan Allah. Dalam terang Kerajaan Allah itu, kekuasaan tidak boleh dijalankan untuk dominasi, melainkan sebagai pelayanan.¹⁵⁴ Karena itu, para pemimpin masyarakat dipanggil untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat—terutama mereka yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkirkan—serta menegaskan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan bersama. Dan sesungguhnya, jika kita mempertimbangkan pelayanan yang dilakukannya bagi masyarakat dan kebaikan bersama, politik benar-benar tampak sebagai karya kasih kristiani yang tidak pernah berupa teori belaka, melainkan selalu menjadi tanda dan kesaksian nyata atas tindakan Allah bagi manusia.¹⁵⁵ Paus Pius XI dengan tepat mendefinisikan tindakan politik sebagai “bentuk amal tertinggi.”¹⁵⁶ Sebuah tanda dan kesaksian nyata “tentang tindakan Tuhan demi manusia.”¹⁵⁷
167. Iman akan Yesus Kristus mewajibkan Gereja untuk hadir sebagai garam dan ragi di tengah dunia (bdk. Mat 5:13; 13:33).¹⁵⁸ “Gereja harus melayani manusia jika ingin melayani Tuhan.”¹⁵⁹ Kehadiran itu mencakup keterlibatan dalam kehidupan sosial dan politik demi

¹⁵³ “Arah Dasar Gereja Katolik Indonesia” dalam *Pedoman Gereja Katolik Indonesia*, 11, hlm. 8 dan *Nota Pastoral KWI 2018*, 1.

¹⁵⁴ Bdk. Mat 20:25-27; Sidang Agung KWI-Umat Katolik 1995, *Pedoman Gereja Katolik Indonesia* (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 1996), 57, hlm. 47.

¹⁵⁵ Bdk. FT, 176 – 192.

¹⁵⁶ Pius XI, Pidato kepada Federasi Universitas Katolik Italia, 18 Desember 1927.

¹⁵⁷ Paus Leo XIV, Audiensi kepada para anggota parlemen pada kesempatan Yubileum para gubernur, 21 Juni 2025.

¹⁵⁸ FABC IV, 1986, 3.1.2.

¹⁵⁹ Paus Yohanes Paulus II, Audiensi Bapa Suci dalam Kongres Universitas Katolik 1998, 3.

terwujudnya kesejahteraan umum.¹⁶⁰ Keterlibatan tersebut tidak berarti Gereja menjadi kekuatan partisan, melainkan menjalankan tanggung jawab moral dan profetis agar kehidupan bersama ditata sesuai martabat manusia, keadilan, perdamaian, solidaritas, subsidiaritas, kesetaraan, serta keberpihakan kepada mereka yang paling rentan.

168. Bagi Gereja, tidak ada pemisahan antara urusan manusiawi dan urusan ilahi. Melaksanakan tugas manusiawi di tengah masyarakat agar Kerajaan Allah terwujud di dalamnya¹⁶¹—yang antara lain diwujudkan dengan berpolitik—merupakan kesetiaan terhadap bakti kepada Allah.¹⁶² “Manusia adalah jalan pertama yang harus ditempuh Gereja dalam memenuhi misinya. Manusia adalah ciptaan Tuhan, dan karena alasan inilah hak asasi manusia berakar pada Tuhan, terletak pada rancangan penciptaan, dan merupakan bagian dari rencana penebusan. Bisa dikatakan, dengan ungkapan yang berani, bahwa hak asasi manusia juga merupakan hak Tuhan.”¹⁶³ Manusia tidak dapat dipisahkan dari Tuhan, begitu pula politik dari moralitas. Gereja tidak pernah berhenti mengingatkan kita bahwa keutamaan martabat manusia di atas struktur sosial apa pun adalah kebenaran moral yang tidak dapat diabaikan oleh siapa pun.
169. Dokumen Gereja, khususnya *Pacem in Terris* dan *Gaudium et Spes*, menerapkan ajaran Yesus dalam konteks politik modern. Gereja memahami politik sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama.¹⁶⁴ Prinsipnya, politik harus menciptakan mekanisme agar kesejahteraan bersama tersedia bagi sebanyak mungkin rakyat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan.¹⁶⁵
170. Dalam terang iman Kristiani, seluruh anggota Gereja dipanggil untuk mengambil bagian dalam kehidupan publik.¹⁶⁶ Secara khusus, kaum awam memiliki panggilan utama untuk terlibat langsung dalam politik praktis, lembaga-lembaga demokrasi, serta pengambilan kebijakan publik. Sementara itu, para uskup, imam, dan kaum religius menjalankan tugas pembinaan hati nurani, pendidikan politik etis, pendampingan pastoral, serta peneguhan suara kenabian Gereja di tengah masyarakat. Secara khusus, para politisi dan pejabat publik

¹⁶⁰ FABC IV, 1986, 3.1.2 dan 3.1.3.

¹⁶¹ GS, 45.

¹⁶² GS, 43.

¹⁶³ Paus Yohanes Paulus II, Audiensi Bapa Suci dalam Kongres Universitas Katolik 1998, 3.

¹⁶⁴ Paus Yohanes XXIII, *Ensiklik Pacem in Terris* (untuk selanjutnya: *Pacem in Terris*), 54; GS, 74; Paus Paulus VI, *Surat Apostolik Octagesimo Adveniens* (untuk selanjutnya: *Octagesimo Adveniens*), 46.

¹⁶⁵ *Pedoman Gereja Katolik Indonesia*, 57.

¹⁶⁶ FABC IV, 1986, 3.1.2.

Katolik dapat meneladani Santo Thomas More dalam mewujudkan cita-cita keadilan.

171. Dalam semangat itu, politik yang dijalankan demi kesejahteraan umum dapat dipahami sebagai salah satu bentuk cinta kasih yang luhur.¹⁶⁷ Politik menjadi jalan kemartiran sehari-hari ketika dijalankan dengan kejujuran, keberanian moral, dan pengorbanan, serta ketika kekuasaan tidak dipakai untuk keuntungan diri, kelompok, atau partai, melainkan untuk melayani kebaikan bersama.¹⁶⁸ Sebaliknya, ketika politik dikuasai oleh manipulasi, ketakutan, korupsi, dan penyingkiran, di situ tampak bekerja struktur-struktur dosa yang harus dikritik dan diubah.

Arah Pastoral

172. Atas dasar refleksi iman tersebut, Gereja tidak hanya dipanggil untuk “memberikan komentar” tentang krisis, tetapi juga untuk menghadirkan kembali kriteria moral. Dalam tataran ini, kebenaran (terutama kebenaran moral) tidak dapat dinegosiasikan. Hati nurani bukanlah pelengkap. Politik ada untuk melayani manusia, khususnya mereka yang menderita. Oleh karena itu, Gereja dipanggil untuk merumuskan langkah-langkah pastoral yang menumbuhkan partisipasi politik yang etis, kritis, dan berpihak pada kesejahteraan umum. Realitas kehidupan bernegara di Indonesia saat ini, yang memaknai politik sebagai sarana untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan demi kepentingan diri sendiri, kelompoknya, maupun partai politiknya, membuat banyak orang—termasuk anggota Gereja—memiliki *fobia* terhadap politik. Menghadapi situasi ini, diperlukan langkah-langkah pastoral yang konkret.
173. Ajaran Sosial Gereja, pendidikan politik, dan Katekese Kebangsaan perlu menjadi bagian integral dari pendidikan iman di paroki-paroki. Melalui formasi semacam ini, umat beriman dibantu untuk memahami bahwa iman Kristiani tidak berhenti pada kesalehan pribadi, tetapi juga menuntut keterlibatan aktif dalam membangun keadaban publik, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, paroki dapat menjadi ruang pembelajaran iman yang membentuk warga Gereja sekaligus warga bangsa yang kritis, etis, solid, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.
174. Gereja perlu memberikan penyadaran dan pendidikan politik yang berkelanjutan kepada seluruh anggota Gereja dengan mengintegrasikan Ajaran Sosial Gereja dan Katekese Kebangsaan ke dalam pendidikan

¹⁶⁷ Paus Fransiskus dalam audiensi dengan kelompok *Christian Life Community* di Aula Paulus VI, Vatikan, pada 30 April 2015. Bdk. EG, 205.

¹⁶⁸ Konferensi Waligereja Indonesia, *Nota Pastoral KWI 2018. Panggilan Gereja Dalam Hidup Berbangsa: Menjadi Gereja yang Relevan dan Signifikan* (Jakarta: Obor, 2018), 22, hlm. 25.

iman. Di satu sisi, dalam pembinaan itu harus ditegaskan bahwa kaum awam memiliki panggilan utama untuk terlibat langsung dalam politik praktis.¹⁶⁹ Di sisi lain, para uskup, imam, dan kaum religius menjalankan tugas pembinaan hati nurani, pendidikan etis, pendampingan pastoral, serta peneguhan komitmen terhadap kebaikan bersama. Dengan demikian, keterlibatan Gereja dalam kehidupan publik tetap nyata, tetapi tidak jatuh ke dalam politik partisan.

175. Para imam—sebagai “pembela kesejahteraan umum”¹⁷⁰—serta kaum religius—sebagai saksi datangnya Kerajaan Allah di dunia mulai saat ini¹⁷¹—perlu mengikuti dinamika kehidupan sosial-politik secara cermat dan bijaksana. Ajakan ini bukan untuk menjadikan mereka sebagai pelaku politik praktis, melainkan agar mereka mampu membaca tanda-tanda zaman, menilai realitas secara moral, dan mendampingi umat. Kemudian, mereka juga dapat memperkuat gerakan-gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan, dan kesejahteraan bersama.¹⁷²
176. Kaderisasi politik bagi kaum muda perlu ditangani secara khusus agar mereka dapat menjadi kader politik andalan Gereja. Kaderisasi politik bagi kaum muda sekurang-kurangnya mengandung unsur-unsur pembentukan spiritualitas Katolik yang kokoh, mentalitas solider yang merakyat, kemudahan untuk meningkatkan kemampuan profesional, kesempatan untuk meningkatkan keterampilan secara optimal, serta pengetahuan yang luas dan mendalam tentang iman Kristiani dan kebangsaan.¹⁷³
177. Para pemimpin Gereja Indonesia—pada semua level—perlu menjalin komunikasi dengan para politikus dan/atau partai politik untuk membantu mereka menyadari bahwa tujuan utama berpolitik adalah mewujudkan kesejahteraan bersama.¹⁷⁴
178. Para uskup, imam, dan kaum religius perlu terus-menerus menjalani pembinaan lanjut (*ongoing formation*) agar dapat mendampingi dan memberdayakan kaum awam dalam mewujudkan komitmen baptisan mereka, baik dalam kehidupan menggereja maupun dalam masyarakat.¹⁷⁵
179. Konferensi Waligereja Indonesia mendorong setiap keuskupan untuk membentuk kelompok ahli/pemikir lintas profesi (*think tank group*) yang

¹⁶⁹ Bdk. *Lumen Gentium*, 31; *Presbyterorum Ordinis*, 6.

¹⁷⁰ *Presbyterorum Ordinis*, 9.

¹⁷¹ Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik *Vita Consecrata*, 27.

¹⁷² Pedomannya Gereja Katolik Indonesia, 72.

¹⁷³ Pedomannya Gereja Katolik Indonesia, 27.

¹⁷⁴ *Pacem in Terris*, 54; GS, 74; FABC IV, 1986, 3.1.2 dan 3.1.3.

¹⁷⁵ FABC 50 Bangkok Document, 115.

membantu Gereja menganalisis situasi dan kondisi kekinian serta merumuskannya dalam kebijakan pastoral dan tindakan konkret, sejalan dengan hasil Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) 2025.

180. Gereja mengajak pemerintah dan seluruh penyelenggara negara untuk menjalankan politik dan kekuasaan sebagai pelayanan kepada rakyat, terutama kepada mereka yang miskin, lemah, tersingkir, dan kurang mendapat perlindungan. Penyelenggaraan kekuasaan harus diarahkan pada penegakan martabat manusia, keadilan, supremasi hukum, partisipasi warga, dan kesejahteraan bersama. Pelibatan perempuan secara substantif penting dilakukan dalam seluruh proses politik dan penyusunan kebijakan publik, mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional.

G. Gereja dan Nilai-Nilai Kehidupan

181. Indonesia sebenarnya sangat beruntung karena Allah menganugerahkan nilai-nilai luhur bagi bangsa ini. Para pendiri bangsa (*founding fathers*) mengkristalisasikan nilai-nilai tersebut dalam Pancasila. Namun, sangat disayangkan, banyak pemimpin bangsa justru tidak memahami nilai-nilai tersebut, apalagi menghidupkannya. Akibatnya, bangsa kita sudah lama mengalami krisis nilai, sehingga manusia diperlakukan sebagai alat ekonomi dan sarana politik, serta muncul apatisme terhadap ketidakadilan. Krisis makin diperburuk oleh unsur-unsur dari luar: sekularisme, politik populisme, sistem ekonomi neoliberal—yang melahirkan tidak hanya konsumerisme material melainkan juga “konsumerisme rohani”¹⁷⁶, globalisasi ketidakpedulian,¹⁷⁷ dan “budaya membuang”¹⁷⁸—serta fanatisme dan eksklusivisme dalam kehidupan beragama.

Refleksi Teologis

182. Dalam hidup bersama, Gereja Katolik sangat menekankan pentingnya menghidupi nilai-nilai universal, yakni cinta kasih, pengorbanan, keadilan, perdamaian, kebenaran, kebebasan, kesetaraan, tanggung jawab, kepedulian terhadap berbagai bentuk kehidupan, serta kepedulian terhadap sesama, terutama orang-orang miskin dan yang sangat membutuhkan.¹⁷⁹ Kesadaran ini kemudian juga terhubung dengan kepedulian terhadap bumi sebagai rumah kita bersama¹⁸⁰ dan

¹⁷⁶ EG, 89.

¹⁷⁷ EG, 54.

¹⁷⁸ EG, 53.

¹⁷⁹ FABC IV, 1986, 3.4.9; FABC VII, 2000, Part III, 3.

¹⁸⁰ EG, 183, 206; LS, 1, 53.

tempat Allah hadir untuk menemui umat-Nya.¹⁸¹ Gereja juga perlu merawat iman akan Allah dan pengharapan akan kuasa-Nya yang membebaskan serta nilai-nilai Injil lainnya.

183. Gereja Katolik Indonesia meyakini bahwa nilai-nilai luhur tersebut selaras secara mendalam dengan nilai-nilai dasar Pancasila.¹⁸² Keselarasan tidak berarti bahwa Injil dan Pancasila identik, melainkan bahwa keduanya dapat bertemu dalam ruang etis-publik untuk membangun kehidupan berbangsa yang adil, manusiawi, dan inklusif. Karena itu, penghayatan iman Kristiani justru dapat memperkuat komitmen warga Gereja terhadap kehidupan kebangsaan.
184. Tempat pertama dan utama untuk menanamkan nilai-nilai luhur adalah keluarga. Dalam keluarga, anak-anak belajar mengenal kehidupan sebagai anugerah, sesama sebagai saudara, dan perbedaan sebagai kenyataan yang harus diterima dengan penuh hormat. Melalui teladan, kebiasaan hidup, doa, disiplin, dan relasi sehari-hari, keluarga menjadi sekolah pertama bagi iman, kebangsaan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab moral.¹⁸³
185. Selain keluarga, sekolah-sekolah Katolik juga memiliki peran penting sebagai ruang pembinaan nilai dan sebagai sekolah kehidupan. Bila dikelola dengan baik, sekolah-sekolah Katolik dapat menjadi tempat pertemuan lintas agama, lintas budaya, dan lintas latar sosial yang membentuk kaum muda menjadi pribadi yang matang, terbuka, solider, dan mampu membangun persaudaraan sejati.¹⁸⁴ Dengan demikian, pendidikan Katolik tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk karakter, kepekaan sosial, serta komitmen terhadap keadilan dan perdamaian.

Arah Pastoral

186. Gereja mengajak seluruh umat untuk merawat, melestarikan, dan mengembangkan budaya luhur bangsa sebagai karunia Allah yang mencerminkan martabat manusia serta memperkaya kehidupan bersama. Melalui dialog antara iman dan budaya, umat dipanggil untuk menghidupi dan mewariskan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang selaras dengan Injil, serta memanfaatkan perkembangan zaman secara bijaksana. Gereja mendorong generasi muda sebagai pewaris budaya untuk mengenal, mencintai, dan mengembangkan budaya sebagai bagian dari panggilan mereka sebagai warga gereja dan warga bangsa,

¹⁸¹ Bdk. EG, 88.

¹⁸² *Nota Pastoral KWI 2018*, 15.

¹⁸³ FABC IV, 1986, 3.4.9.

¹⁸⁴ FABC IV, 1986, 3.5.6.

serta menjadikan budaya sebagai medan pewartaan Injil dan perwujudan iman.

187. Gereja meminta pemerintah beserta semua lembaganya untuk secara serius menggali dan memahami nilai-nilai Pancasila serta menjadikannya landasan bagi pelaksanaan pemerintahan dan seluruh pelayanan publik.
188. Gereja—melalui Komisi Keluarga—perlu membantu keluarga-keluarga Katolik sehingga mereka dapat menjadi tempat pertama dan utama yang menghidupi nilai-nilai luhur bangsa maupun nilai-nilai universal, yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila¹⁸⁵ dan yang diperlukan bagi evangelisasi. Hal itu dapat dilakukan dengan merancang program pendampingan bagi keluarga-keluarga Katolik.
189. Untuk mengatasi prasangka, eksklusivisme, dan fanatisme beragama, lembaga-lembaga pendidikan Katolik dapat merancang program-program pertemuan lintas iman, seperti dialog, kunjungan, *live-in*, kerja sosial bersama, dan ruang belajar bersama yang terarah, terutama untuk mempelajari semua agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Pengalaman-pengalaman semacam itu akan menolong kaum muda untuk bertumbuh menjadi pribadi yang interreligius:¹⁸⁶ teguh dalam iman, terbuka terhadap sesama, dan siap bekerja sama demi kebaikan bersama.
190. Kepedulian untuk merawat bumi sebagai rumah kita bersama dan tempat kehadiran Allah untuk menjumpai umat-Nya perlu menjadi bagian integral dari pendidikan iman dalam keluarga-keluarga Katolik dan paroki-paroki, serta dalam kurikulum sekolah-sekolah dan perguruan tinggi-perguruan tinggi Katolik.
191. Ekaristi menuntut etika sosial. Liturgi harus berdampak pada praksis, karena spiritualitas bukan pelarian dari sejarah, melainkan keterlibatan total dalam sejarah sebagai *locus theologicus*. Perayaan Ekaristi harus sungguh menjadi perayaan pergulatan iman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, semua orang yang terlibat dalam perayaan tersebut akan siap diutus untuk menjadi “pribadi dan komunitas ekaristis”¹⁸⁷ dengan menjadi promotor persekutuan, persaudaraan, perdamaian, dan solidaritas¹⁸⁸ serta mencari jalan keluar untuk

¹⁸⁵ Nota Pastoral KWI 2018, 15.

¹⁸⁶ Bdk. EG, 250.

¹⁸⁷ Pope John Paul II, *Encyclical Letter Ecclesia de Eucharistia on the Eucharist in its Relation to the Church* (Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 2003), art. 20.

¹⁸⁸ Paus Fransiskus memahami solidaritas sebagai semua usaha untuk memastikan bahwa semua orang dapat memperoleh makanan sehat dan bergizi secara teratur, semua orang muda mendapatkan pendidikan yang bermutu, semua orang mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, dan semua orang mendapatkan pekerjaan dengan upah yang adil (lih. EG, 192).

mengatasi salah satu bentuk kemiskinan yang mereka temukan di masyarakat tempat tinggal mereka.¹⁸⁹

V. Penutup

192. Krisis multidimensi yang dialami oleh bangsa dan negara dapat membuat kita menjadi kecil hati, pesimis, dan bahkan kehilangan harapan. Perasaan ini dapat dengan mudah muncul bila kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri.
193. Namun, panggilan untuk menjadi Gereja sinodal dan misioner justru menyadarkan kita semua untuk lebih memberi perhatian guna merawat relasi multidimensi: relasi dengan Allah, relasi antarlaki-laki dan perempuan dalam keluarga dan komunitas lokal, relasi antarkelompok sosial dan agama, serta relasi dengan seluruh ciptaan.¹⁹⁰ Dengan membangun relasi multidimensi ini, kita tidak pernah berjalan sendirian.
194. Panggilan untuk menjadi Gereja sinodal dan misioner juga mengundang kita untuk berjalan bersama seluruh umat manusia (*humanity*)¹⁹¹ guna mendengarkan suara Roh Kudus—khususnya melalui suara mereka yang kecil, tersisih, dan alam yang tercemar¹⁹²—agar Gereja memiliki komitmen yang sungguh kuat untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian, martabat manusia, serta kesejahteraan umum.¹⁹³
195. FABC XII Jakarta 2026 menggarisbawahi pesan bahwa sinodalitas bukan hanya metoda konsultasi, tetapi jalan pertobatan gereja pada misi. Di sini Gereja dipanggil menjadi pembangun jembatan, antara Allah dan manusia, manusia dengan sesama, dan manusia dengan ciptaan.
196. Gereja Indonesia dipanggil mengalami pertobatan cara hadir di dunia: bukan hanya mendengarkan, tetapi membiarkan suara mereka yang kecil, terluka, dan tersingkir mengubah wajah serta tindakan Gereja. Sinodalitas bukan sekadar pembaruan mekanisme pastoral, melainkan transformasi budaya kepemimpinan, relasi, dan tata kelola Gereja. Sebagai pembangun jembatan, Gereja tidak boleh menutup mata terhadap jurang ketidakadilan, tetapi hadir sebagai komunitas profetis yang membaca tanda zaman, membela martabat manusia, dan merawat ciptaan. Dalam perjalanan bersama Gereja Asia, Gereja Indonesia dipanggil menghadirkan Kristus sebagai sumber rekonsiliasi dan pengharapan melalui keberanian iman yang nyata.

¹⁸⁹ Pope John Paul II, *Apostolic Letter Mane Nobiscum Domine for the Year of the Eucharist* (Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 2004), art. 27-28.

¹⁹⁰ Francis, *XVI Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops 2024: Final Document*, 50.

¹⁹¹ Francis, *XVI Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops 2024: Final Document*, 20.

¹⁹² SAGKI 2025, 13.

¹⁹³ Francis, *XVI Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops 2024: Final Document*, 20.

- 197.** Gereja Indonesia harus berani mengambil langkah seperti ini. Gereja tidak perlu khawatir karena Tuhan sendiri akan meminta Bapa untuk mengutus Penolong, yakni Roh Kebenaran, untuk menyertai setiap langkah perjalanan Gereja (bdk. Yoh 14:16-17a) dalam upaya menumbuhkan harapan di tengah krisis multidimensi yang sedang dialami oleh bangsa dan negara Indonesia.
- 198.** Dengan menjadi Gereja sinodal yang berjalan sebagai bangsa Indonesia, Gereja Indonesia dapat menjadi tanda sekaligus menumbuhkan harapan di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia yang sedang mengalami krisis multidimensi. Harapan ini mengalir dari iman akan kasih Allah dalam Yesus Kristus,¹⁹⁴ yang setia berjalan bersama kita sampai pada kesudahannya (Yoh 13:1).¹⁹⁵ Kesetiaan menyertai perjalanan hidup kita, membawa-Nya ke kematian di kayu salib dan kebangkitan dari kematian.¹⁹⁶ Pada gilirannya, kesetiaan Yesus Kristus memungkinkan kita memperoleh kehidupan kekal,¹⁹⁷ yakni perjumpaan dengan Tuhan yang mulia, persekutuan yang penuh dengan-Nya, serta berbagi dalam kasih-Nya yang tak terbatas.¹⁹⁸ Harapan ini tidak saja bercorak spiritual, melainkan juga bertumpu pada tanda-tanda zaman yang diberikan Allah kepada kita.¹⁹⁹ Tanda-tanda zaman itu secara nyata terungkap dalam kerinduan akan terwujudnya perdamaian di dunia.²⁰⁰ Kendati di sana-sini telah tergerus, kita tetap berani berharap bahwa di banyak tempat senantiasa ada orang-orang yang memiliki semangat hidup dan bersedia berbagi dengan sesama.²⁰¹
- 199.** Kami berharap Nota Pastoral Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) 2026 dapat memandu Gereja Indonesia untuk menyalakan terang dan menggerakkan komunitas pengharapan dalam rangka mewujudkan hasil-hasil Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) 2025, yaitu “Berjalan Bersama Sebagai Peziarah Pengharapan: Menjadi Gereja Sinodal Yang Misioner Untuk Perdamaian”.
- 200.** Gereja Indonesia diundang untuk merespons tantangan dan perubahan zaman dengan menerapkan Nota Pastoral di setiap regio, keuskupan, dan paroki di seluruh Indonesia sesuai konteks gereja lokal secara operasional dengan bahasa pastoral, sehingga nilai-nilai Injil menjadi relevan dan nyata dalam upaya menyembuhkan bangsa, menanggapi

¹⁹⁴ Paus Benediktus XVI, Ensiklik *Spe Salvi* – Harapan yang Menyelamatkan (selanjutnya: *Spe Salvi*), 26; Paus Fransiskus, *Spes non Confundit*: Bulla Paus Fransiskus Menandai Yubileum Biasa Tahun 2025 (selanjutnya: *Spes non Confundit*), 3.

¹⁹⁵ Bdk. *Spe Salvi*, 31.

¹⁹⁶ Bdk. *Spes non confundit*, 20.

¹⁹⁷ *Spes non confundit*, 19.

¹⁹⁸ *Spes non confundit*, 21.

¹⁹⁹ *Spes non confundit*, 7.

²⁰⁰ *Spes non confundit*, 8.

²⁰¹ Bdk. *Spes non confundit*, 9.

situasi dan tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara Indonesia saat ini.

Jakarta, 17 Agustus 2026

PRESIDIUM KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA

The image shows two handwritten signatures in black ink. Between the signatures is a circular official stamp in purple ink. The stamp contains the text "KONFERENSI WALIGEREJA" at the top, "Jln. Cut Mutiah 10" in the middle, "K.W.I." below that, and "JAKARTA" and "INDONESIA" at the bottom, separated by two small stars.

Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC Mgr. Adrianus Sunarko, OFM

Ketua

Sekretaris Jenderal

LAMPIRAN

Trend Data dalam 10 Tahun Terakhir (2015-2025)

Daftar Kategori Data:

1. Pertumbuhan Ekonomi (GDP Growth Rate Indonesia)
2. Angka Ketimpangan (Gini Ratio – BPS)
3. Angka Kemiskinan (Versi BPS & Versi Global/World Bank)
4. Angka Pengangguran dan Komposisi Pekerja Formal–Informal (BPS)
5. Indeks Demokrasi (Economist Intelligence Unit / EIU)
6. Pengguna Internet, Gadget, dan Screen Time (APJII, We Are Social, KPAI)
7. Laju Deforestasi (Nasional & Regional: Papua, Kalimantan, Sumatera)
8. Data Jumlah Sampah (SIPSN – KLHK/KemenLH)
9. Kesehatan Mental Remaja (I-NAMHS)
10. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)
11. Sekolah & Layanan Kesehatan Katolik di Indonesia

1. Pertumbuhan Ekonomi (GDP Growth Rate)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2015–2025 berada di kisaran 5% per tahun, dengan dua titik kritis: kontraksi tajam akibat pandemi COVID-19 pada 2020 (-2,07%) dan pemulihan bertahap setelahnya. Rata-rata pertumbuhan satu dekade terakhir (di luar 2020–2021) sekitar 5,07% per tahun—belum cukup untuk lepas dari *middle-income trap*.

Tabel 1.1 — Pertumbuhan PDB Indonesia Tahunan, 2015–2025 (%)

Tahun	GDP Growth (%, c-to-c)	Catatan / Konteks
2015	4,88	Perlambatan ekonomi global, harga komoditas turun
2016	5,03	Konsolidasi fiskal, suku bunga BI diturunkan
2017	5,07	Stabilisasi pertumbuhan
2018	5,17	Capaian tertinggi periode pra-pandemi
2019	5,02	Perlambatan menjelang pandemi
2020	-2,07	Kontraksi akibat pandemi COVID-19
2021	3,70	Mulai pemulihan
2022	5,31	Pemulihan kuat, di atas target pemerintah (5,2%)
2023	5,05	Konsolidasi pemulihan
2024	5,03	Stabil
2025	5,11	Di bawah target 5,2% akibat banjir akhir tahun

Sumber utama:

- Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi (2015–2025).
<https://www.bps.go.id/en/pressrelease>
- BPS (2026), "Pertumbuhan Ekonomi Q4-2025: 5,39% YoY; Setahun penuh 2025: 5,11%".
- World Bank, GDP growth (annual %) - Indonesia.
<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=ID>
- INDEF (2024), "Kinerja dan Tantangan Perekonomian Periode 2014–2024".
https://indef.or.id/wp-content/uploads/2024/10/Kinerja-dan-Tantangan-Perekonomian_Periode-2014-2024_rev1.pdf
- Indonesia Baik (Kominfo), "Satu Dekade Terakhir, Ekonomi Indonesia Terjaga".
<https://indonesiabaik.id/infografis/satu-dekade-terakhir-ekonomi-indonesia-terjaga>

2. Angka Ketimpangan (Gini Ratio)

Gini Ratio Indonesia menunjukkan tren penurunan yang lambat namun konsisten sejak 2015. Ketimpangan tertinggi tercatat pada 2015 (0,408 versi Maret) dan terendah pada September 2025 (0,363). BPS menerbitkan Gini Ratio 2 kali setahun (Maret dan September). Ketimpangan di perkotaan secara konsisten lebih tinggi daripada perdesaan.

Tabel 2.1 — Gini Ratio Indonesia, Maret & September 2015–2025

Tahun	Maret	September	Catatan
2015	0,408	0,402	Puncak ketimpangan dekade
2016	0,397	0,394	—
2017	0,393	0,391	—
2018	0,389	0,384	—
2019	0,382	0,380	Pra-pandemi
2020	0,381	0,385	Naik akibat pandemi
2021	0,384	0,381	—
2022	0,384	0,381	—
2023	0,388	0,388	Naik kembali
2024	0,379	0,381	—
2025	0,375	0,363	Terendah satu dekade

Tahun (Sept)	Perkotaan	Perdesaan	Selisih
2015	0,419	0,329	0,090
2018	0,391	0,319	0,072
2020	0,399	0,319	0,080
2022	0,402	0,313	0,089
2024	0,402	0,308	0,094
2025	0,383	0,295	0,088

Sumber utama:

- BPS, Berita Resmi Statistik Gini Ratio (rilis Januari dan Juli setiap tahun, 2016–2026).
<https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2026/02/05/2535/gini-ratio-september-2025-tercatat-sebesar-0-363-.html>
- BPS, "Distribution of Expenditure per Capita and Gini Index, 2010–2024".
<https://www.bps.go.id/en/statistics-table>
- Bank Dunia, Gini index - Indonesia.
<https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=ID>

3. Angka Kemiskinan

Terdapat dua ukuran utama yang sering dirujuk dan menghasilkan angka yang sangat berbeda: (a) garis kemiskinan nasional BPS yang berbasis pada kebutuhan dasar lokal, dan (b) ambang kemiskinan global Bank Dunia berdasarkan paritas daya beli (PPP). Per April 2025, Bank Dunia (*Macro Poverty Outlook*) menggunakan ambang USD 6,85 PPP per hari dan menyebut 60,3% penduduk Indonesia (≈171,8 juta jiwa) hidup di bawah ambang tersebut. Data BPS, dengan ambang Rp 595.242/bulan, mencatat 8,57% (24,06 juta jiwa) per September 2024.

Tabel 3.1 — Angka Kemiskinan Versi BPS (Maret), 2015–2025

Tahun (Maret)	Jumlah (juta jiwa)	Persentase (%)	Catatan
2015	28,59	11,22	Puncak satu dekade
2016	28,01	10,86	—
2017	27,77	10,64	—
2018	25,95	9,82	Pertama < 10% sejak krisis
2019	25,14	9,41	Pra-pandemi terendah
2020	26,42	9,78	Naik akibat pandemi (Mar)
2021	27,54	10,14	Puncak dampak pandemi
2022	26,16	9,54	Pemulihan
2023	25,90	9,36	—
2024	25,22	9,03	—
2025	23,85	8,47	Terendah satu dekade

**Tabel 3.2 — Versi Bank Dunia:
Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Ambang Internasional**

Ambang (PPP/hari)	Kategori	% Penduduk (2024)	Setara Juta Jiwa
USD 2,15	Extreme poverty	1,5% (est.)	± 4,3 juta
USD 3,65	Lower-middle income line	13,5% (est.)	± 38,4 juta
USD 6,85	Upper-middle income line	60,3%	± 171,8 juta

Catatan: Selisih besar antara angka BPS dan Bank Dunia tidak menunjukkan kontradiksi, melainkan perbedaan tujuan pengukuran. BPS menggunakan basis kebutuhan dasar nasional (cocok untuk kebijakan domestik); Bank Dunia menggunakan ambang batas antarnegara (cocok untuk perbandingan global). Yang penting bagi narasi pastoral: porsi kelompok rentan miskin (1,0–1,5 × Garis Kemiskinan) per September 2024 mencapai 24,42% (68,51 juta jiwa), kelompok menuju kelas menengah 49,29% (138,31 juta), dan hanya 0,46% (1,29 juta) tergolong kelas atas.

Sumber utama:

- BPS, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan (Januari & Juli setiap tahun, 2016–2026). <https://www.bps.go.id/en/pressrelease>
- BPS (2026), "Persentase Penduduk Miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen". <https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2026/02/05/2536/>
- BPS (2025), "Memahami Perbedaan Angka Kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS". <https://www.bps.go.id/en/news/2025/05/02/702/>
- World Bank (April 2025), "Macro Poverty Outlook for Indonesia".
- Indonesia Investments, "Urban & Rural Poverty in Indonesia". <https://www.indonesia-investments.com/finance/macroeconomic-indicators/poverty/item301>

4. Tingkat Pengangguran & Komposisi Pekerja Formal–Informal

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun secara struktural sejak 2015 (puncak 6,18% pada Agustus), terganggu oleh lonjakan pada 2020 (7,07%) akibat pandemi, dan kembali ke jalur penurunan—mencapai 4,74% (Nov 2025), yang merupakan yang terendah dalam sejarah. Namun, di balik perbaikan TPT, struktur ketenagakerjaan tetap didominasi oleh sektor informal (≈59–60%). Sektor informal pasca-pandemi justru menguat: tumbuh dari 56,64% (Feb 2020) menjadi 60,12% (Feb 2023), dan masih 59,40% (Feb 2025).

Tabel 4.1 — Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2015–2025 (%)

Tahun	Februari	Agustus	Catatan
2015	5,81	6,18	Perlambatan ekonomi
2016	5,50	5,61	—
2017	5,33	5,50	—
2018	5,13	5,34	—
2019	5,01	5,28	Pra-pandemi terendah
2020	4,94	7,07	Puncak dampak COVID-19
2021	6,26	6,49	Pemulihan lambat
2022	5,83	5,86	—
2023	5,45	5,32	—
2024	4,82	4,91	—
2025	4,76 (Feb)	4,85 / 4,74 (Nov)	Terendah satu dekade

Tabel 4.2 — Proporsi Pekerja Informal (Februari), 2016–2025

Tahun (Feb)	% Informal	Jumlah (juta)	Catatan
2016	58,28	± 70,3	Pra-pandemi awal

Tahun (Feb)	% Informal	Jumlah (juta)	Catatan
2017	58,35	± 72,5	—
2018	58,22	± 73,1	—
2019	57,27	74,08	Terendah pra-pandemi
2020	56,64	74,04	Terendah keseluruhan dekade
2021	59,62	78,14	Lonjakan akibat pandemi
2022	59,97	81,33	—
2023	60,12	83,34	Tertinggi pasca-pandemi
2024	59,17	84,13	—
2025	59,40	85,15 (est.)	Sedikit naik

Catatan analitis: Proporsi pekerja sektor pertanian yang informal turun dari 59% (tahun 2000) menjadi 42% (2024), tetapi para pekerja yang keluar dari pertanian sebagian besar masuk ke sektor jasa bernilai tambah rendah (perdagangan, akomodasi, layanan personal). Pekerja sektor jasa bernilai tambah rendah yang informal naik dari 28% (2020) menjadi 36% (2024).

Sumber utama:

- BPS, Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan (Mei dan November setiap tahun, 2015–2026). <https://www.bps.go.id/en/pressrelease>
- BPS (2026), "November 2025: TPT sebesar 4,74 persen". <https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2026/02/05/2547/>
- BPS, "Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi". <https://www.bps.go.id/en/statistics-table/2/NTQzIzI=>
- Kompas (2025), "Pekerja Informal Makin Dominan". <https://www.kompas.id/artikel/en-porsi-pekerja-informal-cenderung-mendominasi>
- Kompas (2025), "Jumlah Pekerja Informal Meledak". <https://www.kompas.id/artikel/en-pekerja-indonesia-bergantung-pada-pekerjaan-informal>
- Databoks (2024), "Pekerja Sektor Informal Bertambah, Kini Capai 84 Juta Orang". <https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/9d2edab07b39ec3/>

5. Indeks Demokrasi (EIU Democracy Index)

Indeks Demokrasi Indonesia versi Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan tren penurunan struktural sejak 2015 (7,03) hingga titik terendah pada 2020 (6,30), naik singkat pada 2021–2022 (6,71), lalu kembali turun menjadi 6,44 pada 2024. Indonesia secara konsisten masuk dalam kategori *flawed democracy* (skor > 6 dan ≤ 8). Komponen terlemah Indonesia adalah *political culture* (di bawah rata-rata global), sementara komponen terkuat adalah *electoral process and pluralism*.

Tabel 5.1 — Skor & Peringkat Indeks Demokrasi Indonesia (EIU), 2015–2024

Tahun	Skor (0–10)	Peringkat (dari 167)	Kategori	Catatan
2015	7,03	49	Flawed democracy	Tertinggi periode
2016	6,97	48	Flawed democracy	—
2017	6,39	68	Flawed democracy	Penurunan tajam

Tahun	Skor (0–10)	Peringkat (dari 167)	Kategori	Catatan
2018	6,39	65	Flawed democracy	—
2019	6,48	64	Flawed democracy	—
2020	6,30	64	Flawed democracy	Terendah dekade
2021	6,71	52	Flawed democracy	Naik 12 peringkat
2022	6,71	54	Flawed democracy	—
2023	6,53	56	Flawed democracy	—
2024	6,44	59	Flawed democracy	Turun 3 peringkat

Tabel 5.2 — Komponen Indeks Demokrasi Indonesia (2022, contoh) vs Rata-rata Global

Komponen	Skor Indonesia	Rata-rata Global	Status
Electoral process & pluralism	7,92	5,59	Di atas global
Functioning of government	6,79	4,53	Di atas global
Political participation	7,22	5,44	Di atas global
Civil liberties	5,29	5,43	Sedikit di bawah global
Political culture	5,00	5,32	Di bawah global

Catatan: EIU Democracy Index 2025 (rilis 2026) menunjukkan tren stabilisasi secara global setelah delapan tahun penurunan. Skor Indonesia 2025 belum dirilis saat dokumen ini disusun.

Sumber utama:

- Economist Intelligence Unit (2025), "Democracy Index 2024". <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2024/>
- EIU (2026), "Democracy Index 2025: democracy stabilizes after eight years of decline". <https://www.prnewswire.com/news-releases/eiu-democracy-index-2025-democracy-stabilises-after-eight-years-of-decline-302734863.html>
- Our World in Data, "Democracy Index, EIU". <https://ourworldindata.org/grapher/democracy-index-eiu>
- Kompas (2025), "A Decade of Declining Trend in Indonesia's Democracy Index". <https://www.kompas.id/artikel/en-satu-dekade-tren-indeks-demokrasi-indonesia-menurun>
- Statista / Katadata Databoks, Democracy index Indonesia 2006–2024.

6. Pengguna Internet, Gadget, dan Screen Time

Penetrasi internet di Indonesia melonjak dari 34,9% (2015) menjadi 79,5% (awal 2024)—setara dengan ≈221,56 juta pengguna. Gen Z menjadi kontributor terbesar (34,40%), diikuti oleh Milenial (30,62%). Indonesia adalah salah satu negara dengan durasi screen time terlama di dunia. Rata-rata pengguna internet menghabiskan 7 jam 38 menit per hari di internet (2024) dan 3 jam 11 menit per hari di media sosial—jauh di atas rata-rata global (2 jam 23 menit). Khusus untuk anak dan remaja, KPAI (2020) mencatat 71,3% anak usia sekolah memiliki atau menggunakan gadget secara intensif dan 55% di antaranya menghabiskan waktu dengan game *online/offline*.

Tabel 6.1 — Pengguna Internet Indonesia, 2015–2024 (APJII)

Tahun	Pengguna (juta)	Penetrasi (%)	Catatan
2014	88,1	34,9	Baseline
2015	110,2	—	Lompatan smartphone
2016	132,7	51,5	—
2017	143,26	54,68	—
2018	171,17	64,8	—
2019	196,71	—	—
2019–2020	—	73,7	Lonjakan pandemi/WFH/SFH
2021–2022	210,03	77,02	—
2022–2023	215,63	78,19	—
2024 (awal)	221,56	79,5	Tertinggi dalam sejarah

Tabel 6.2 — Rata-Rata Screen Time Indonesia per Hari (We Are Social / Data Reportal)

Tahun	Internet	Media Sosial	Menonton TV/Video	Game
2021	8 jam 52 menit	3 jam 14 menit	± 2 jam 50 menit	1 jam 16 menit
2022	8 jam 36 menit	3 jam 17 menit	2 jam 50 menit	1 jam 19 menit
2023	7 jam 42 menit	3 jam 18 menit	2 jam 53 menit	1 jam 15 menit
2024	7 jam 38 menit	3 jam 11 menit	2 jam 41 menit	1 jam 31 menit

Tabel 6.3 — Fakta Kunci Anak & Remaja Indonesia

Indikator	Angka	Sumber
Anak usia sekolah punya gadget sendiri	71,3%	KPAI, 2020
Anak menghabiskan waktu untuk game online/offline	55%	KPAI, 2020
Remaja korban cyberbullying	45%	UNICEF Indonesia
Penetrasi internet Milenial (2024)	93,17%	APJII, 2024
Penetrasi internet Gen Z (2024)	87,02%	APJII, 2024
Pengguna TikTok Indonesia (Okt 2024)	165 juta+ (>82% dewasa)	ByteDance / We Are Social
Rekomendasi screen time anak >2 tahun	Maks. 2 jam/hari	WHO / IDAI

Sumber utama:

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Survei Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia (2015–2024). <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- We Are Social & Meltwater, "Digital 2024: Indonesia" (DataReportal). <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>

- We Are Social Indonesia, Digital Indonesia Reports 2021–2024.
<https://wearesocial.com/id/blog/>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Survei Penggunaan Gadget pada Anak (2018, 2020).
- Kominfo / BKKBN (2024), Kajian Epidemiologis Kasus Kecanduan Gadget pada Anak.
- UNICEF Indonesia, U-Report Online Bullying Poll.
- Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), "Keamanan Menggunakan Internet bagi Anak".
<https://www.idai.or.id/artikel/seputar-kesehatan-anak/keamanan-menggunakan-internet-bagi-anak>

7. Laju Deforestasi (Nasional & Regional)

Indonesia memiliki dua sumber data deforestasi resmi yang sering berbeda: (a) Kementerian Kehutanan (sebelumnya KLHK) yang menggunakan deforestasi netto (deforestasi bruto dikurangi reforestasi) dengan periode Juli–Juni, dan (b) Auriga Nusantara/MapBiomas yang berfokus pada hilangnya hutan alam dengan periode Januari–Desember. Global Forest Watch (GFW/Universitas Maryland) menyajikan data global. Tren umum: deforestasi menurun secara signifikan dari puncak 2014–2015 (1,09 juta ha), terendah pada 2021–2022 (104 ribu ha versi KLHK), lalu kembali naik (rebound) pada 2023–2024, terutama di Kalimantan, dipicu oleh kebun kayu pulp/biomassa, tambang nikel, dan Proyek Strategis Nasional (IKN, *food estate*).

**Tabel 7.1 — Deforestasi Indonesia Tahunan
(versi Auriga Nusantara), 2018–2024 (hektar)**

Periode	Deforestasi (ha)	Catatan
2014–2015	± 1.090.000	Era puncak kebakaran hutan & gambut
2019–2020	± 115.460	Penurunan signifikan
2020–2021	113.500	Pandemi, aktivitas industri turun
2021–2022 (KLHK)	104.000	Klaim terendah dalam sejarah
2021 (Auriga)	229.924	Versi NGO
2022 (Auriga)	230.760	—
2023 (Auriga)	257.384	Rebound dimulai
2024 (Auriga)	261.575	Tertinggi pasca-2017
2025 (Auriga STADI 2025)	433.751	Lonjakan 66%—tertinggi 5 tahun
2024 (Kemenhut)	175.400 (netto); 216.200 (bruto)	Definisi lebih sempit

**Tabel 7.2 — Deforestasi Tahunan per Pulau
(2023 vs 2024, versi Auriga, hektar)**

Pulau / Wilayah	2023 (ha)	2024 (ha)	Tren
Kalimantan	± 124.611	± 134.005	Naik – terluas 11 tahun beruntun
Sumatera	± 51.000	± 90.000+	Naik tajam
Sulawesi	± 25.000	± 11.000	Turun

Pulau / Wilayah	2023 (ha)	2024 (ha)	Tren
Papua (gabungan)	± 34.966	± 22.000	Turun, tetapi konsesi baru terbit
Maluku	± 12.000	± 8.000	Turun
Jawa, Bali & NT	± 9.807	± 5.000	Turun

Tabel 7.3 — 10 Provinsi dengan Deforestasi Terluas (2024, Auriga)

Provinsi	Deforestasi (ha)	Pemicu Utama
Kalimantan Timur	44.483	Tambang, kebun kayu, IKN
Kalimantan Barat	39.598	Kebun kayu (Mayawana Persada, dll)
Kalimantan Tengah	33.389	Kebun kayu, sawit
Riau	20.812	Sawit, kebun kayu
Sumatera Selatan	20.184	Sawit
Jambi	14.839	Kebun kayu logging
Aceh	8.962	Sawit (di SM Rawa Singkil)
Kalimantan Utara	8.767	Tambang batubara, kebun kayu energi
Bangka Belitung	7.956	Tambang timah
Sumatera Utara	7.303	Sawit

Konteks Tanah Papua: Auriga Nusantara (laporan "Deforestasi dan Pelepasan Kawasan Hutan di Tanah Papua") mencatat bahwa Tanah Papua—Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya—menanggung sekitar 13% dari deforestasi nasional pada 2023. Pada 2024, lima izin tambang nikel baru telah diterbitkan di Tanah Papua mencakup 38.529 hektare, dengan 22.452 hektare di antaranya berupa hutan alam. Food estate di Merauke menyebabkan deforestasi yang signifikan di Papua Selatan; tambang nikel di Raja Ampat mencemari pulau-pulau kecil yang seharusnya menjadi kawasan geopark UNESCO.

Sumber utama:

- Kementerian Kehutanan RI (sebelumnya KLHK), "Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024" (20 Maret 2025). <https://www.kehutan.go.id/news/article-10>
- KLHK (2023), "Laju Deforestasi Indonesia Tahun 2021–2022 Turun 8,4%". <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7243/>
- Auriga Nusantara (2025), "Status Deforestasi Indonesia 2024" (Stadi 2024). <https://simontini.id/id/status-deforestasi-indonesia-2024>
- Auriga Nusantara (2026), "Status Deforestasi Indonesia 2025" (Stadi 2025) – via Kompas, April 2026.
- Auriga Nusantara, "Deforestasi dan Pelepasan Kawasan Hutan di Tanah Papua". https://auriga.or.id/cms/uploads/pdf_id/report/7/1/deforestasi_dan_pelepasan_kawasan_hutan_di_tanah_papua_id.pdf
- Global Forest Watch, "Indonesia Deforestation Rates & Statistics". <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/>
- Forest Watch Indonesia (2024), "Hutan Papua dan Kalimantan Alami Deforestasi Tinggi". <https://fwi.or.id/hutan-papua-dan-kalimantan-alami-deforestasi-yang-tinggi/>
- Mongabay Indonesia (2025), Laporan FRA 2025 FAO.

8. Data Jumlah Sampah Nasional

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN, sebelumnya berada di bawah KLHK, kini berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup) mencatat timbulan sampah tahunan di Indonesia. Catatan penting: angka SIPSN sangat bergantung pada jumlah kabupaten/kota yang menginput data—pada 2024 hanya 274 kabupaten/kota dari total 514. Sehingga terdapat perbedaan signifikan dengan estimasi global (Bank Dunia: ≈65,2 juta ton pada 2020; Indonesia peringkat ke-5 dunia).

**Tabel 8.1 — Timbulan Sampah Nasional
(versi SIPSN/KLHK/KemenLH), 2019–2024**

Tahun	Timbulan Tahunan (juta ton)	Timbulan Harian (ribu ton/hari)	Kab/Kota Input
2019	± 28,6	± 78,4	—
2020	± 28,5	± 78,1	—
2021	± 29,5	± 80,8	—
2022	± 38,6 (jump)	± 105,8	202
2023	± 38,2	± 104,7	—
2024	33,79	± 76 (data input parsial)	274

Catatan: lonjakan dari 2021 ke 2022 (28,5 → 38,6 juta ton) didorong oleh peningkatan kualitas pelaporan dari kabupaten/kota, bukan semata-mata lonjakan riil. Bank Dunia (Atlas of Sustainable Development Goals 2023) memperkirakan timbulan sampah Indonesia pada 2020 ≈ 65,2 juta ton—jauh di atas SIPSN—sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat 5 dunia.

Tabel 8.2 — Komposisi Sampah Indonesia Berdasarkan Jenis (SIPSN 2023)

Jenis Sampah	Persentase (%)
Sisa makanan / food waste	39,67
Plastik	19,65 (2024); 15,88 (2019)
Kertas/karton	± 11
Kayu, ranting, daun	± 13
Logam, kaca, karet, kain, lainnya	± 16

Tabel 8.3 — Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber (SIPSN 2023)

Sumber Sampah	Persentase (%)
Rumah tangga	50,80
Perniagaan (toko, restoran)	14,77
Pasar tradisional	12,19
Kawasan permukiman/publik	8,12
Perkantoran	6,03

Sumber Sampah	Persentase (%)
Fasilitas publik (sekolah, stasiun)	5,24
Lainnya	2,85

Data Kemenko PMK (2023, berdasarkan SIPSN 2022): dari 21,1 juta ton sampah nasional yang terdata, 65,71% (13,9 juta ton) terkelola, sementara 34,29% (7,2 juta ton) tidak terkelola. Untuk timbulan harian: SIPSN 2024 mencatat ≈ 76.000 ton/hari. Estimasi Bank Dunia menempatkan timbulan sampah plastik ke laut Indonesia pada kisaran 0,48–1,29 juta ton/tahun—negara penyumbang sampah laut terbesar kedua di dunia (Sumber lain: Jambeck et al. 2015).

Sumber utama:

- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kementerian LH/KLHK. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> (dashboard publik)
- SIPSN Portal (2025-), Kementerian Lingkungan Hidup. <https://portal-sipsn.kemenlh.go.id/>
- Kemenko PMK (2023), "7,2 Juta Ton Sampah di Indonesia Belum Terkelola Dengan Baik". <https://www.kemenkopmk.go.id/72-juta-ton-sampah-di-indonesia-belum-terkelola-dengan-baik>
- KLH-BPLH (2025), "Rakornas Pengelolaan Sampah 2025—Timbulan Sampah Indonesia 2023 sebesar 56,63 juta ton". <https://databoks.katadata.co.id/en/environment/statistics/67fcf855d9122/>
- Tempo Data (2025), "Penanganan Sampah di Indonesia". <https://www.tempo.co/data/data/penanganan-sampah-di-indonesia-1210880>
- KLHK (2024), Festival LIKE 2 – "Timbulan sampah 69,9 juta ton (2023)" [angka proyeksi nasional]. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7818/>
- Bank Dunia, "The Atlas of Sustainable Development Goals 2023".

9. Kesehatan Mental Remaja

Menurut Indonesia – National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) 2022, hasil kerja sama UGM, University of Queensland, Johns Hopkins, Kemenkes, USU, dan Unhas. Survei pertama berskala nasional yang mewakili Indonesia, dengan melibatkan 5.664 remaja berusia 10–17 tahun.

Tabel 9.1 — Temuan Utama I-NAMHS 2022

Indikator	Prevalensi	Setara Jumlah Remaja
≥ 1 masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir (1 dari 3 remaja)	34,9%	$\pm 15,5$ juta
≥ 1 gangguan jiwa terdiagnosis (1 dari 20 remaja)	5,5%	$\pm 2,45$ juta
Gangguan cemas (fobia sosial + cemas menyeluruh)	3,7%	$\pm 1,65$ juta
Gangguan depresi mayor	1,0%	$\pm 0,45$ juta
Gangguan perilaku (conduct disorder)	0,9%	$\pm 0,40$ juta
PTSD	0,5%	$\pm 0,22$ juta
ADHD	0,5%	$\pm 0,22$ juta
Mengakses layanan kesehatan jiwa dalam 12 bulan	2,6%	Sangat rendah

Tabel 9.2 — Konteks Tambahan Kesehatan Mental Remaja Indonesia

Indikator	Angka	Sumber
Prevalensi depresi nasional (≥ 15 thn) 2023	1,4%	Riskesdas/Kemenkes 2023
Prevalensi depresi tertinggi: 15–24 thn	2,0%	Riskesdas 2023
Remaja punya ide bunuh diri (terkait depresi)	19%	Studi pendukung, dikutip ITS
Remaja melakukan self-harm	45%	Studi pendukung
Bunuh diri pada usia 10–39 tahun	47,7% dari total	Sistem Registrasi Sampel Litbangkes 2016

Sumber utama:

- I-NAMHS (Indonesia – National Adolescent Mental Health Survey) Report, UGM-UQ-JHSPH-Kemenkes (2022). <https://qcmhr.org/research/indonesia-namhs>
- Repository Badan Kebijakan Pembangunan Kemkes (2024), "Depresi pada Anak Muda di Indonesia" (Fact Sheet). <https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5532/>
- Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kemenkes, 2018 dan 2023.
- RSA UGM (2025), "Pentingkah Menjaga Kesehatan Mental bagi Remaja?" <https://rsa.ugm.ac.id/bulan-kesehatan-mental-pentingkah-menjaga-kesehatan-mental-bagi-remaja/>
- Puslit DPR RI (2025), "Pemeriksaan Kesehatan Mental" (Isu Sepekan). https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/

10. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Menurut SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), KemenPPPA. Catatan: SIMFONI bersifat self-reported (laporan masuk), bukan prevalensi sebenarnya. Survei prevalensi: SPHPN (Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional) 2016, 2021, 2024 dan SNPHAR (Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja) 2018, 2021, 2024.

Tabel 10.1 — Jumlah Kasus Kekerasan Tercatat di SIMFONI PPA, 2019–2024

Tahun	Kasus Perempuan	Kasus Anak	Total Korban	Catatan
2019	± 11.000	6.454 (seksual)	—	Kekerasan seksual anak
2020	± 8.686	6.980 (seksual)	—	Pandemi: pelaporan turun
2021	± 10.247	8.730 (seksual)	—	Naik 25% YoY (seksual)
2022	11.266	16.106	± 27.000	—
2023 (Jan–Nov)	± 12.500	15.120	± 27.000+	—
2024	12.161	19.628	34.064	Anak laki 4.691; perempuan 12.158
2025 (per Juli)	—	—	14.039 (parsial)	Akumulatif sd 3 Juli 2025

Tahun	Kasus Perempuan	Kasus Anak	Total Korban	Catatan
2025 (akumulasi)	—	—	35.025	Total 2025 (SIMFONI v3)

Tabel 10.2 — Prevalensi Kekerasan (Survei SPHPN/SNP HAR)

Indikator	Angka	Sumber
Perempuan 15–64 thn alami kekerasan fisik (2024)	7,2%	SPHPN 2024 (turun dari 8,2% di 2021)
Perempuan 15–64 thn alami kekerasan seksual (2024)	5,3%	SPHPN 2024 (turun dari 5,7% di 2021)
Perempuan alami kekerasan dalam rumah tangga (2024)	1 dari 5 (20%)	SPHPN 2024
Perempuan alami kekerasan oleh pasangan (2024)	1 dari 10 (10%)	SPHPN 2024
Perempuan 15–64 thn alami kekerasan fisik/seksual (2024)	1 dari 4 (25%)	SPHPN 2024
Anak alami minimal 1 bentuk kekerasan (2024)	1 dari 2 (50%)	SNPHAR 2024
Praktik P2GP (sunat perempuan)	46,3%	SPHPN 2024 (menurun dari survei sebelumnya)
Wilayah prevalensi tertinggi KDRT	Nusa Tenggara, Maluku, Papua	SPHPN 2024

Catatan analitis: *Selisih besar antara data SIMFONI dan SPHPN/SNP HAR menunjukkan fenomena "gunung es"—kasus yang dilaporkan jauh lebih sedikit daripada yang sebenarnya terjadi. KemenPPPA sendiri menyatakan bahwa banyak korban masih sulit melapor karena malu, takut, atau tidak tahu harus mengadu ke mana. Kekerasan paling dominan: kekerasan fisik (dalam SIMFONI), kekerasan seksual (dalam SNPHAR pada anak), dan KDRT (dalam SPHPN pada perempuan).*

Sumber utama:

- SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), KemenPPPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/> dan <https://www.kemenpppa.go.id/simfoni>
- KemenPPPA (2025), "Pemerintah Indonesia Perkuat Komitmen Regional untuk Hapus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak". <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/pemerintah-indonesia-perkuat-komitmen-regional-hapus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>
- KemenPPPA (2025), Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024. <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/angka-kekerasan-terhadap-perempuan-di-indonesia-menurun>
- KemenPPPA & BPS, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2018, 2021, 2024.
- Komnas Perempuan, Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan 2016–2024.

11. Sekolah & Layanan Kesehatan Katolik di Indonesia

Data tahunan jumlah sekolah dan layanan kesehatan Katolik di Indonesia tidak dipublikasikan secara terbuka oleh MNP (Majelis Nasional Pendidikan Katolik)

maupun PERDHAKI (Perhimpunan Rumah Sakit dan Klinik Katolik Indonesia) melalui rilis publik tahunan yang konsisten. Data terstruktur yang tersedia berupa kompilasi periodik.

Tabel 11.1 — Kondisi Pendidikan Katolik di Indonesia (Snapshot)

Aspek	Status / Angka	Catatan & Sumber
Wadah pengelolaan	MNPK + ± 38 MPK Keuskupan	MNPK didirikan 1974
Sekolah keagamaan Katolik (SDK, SMPK, SMAK, SMTK)	Dibina Bimas Katolik Kemenag	Data per provinsi tersedia di satudata.kemenag.go.id
Sistem informasi terpadu	SiPekat (pendidikankatolik.id)	Hanya bisa diakses MPK & yayasan ber-SK
Tren umum 2010–2024	Penurunan jumlah murid	Dibahas di KSKI 2020 & Pernas MNPK 2025
Penyebab utama penurunan	Biaya tinggi vs sekolah gratis; kekurangan suster pendidik; perubahan demografi	Diskusi internal MNPK
Permintaan penegerian (SMAK)	Solor, Adonara, Tambolaka (NTT); Deiyai, Timika, Merauke (Papua)	Bimas Katolik Kemenag, 2021
Sekolah Katolik di Asia (data global, 2022)	± 1,3 juta TK/SD/SMP/SMA = 50% global Gereja Katolik	Fides/Vatikan 2023
Siswa Katolik di Asia	13,9 juta	Fides 2023

Tabel 11.2 — Layanan Kesehatan Katolik di Indonesia (Snapshot)

Aspek	Status / Angka	Sumber
Asosiasi nasional	PERDHAKI – Perhimpunan Rumah Sakit & Klinik Katolik Indonesia	perdhaki.org
Estimasi jaringan PERDHAKI	± 400+ unit (RS, klinik, poliklinik) [estimasi historis]	PERDHAKI, data agregat tidak rilis publik berkala
RS Katolik global (Asia)	12.208 fasilitas (RS, apotek, panti)	Fides/Vatikan 2023
RS Katolik global (dunia)	5.377 RS + 13.895 klinik/apotek + 504 panti Hansen + 15.000+ panti wreda + 8.600 panti asuhan	Fides 2024
Tren imam diosesan Asia 2020→2021	+1,4% (40.791 imam)	Fides 2023
Tren biarawati global Paus Fransiskus	Turun ± 11% sejak 2013	Vatikan, 2023
Umat Katolik Indonesia (Kemenag 2022)	± 8,3 juta (3,12% pop)	Kemenag 2022

Aspek	Status / Angka	Sumber
Umat Katolik Indonesia (Bimas Katolik 2024)	± 12,5 juta	Bimas Katolik, Juli 2024

REKOMENDASI ANTARA – DATA SEKOLAH & KESEHATAN KATOLIK

Kebutuhan data untuk membaca Nota Pastoral 2026, disarankan:

1. Berkoordinasi langsung dengan MNPK (Sekretariat di Jakarta) untuk data Yayasan dan Satuan Pendidikan Katolik per keuskupan (data tersedia secara internal di SiPekat).
2. Menghubungi PERDHAKI Pusat untuk memperoleh data jumlah RS Katolik, klinik, serta tren dalam 10 tahun terakhir.
3. Memanfaatkan data Bimas Katolik Kemenag (<https://satudata.kemenag.go.id>) untuk sekolah keagamaan Katolik per provinsi.
4. Memanfaatkan *Annuario Statistico della Chiesa* (Vatikan) dalam konteks global.

Sumber publik yang sudah tersedia:

- MNPK, "Sistem Informasi Lembaga Pendidikan Katolik – SiPekat".
<https://www.pendidikankatolik.id/>
- MNPK, "Mengembalikan Kejayaan Sekolah Katolik".
<https://mnpkindonesia.org/2017/04/07/mengembalikan-kejayaan-sekolah-katolik/>
- Konferensi Sekolah Katolik Indonesia (KSKI) 2020, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- PERNAS MNPK 2025, Labuan Bajo. <https://mnpk-ge.org/>
- Kemenag RI, "Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik".
<https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-lembaga-pendidikan-keagamaan-katolik-menurut-jenjang-pendidikan>
- Vatican / Fides, "Annuarium Statisticum Ecclesiae" (annual).

Catatan Metodologis dan Rekomendasi

1. Catatan

- *Paradoks satu dekade: indikator makro membaik (kemiskinan, pengangguran, Gini turun), tetapi kualitas hidup melemah — demokrasi surut, screen time melonjak, kesehatan mental remaja memprihatinkan, deforestasi rebound, sektor informal makin dominan.*
- *Fenomena "gunung es" yang kuat terkait kekerasan perempuan/anak dan kesehatan mental — data resmi hanya mencerminkan sebagian kecil dari realitas.*
- *Indonesia keluar dari kategori lower-middle income (2019), tetapi 60,3% rakyat (versi Bank Dunia) masih hidup di bawah USD 6,85 PPP/hari — kerentanan struktural tetap tinggi.*
- *Deforestasi 2024–2025 rebound akibat: PSN (IKN, food estate), ekspansi tambang nikel, dan industri pulp/biomassa — ketiganya beroperasi dalam koridor izin resmi ("deforestasi legal").*
- *Komponen terlemah demokrasi Indonesia: political culture (5,00 vs rata-rata global 5,32) — relevan langsung dengan tema keadaban publik dalam Nota Pastoral.*

2. Tentang Sumber Data

- *Data primer: lembaga resmi (BPS, KemenPPPA, KLHK/KemenLH, Kemenhut, APJII, Kemenkes) dan lembaga internasional (EIU, Bank Dunia, We Are Social/DataReportal).*

- Data NGO (Auriga Nusantara, FWI, Komnas Perempuan) digunakan sebagai *second opinion*, terutama untuk deforestasi — perbedaan metodologi antara netto vs hutan alam menghasilkan angka yang sangat berbeda.
- Data Bank Dunia disertakan khusus untuk membandingkan kemiskinan dan ketimpangan secara internasional.
- Koreksi EIU Democracy Index 2024 (Tabel 2): Functioning of government 7,86 → 6,79; Civil liberties 6,18 → 5,29; Political culture 4,38 → 5,00. Komponen terlemah tetap political culture; gap terhadap global lebih kecil (-0,32 poin, bukan -0,94).
- Deforestasi: data Auriga STADI 2025 ditambahkan (433.751 ha, lonjakan 66% dari 2024, tertinggi dalam 5 tahun). Sampah: timbunan 2023 versi proyeksi nasional KLH = 56,63 juta ton; angka SIPSN lebih rendah karena inputnya parsial dari kab/kota — keduanya disajikan untuk transparansi.
- GDP, Gini, Kemiskinan, TPT, Pekerja Informal, Demokrasi (agregat), APJII, We Are Social, I-NAMHS, SIMFONI PPA — dikonfirmasi sesuai sumber asli, tanpa koreksi material.

3. Pemetaan Data: 6 Dimensi Krisis Multidimensi

Dimensi Krisis	Kategori Data Pendukung
Sosial	9 (Kesehatan mental remaja); 10 (Kekerasan perempuan/anak); 6 (Screen time anak)
Teknologi	6 (Penetrasi internet, screen time, gadget anak)
Ekonomi	1 (GDP); 2 (Gini); 3 (Kemiskinan); 4 (Pengangguran & pekerja informal)
Ekologi	7 (Deforestasi); 8 (Sampah)
Politik	5 (Indeks Demokrasi EIU)
Nilai	11 (Sekolah & kesehatan Katolik); 5 (Political culture); 9–10 (relasi sosial)